DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL	
DAFTAR IS	SI	ii
DAFTAR TA	ABEL	iv
DAFTAR G	AMBAR	xii
BAB I PE	NDAHULUAN	I-1
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	
1.3.	Hubungan Antar Dokumen	
1.4.	Sistematika Penulisan	
1.5.	Maksud dan Tujuan	1-6
BAB II EV	ALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN	
KI	NERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1.	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
	2.1.1Aspek Geografi dan Demografi	II-
	a. Aspek Geografi	II-1
	b. Aspek Demografi	
	2.1.2Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
	11	11
	a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-12
	b. Fokus Kesejahteraan Sosial	
	c. Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga	
	2.1.3Aspek Pelayanan Umum	
	33	11
	a. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-33
	b. Fokus Layanan Urusan Pilihan	
	2.1.4Aspek Daya Saing Daerah	
	116	11
	a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-117
	b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-118
	c. Fokus Iklim Berinvestasi	II-124
	d. Fokus Sumber Daya Manusia	II-129
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD	
	2013-2018 sampai Tahun 2016	
	II-132	
	.2.1Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2016	II-132
	2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2016 atas Capaian RPJMD	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2013 –2018	II-133

	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	••
	II-22	1
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN	
	KEUANGAN DAERAH	
3	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	
J	III-	
	3.1.1	
	Ekonomi Daerah	
	3.1.2	
	gan dan Prospek Perekonomian Daerah	· Tarrearr
	Tahun 2015 dan Tahun 2016	III_28
3	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	
0	III-2	
	3.2.1	
		•
	si Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	
	Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2017a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	
	b. Arah Kebijakan Belanja Daerahb.	
	c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 4.1isi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembanguna Daerah	V an
		•
	IV-1	-
	4.2	
	rioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung	
	IV-14	•
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	
	TAHUN 2018	V-1
	5.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	. V-1
	5.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan	
	Pelayanan Dasar	V-9
	5.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	V-16
	5.4. Fungsi Penunjang Perencanaan	
	5.5. Fungsi Penunjang Kepegawaian.	
	5.6. Fungsi Penunjang Pengawasan	
	5.7. Fungsi Penunjang Keuangan	
	5.8. Fungsi Penunjang Pemerintahan Lainnya	V-20
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung	II-1
Tabel 2.2.	Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2016	II-1
Tabel 2.3.	Pembagian Wilayah Berdasarkan Kemiringan	
	Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2016	II-2
Tabel 2.4.	Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian	
	Kabupaten Temanggung	II-3
Tabel 2.5.	Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-4
Tabel 2.6.	Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan	
	Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2015	II-5
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2016	II-6
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Menurut Umur Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2016	II-7
Tabel 2.9.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per	
	Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2016	II-9
Tabel 2.10.	Penduduk Usia 10 Tahun keatas Menurut Lapangan Usaha	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015	II-10
Tabel 2.11.	Komposisi Penduduk Menurut Agama	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2016	II-10
Tabel 2.12.	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2011-2015	II-11
Tabel 2.13.	IPM dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota di	
	Eks Karisidenan Kedu Tahun 2011-2015	II-12
Tabel 2.14.	PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung	
	Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010)
	Tahun 2010-2015	
Tabel 2.15.	Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah	
	dan Nasional Tahun 2011 – 2015	II-14
Tabel 2.16.	Pertumbuhan Ekonomi per Kategori Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2011 – 2015 (persen)	
Tabel 2.17.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2010-2015	II-16
Tabel 2.18.	Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2015	II-17
Tabel 2.19.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Temanggung Menurut	
	Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2010-2015 (persen)	II-20
Tabel 2.20.	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung,	
	Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2006-2015	II-21
Tabel 2.21.	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2010-2014	II-22
Tabel 2.22.	Angka Melek Huruf Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-24
Tabel 2.23.	Angka Rata-rata Lama Sekolah Metode Baru Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2011-2015	II-24
Tabel 2.24.	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Temanggung	
3	Tahun 2012-2016	II-25
Tabel 2.25.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012 - 2016	II-25

Tabel 2.26.	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-26
Tabel 2.27.	Angka Kematian Bayi Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2011-2015	II-26
Tabel 2.28.	Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2011-2015	II-27
Tabel 2.29.	Kondisi Status Gizi Balita Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-28
Tabel 2.30.	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015	II-29
Tabel 2.31.	Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015	II-29
Tabel 2.32.	Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2011-2015	II-30
Tabel 2.33.	Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten Temanggung	11 00
14501 2 .00.	Tahun 2011-2015	11-30
Tabel 2.34.	TPAK,TPT,Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan	11 00
1abel 2.04.	Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015	II_31
Tabel 2.35.	Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Kabupaten Temanggung	11-51
1abel 2.33.		11 20
T-1-1-0-00	Tahun 2012-2016	11-32
Tabel 2.36.	Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kabupaten Temanggung	11 00
T 1 10 07	Tahun 2012-2016	11-32
Tabel 2.37.	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-34
Tabel 2.38.	Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-35
Tabel 2.39.	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-36
Tabel 2.40.	Perkembangan PAUD Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2011-2015	II-37
Tabel 2.41.	Persentase Kondisi Ruang Kelas SD/MI	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2015	II-38
Tabel 2.42.	Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2015	II-39
Tabel 2.43.	Kondisi Ruang Kelas SMA/MA/SMK Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2015	II-39
Tabel 2.44.	Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-40
Tabel 2.45.	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-40
Tabel 2.46.	Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs	
14361 2.10.	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-41
Tabel 2.47.	Jumlah Guru Memiliki Kualifikasi S ₁ /D-IV, S ₂ atau lebih	11 11
14501 2.17.	di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II_/I 1
Tabel 2.48.	Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Temanggung	11-41
1abci 2.40.	Tahun 2012-2016	II 49
Tabel 2.49.	Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu dan	11-42
1abel 2.49.	•	
	Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten Temanggung	II 40
Tob 61 0 50	Tahun 2012-2016	11-43
Tabel 2.50.	Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan	
	Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Menurut Kecamatan	TT 4.
m 1 10 = -	di Kabupaten Temanggung, Tahun 2015	11-44
Tabel 2.51.	Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-45

Tabel 2.52.	•	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-45
Tabel 2.53.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-46
Tabel 2.54.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang	
	memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-47
Tabel 2.55.	Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization)	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-48
Tabel 2.56.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-48
Tabel 2.57.	Cakupan Ibu Hamil K4 Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-48
Tabel 2.58.	Penanganan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	
Tabel 2.59.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	
	BTA Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-50
Tabel 2.60.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	
	DBD Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-51
Tabel 2.61.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat	
	miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-51
Tabel 2.62.	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-52
Tabel 2.63.	Cakupan Kunjungan Nifas Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-52
Tabel 2.64.	Jumlah Desa/Kelurahan dengan kejadian KLB ditangani	
	<24 jam di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-53
Tabel 2.65.	Persentase Rumah Tangga yang Ber-PHBS Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-53
Tabel 2.66.	Jaringan Jalan Dirinci menurut status dan kondisi jalan	
	Tahun 2012 - 2016	II-54
Tabel 2.67.	Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Temanggung Tahun 2015	II-55
Tabel 2.68.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten	
m 1 10 00	Temanggung Tahun 2012-2016	II-56
Tabel 2.69.	Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-56
Tabel 2.70.	Kebutuhan Rumah Kabupaten Temanggung	
m 1 10 m	Tahun 2012-2016	II-57
Tabel 2.71.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-57
Tabel 2.72.	Rumah Tangga ber Sanitasi Kabupaten Temanggung	** =0
m 1 10 m	Tahun 2012-2016	II-58
Tabel 2.73.	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung	** =0
m 1 10 m4	tahun 2012-2016	II-59
Tabel 2.74.	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung	** =0
	tahun 2012-2016	II-59
Tabel 2.75.	Perkembangan Peningkatan Tipe Rumah Kabupaten	** 00
m 1 10 m	Temanggung Tahun 2012-2016	II-60
Tabel 2.76.	Jumlah Rumah Menurut Tipe Rumah Per Kecamatan	II 00
m 1 10 ==	Kabupaten Temanggung Tahun 2014	11-60
Tabel 2.77.	Persentase Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan	TT 00
m 1 10 =0	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	11-62
Tabel 2.78.	Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Kabupaten	TT 00
	Temanggung Tahun 2012-2016	п-63

Tabel :	2.79.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten	
		Temanggung Tahun 2012-2016	II-64
Tabel :	2.80.	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-65
Tabel :	2.81.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2012-2016	
Tabel :	2.82.	thm:continuity:equation:continuity:equation:continuity:equation: Jumlah Terminal Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-66
Tabel :	2.83.	Prosentase Volume Sampah Yang Direduksi Pada Tingkat	
		TPST Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-67
Tabel :	2.84.	Proporsi Rumah Tangga Yang Mendapat Air Minum Layak	
		Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-68
Tabel :	2.85.	TPS per Satuan Penduduk Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2012-2016	II-69
Tabel :	2.86.	Jumlah Bidang Lahan Bersertifikat Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2013 - 2016	II-69
Tabel :	2.87.	Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kabupaten	
		Temanggung Tahun 2012-2016	II-70
Tabel :	2.88.	Kepemilikan KTP Berbasis NIK Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2012-2016	II-70
Tabel :	2.89.	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten	
		Temanggung Tahun 2012-2016	II-71
Tabel :	2.90.	Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten	
		Temanggung Tahun 2012-2016	II-71
Tabel :	2.91.	Pekerja Perempuan yang Bekerja Mandiri Kabupaten	
		Temanggung Tahun 2012-2016	II-72
Tabel :	2.92.	Partisipasi perempuan dalam partai politik Kabupaten	
		Temanggung Tahun 2012-2016	II-73
Tabel :	2.93.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten	
		Temanggung Tahun 2012-2016	II-74
Tabel :	2.94.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten	
		Temanggung Tahun 2012-2016	II-74
Tabel :	2.95.	Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
		Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-75
Tabel :	2.96.	Jumlah Penduduk Peserta KB Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2012-2016	II-75
Tabel :	2.97.	Rasio Akseptor KB Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2012-2016	II-76
Tabel :	2.98.	Persentase Peserta KB Aktif Terhadap PUS Per Kecamatan	
		di Kabupaten Temanggung Tahun 2016	II-76
Tabel :	2.99.	Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten	
		Temanggung Tahun 2012-2016	II-77
Tabel :	2.100.	Perkembangan Sarana Sosial Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2012-2016	II-78
Tabel :	2.101.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten	
		Temanggung Tahun 2012-2016	II-78
Tabel :	2.102.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten	
		Temanggung Tahun 2012-2016	II-79
Tabel :	2.103.	Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2012-2016	II-79
Tabel :	2.104.	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2012-2016	II-81
Tabel :	2.105.	Angka Sengketa pengusaha-pekerja Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2012-2016	II-81
Tabel :	2.106.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan Kabupaten Temanggung	
		Tahun 2012-2016	II-81

Tabel 2.10	7. Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-82
Tabel 2.10	8. Klasifikasi Jenis Koperasi Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-83
Tabel 2.10	9. Jumlah UKM non BPR/LKM-UKM Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-84
Tabel 2.11	0. Jumlah BPR/LKM Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-85
Tabel 2.11	1. Jumlah Investor PMDN dan PMA Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-86
Tabel 2.11	2. Nilai Investasi PMDN Kabupaten Temanggung	
100.5 01 = 111	Tahun 2012-2016	II-87
Tabel 2-11	3. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten	11 01
14501 2.11	Temanggung Tahun 2012-2016	11_88
Tabel 9 11	4. Organisasi Pemuda Kabupaten Temanggung	11 00
1abci 2.11	Tahun 2012-2016	11_80
Tabal 9 11	5. Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Temanggung	11-09
1abel 2.11		11 00
т.11 О 1 1	Tahun 2012-2016	11-69
Tabel 2.11	6. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Temanggung	II 00
m 1 10 11	Tahun 2012-2016	11-89
Tabel 2.11	7. Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-90
Tabel 2.11	8. Lapangan Olahraga Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-90
Tabel 2.11	9. Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan	
	OKP Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-90
Tabel 2.12	0. Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-91
Tabel 2.12	1. Jumlah Partai Politik Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-91
Tabel 2.12	2. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-92
Tabel 2.12	3. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-92
Tabel 2.12	4. Rasio Jumlah Poskamling Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-92
Tabel 2.19	5. Cakupan patroli petugas satpol pp Kabupaten Temanggung	11 02
14501 2.12	Tahun 2012-2016	11-93
Tabel 9 19	6. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kabupaten	11 00
1abci 2.12	Temanggung Tahun 2012-2016	II OS
Tabal 9 19	7. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	11-33
1abel 2.12	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	II 04
T-1-10 10	Temanggung Tahun 2012-2016	11-94
1abel 2.12	8. Cakupan Kantor Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten	II 0 4
m 1 10 10	Temanggung Tahun 2016	11-94
Tabel 2.12	9. Perkembangan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	
	0. Jumlah LSM Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-97
Tabel 2.13	1. Pengelolaan Arsip Secara Baku Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-98
Tabel 2.13	2. Operator Telekomunikasi Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-98
Tabel 2.13	3. Rasio Warnet Terhadap penduduk Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-99
Tabel 2.13	4. Jumlah Media Cetak (Surat Kabar) Kabupaten Temanggung	

	Tahun 2012-2016	II-99
Tabel 2.135.	Jumlah Stasiun Radio Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-100
Tabel 2.136.	Jumlah TV Nasional Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-100
Tabel 2.137.	Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-101
Tabel 2.138.	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-102
Tabel 2.139.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemda Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-103
Tabel 2.140.	Koleksi Buku Perpustakaan Milik Pemda Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-103
Tabel 2.141.	Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-103
Tabel 2.142.	Produksi dan Konsumsi Komoditas Tanaman Pangan	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-105
Tabel 2.143.	Perkembangan Sektor Perkebunan Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-106
Tabel 2.144.	Perkembangan Sektor Peternakan Kabupaten Temanggung	
m 1 10 14 F	Tahun 2012-2016	II-108
Tabel 2.145.	Perkembangan Wisatawan (jiwa) Kabupaten Temanggung	W 110
T 1 10 140	Tahun 2012-2016	11-110
Tabel 2.146.	Perkembangan Sektor Perikanan Kabupaten Temanggung	TT 111
T 1 10 147	Tahun 2012-2016	11-111
Tabel 2.147.	Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten	H 110
T-1-10 140	Temanggung Tahun 2016	11-112
Tabel 2.148.	Nama dan Alamat SPBU – SPBE Kabupaten Temanggung	II 110
Tabal 9 140	Tahun 2016.	11-112
Tabel 2.149.	Perkembangan Sektor Perindustrian Kabupaten Temanggung	II 110
Tabal 2 150	Tahun 2012-2016Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri	11-113
1abel 2.150.	Kabupaten Temanggung Tahun 2016	II 11 <i>1</i>
Tabel 9 151	Jumlah Transmigrasi Kabupaten Temanggung	11-114
1abel 2.151.	Tahun 2012-2016	II 116
Tabel 2 152	Pendapatan per Kapita Kabupaten Temanggung	11-110
Tabel 2.152.	Tahun 2012-2016	II_117
Tabel 2 153	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten	11-117
10001 2:100:	Temanggung Tahun 2012-2016	II-118
Tabel 2 154	Jumlah Orang yang Melalui terminal Kabupaten	11 110
14501 2.10 1.	Temanggung Tahun 2012-2016	II-119
Tabel 2.155.	Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kabupaten Temanggung	11 110
10001 201000	Tahun 2012-2016	II-119
Tabel 2.156.	Rasio Luas Wilayah Produktif (Ha) Kabupaten Temanggung	
10001 201000	Tahun 2012-2016	II-119
Tabel 2.157.	Jumlah Restoran dan Rumah Makan Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-121
Tabel 2.158.	Perkembangan Penginapan/Hotel Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-121
Tabel 2.159.	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih per Kecamatan	_
	di Kabupaten Temanggung Tahun 2016	II-122
Tabel 2.160.	Kasus Pencemaran Lingkungan dan Plasma Nuftah	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-123
Tabel 2.161.	Penggunaan Daya Listrik Terpasang (KwH) Kabupaten	

	Temanggung Tahun 2012-2016	II-123
Tabel 2.162.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-124
Tabel 2.163.	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016	II-124
Tabel 2.164.	Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012–2016	II-125
Tabel 2.165.	Jumlah Demonstrasi Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-126
Tabel 2.166.	Lama Perijinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2016	II-126
Tabel 2.167.	Jumlah dan Jenis Perizinan yang Dikeluarkan Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-127
Tabel 2.168.	Status Desa/Kelurahan Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-128
Tabel 2.169.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2012-2016	II-129
Tabel 2.170.	Rasio Ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten	
	Temanggung Tahun 2012-2016	II-130
Tabel 2.171.	Kondisi Dokumen Perencanaan Kabupaten Temanggung	II-132
Tabel 2.172.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Pendidikan Sampai Tahun 2016	II-133
Tabel 2.173.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Pendidikan Yang Beralih Kewenangan Sampai Tahun 2016	II-141
Tabel 2.174.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Kesehatan Sampai Tahun 2016	II-145
Tabel 2.175.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang RSUD	
	Sampai Tahun 2016	II-151
Tabel 2.176.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Pekerjaan Umum Sampai Tahun 2016	II-153
Tabel 2.177.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Perumahan Rakyat Sampai Tahun 2016	II-155
Tabel 2.178.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Penataan Ruang Sampai Tahun 2016	II-156
Tabel 2.179.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Perencanaan Sampai Tahun 2016	II-158
Tabel 2.180.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Perhubungan Sampai Tahun 2016	II-159
Tabel 2.181.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Komunikasi Dan Informatika Sampai Tahun 2016	II-161
Tabel 2.182.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Lingkungan Hidup Sampai Tahun 2016	II-163
Tabel 2.183.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Pertanahan Sampai Tahun 2016	II-165
Tabel 2.184.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Kependudukan Dan Catatan Sipil Sampai Tahun 2016	II-166
Tabel 2.185.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Pemberdayaan Perempuan Sampai Tahun 2016	II-167
Tabel 2.186.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Keluarga Berencana Sampai Tahun 2016	II-169
Tabel 2.187.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Sosial Sampai Tahun 2016	II-172
Tabel 2.188.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Ketenagakerjaan Sampai Tahun 2016	II-175
Tabel 2.189.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	

	Koperasi Dan UMKM Sampai Tahun 2016	II-177
Tabel 2.190.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Penanaman Modal Sampai Tahun 2016	II-178
Tabel 2.191.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Kebudayaan Sampai Tahun 2016	II-180
Tabel 2.192.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Pemuda Dan Olahraga Sampai Tahun 2016	II-182
Tabel 2.193.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Sampai	
	Tahun 2016	II-183
Tabel 2.194.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Otonomi Daerah Sampai Tahun 2016	II-184
Tabel 2.195.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	11 10 1
14301 2.100.	Pangan Sampai Tahun 2016	II-190
Tabel 2 196	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	11 100
1abel 2.150.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Sampai Tahun 2016	II_101
Tabel 2 107	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	11-131
1abci 2.197.	Statistik Sampai Tahun 2016	II 102
Tabal 9 109	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	11-193
1abel 2.196.	•	II 100
T-1-10 100	Kearsipan Sampai Tahun 2016	11-193
1abel 2.199.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	II 104
T 1 10 000	Perpustakaan Sampai Tahun 2016	11-194
Tabel 2.200.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	** 10=
m.1.10.001	Pertanian Sampai Tahun 2016	II-195
Tabel 2.201.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Bapelluh Sampai Tahun 2016	II-197
Tabel 2.202.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Peternakan Sampai Tahun 2016	II-198
Tabel 2.203.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Kehutanan Sampai Tahun 2016	II-199
Tabel 2.204.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Pariwisata Sampai Tahun 2016	II-200
Tabel 2.205.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Kelautan Dan Perikanan Sampai Tahun 2016	II-201
Tabel 2.206.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Perdagangan Sampai Tahun 2016	II-203
Tabel 2.207.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Perindustrian Sampai Tahun 2016	II-204
Tabel 2.208.	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang	
	Transmigrasi Sampai Tahun 2016	II-205
Tabel 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan	
	Nasional Tahun 2011-2015	III-3
Tabel 3.2.	PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2010 – 2015 (ADHB dan ADHK) Tahun Dasar : 2010	III-3
Tabel 3.3.	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar	
	Harga Berlaku Tahun 2011 - 2015 (persen)	III-4
Tabel 3.4.	Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Tahun 2010 – 2014 (%)	
Tabel 3.5.	Pertumbuhan Sektor dan Sub Sektor Tahun 2014	
Tabel 3.6.	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar	'
10.01 0.0.	Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (persen)	III-O
Tabel 3.7.	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar	111 0
Tabel 0.7.	Harga Konstan Tahun 2010 - 2014 (persen)	III_1∩
Tabel 3.8.	Distribusi Persentase Kelompok Sektor PDRB Kabupaten	111-10
Tabel J.G.	Temanggung Tahun 2010 – 2014	III 11
	1cmanggung 1anun 2010 – 2014	111_T T

Tabel 3.9.	PDRB perkapita Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhanny	a
	Tahun 2010 – 2014	III-11
Tabel 3.10.	Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2010–2014	III-14
Tabel 3.11.	Perkembangan Laju Inflasi Kota Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2005-2014	1
Tabel 3.12.	Kelompok Pengeluaran Tahun 2014	t
Tabel 3.13.	Nilai Investasi PMDN Kabupaten Temanggung	
1abel 3.13.	Tahun 2010-2014	III 9 <i>1</i>
Tabel 3.14.	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Temanggung	111-24
1abci 5.14.	Tahun 2010-2014	111 25
Tabel 3.15.	Ketergantungan Fiskal Kabupaten Temanggung	111-20
1abc1 5.15.	Tahun 2010-2014	III-26
Tabel 3.16.	Kapasitas Penciptaan Pendapatan Kabupaten Temanggung	
1abel 0.10.	Tahun 2010-2014	5
	III-27	
Tabel 3.17.	Kontribusi Sektor Pemerintah Kabupaten Temanggung	
14501 0.17.	Tahun 2010-2014	III-27
Tabel 3.18.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah	111 21
14501 0.10.	Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018	III-30
Tabel 3.19.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten	III 00
14501 0.10.	Temanggung Tahun 2014–2018	III-33
Tabel 3.20.	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten	m 00
14501 0.20.	Temanggung Tahun 2014–2018	III-36
Tabel 4.1.	Keterkaitan Antara Visi , Misi, Tujuan, Sasaran,	
	dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	
	Kabupaten Temanggung	IV-6
Tabel 4.2.	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas	
	RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2016	IV-17

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1	Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung	I-2
Gambar 1.2	Hubungan Rancangan Awal RKPD dengan Dokumen	
	Perencanaan Lainnya	I-5
Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2011-2015	II-15
Grafik 2.2	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Berdasarkan	
	Kelompok Kategori Lapangan Usaha Tahun 2015	
	II-19	
Grafik 2.3	Perkembangan Inflasi Kabupaten Temanggung	
Grank 2.0	Tahun 2006 – 2015	
	II-22	
Grafik 3.1		
Glalik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015	
0 01 0 0	III-2	
Grafik 3.2	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Berdasarkan	
	Kelompok Kategori Lapangan Usaha Tahun 2015	
a 01 a a		
Grafik 3.3	PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2014.	
	III-12	
Grafik 3.4	Peringkat PDRB perkapita Menurut Kecamatan di	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2014	
	III-13	
Grafik 3.5	Indeks Berantai PDRB Kabupaten Temanggung	
	Tahun 2010 – 2014	
	III-15	
Grafik 3.6	Inflasi PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2010 – 2014	
	III-19	
Grafik 3.7	Inflasi Kota Temanggung Tahun 2005-2014	
	III-20	
Grafik 3.8	Laju Inflasi Kota Temanggung Tahun 2013-2014	
	III-21	
Grafik 3.9	Perkembangan Indeks Williamson Antar Kecamatan Di	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2010 – 2014	
	III-23	

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025, dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun terakhir Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 di Tahun 2018, serta untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan
 - proses penganggaran pembangunan yang dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;

- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 10. Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas **Undang-Undang** Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

- 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019;
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 2025;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 30. 30.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 6. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
- 7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 8. Kegiatan adalah
- 9. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta sebagai pedoman dari perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2018.
- (2) RKPD Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN

Pasal 3

RKPD Tahun 2018 berisi arah kebijakan pembangunan, program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja beserta kerangka pendanaannya yang disusun berdasarkan kajian dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 17 Mei 2017

BUPATI TEMANGUNG,

M BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 17 Mei 2017

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. RKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2013–2018 dengan visi daerah "TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2018.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD 2018 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (3) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

RKPD dimaksud memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;

- d. Evaluasi kinerja tahun 2016;
- e. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi;
- f. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. Perumusan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
- i. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif;
- j. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. Forum konsultasi publik;
- 1. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;
- m. Penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018;
- n. Penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018;
- o. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
- p. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Secara lebih jelas alur penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut :

Rancangan Awal RKPD

• pendahuluan

• evaluasi pelaksanaan
RKPD tahun lalan capaian
kinerja penyelengaraan
pemerintahan

• rancangan kerangka
ekonomi daerah

• prioritas dan sasaran
pembangunaharah

• rencana program dan
kegiatan prioritas daerah

Rancangan

Renja SKPD

Rancangan RKPD

• pendahuluan

• pe

Gambar 1.1 Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019;
- 20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

- 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018:
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 2025;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Sericana Pembangunan Daerah
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

 Daerah;

 RPJPD Kab. Temanggung RPJMD Kab. Temanggung 2013-2018

 Renstra SKPD
 Kab Temanggung
 Tahun 2014-2018

 RTRW

 RENGAMBER Temanggung Tahun 2018

 Rencana Lainnya.

 Rencana Kerja
 Tahunan Desa

 Rencana Kerja
 Tahunan Desa

Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mendasarkan pada perencanaan multi sektoral di tingkat nasional yang termaktub dalam Nawacita Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014 – 2019.

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 juga disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan spasial di tingkat daerah yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 serta dokumen perencanaan multi sektoral di tingkat Provinsi Jawa Tengah antara lain Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, dan dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang yang meliputi pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, di samping itu juga memuat dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, dan memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, serta memuat permasalahan pembangunan daerah yang meliputi: permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah,serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri dari kondisi ekonomi daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan perumusan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, yang terdiri atas kebijakan umum, strategi, prioritas pembangunan daerah, prioritas pengembangan kewilayahan, tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan, indikator kinerja, target, dan satuan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat perencanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan sebuah koridor perencanaan kegiatan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung tahun 2018 mempunyai 4 (empat) fungsi utama vaitu: (1)menjadi pedoman oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah tahun 2018; (2)sebagai landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2018; (3)menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan;(4)RKPD sebagai dokumen perencanaan strategis sehingga berdampak pada indikator kinerja sosial dan indikator kinerja ekonomi di wilayah Kabupaten Temanggung.

Dokumen ini merupakan sebuah tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan sebagai panduan penyusunan rencana kerja bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung. RKPD menjadi sebuah bahan awal bagi penyusunan APBD, sehingga semangat yang diusung dalam musrenbang tahun 2017 berupa tema "Terwujudnya Perencanaan Yang Konsisten Sampai Dengan Penganggaran" dapat menjiwai penyusunan APBD 2018.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah akan memberikan gambaran tentang capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini dan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian hasil pembangunan daerah pada periode berikutnya.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Aspek Geografi

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 87.065 Ha, dengan bentangan Utara ke Selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan Timur ke Barat sepanjang 43 Km. Secara astronomis terletak antara $110^{\circ}23'-110^{\circ}46'30$ " Bujur Timur dan $7^{\circ}14'-7^{\circ}32'35$ " Lintang Selatan.

Kabupaten Temanggung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1. Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan	Bejen, Kandangan,
		Kabupaten Semarang	Gemawang, Candiroto
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang,
			Tlogomulyo, Pringsurat
3	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo,
			Wonoboyo
4	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan	Kaloran, Kandangan,
		Kabupaten Semarang	Kranggan, Pringsurat

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung 2013-2018

Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 139 lingkungan, 1.610 Rukun Warga, 5.553 Rukun Tetangga dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung.

Kecamatan Kandangan dengan luas wilayah 7.836 Ha atau sebesar 9 persen dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung merupakan wilayah terluas. Sedangkan Kecamatan Selopampang wilayah terkecil dengan luas 1.729 Ha atau hanya sebesar 1,99 persen. Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah
Kabupaten Temanggung Tahun 2015

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan	RW	RT	Luas (Ha)	%
1	Parakan	14	2	83	22	75	341	2,223	2,55
2	Kledung	13	-	35	-	44	138	3,221	3,70
3	Bansari	13	-	41	-	45	182	2,254	2,59
4	Bulu	19	-	91	-	84	297	4,304	4,94
5	Temanggung	6	19	217	108	136	575	3,339	3,96
6	Tlogomulyo	12	-	50	-	44	151	2,484	2,72
7	Tembarak	13	-	73	-	60	216	2,683	3,08
8	Selopampang	12	-	45	-	60	129	1,729	1,99
9	Kranggan	12	1	78	6	96	253	5,761	6,62
10	Pringsurat	14	-	114	-	112	360	5,728	6,58
11	Kaloran	14	-	109	-	104	410	6,392	7,34
12	Kandangan	16	-	110	-	196	364	7,836	9,00
13	K e d u	14	-	108	-	108	402	3,496	4,02
14	Ngadirejo	19	1	84	3	112	395	5,331	6,12
15	Jumo	13	-	63	-	61	269	2,932	3,37
16	Gemawang	10	-	57	-	63	326	6,711	7,71
17	Candiroto	14	-	74	-	74	270	5,994	6,88
18	Bejen	14	-	49	-	54	146	6,884	7,91
19	Tretep	11	-	29	-	27	134	3,365	3,86
20	Wonoboyo	13	-	58	-	55	195	4,398	5,05
	Jumlah	266	23	1.568	139	1.610	5.553	87.065	100

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo-ekonomis berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0%–70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Prahu (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan, tergambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.3.
Pembagian Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan
Kabupaten Temanggung Tahun 2015

No	Jenis/Kelas Kemiringan	Luas (Ha)	Persentase
1	Datar (0-2%)	968	1,17
2	Bergelombang (2–15%)	32.492	39,31
3	Curam (15-40%)	31.232	37,88

4	Sangat Curam (> 40%)	17.983	21,64
Jumlah		82.675	100

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500-1.450 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, barat sampai dengan utara.

Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian Kabupaten Temanggung

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	400 - 500	8.468	10,21	Temanggung, Jumo, Tembarak, Candiroto,
				Pringsurat, Kandangan
2	500 - 750	36.194	43,80	Parakan, Bansari, Kledung, Bulu, Kedu,
				Temanggung, Tlogomulyo, Kranggan,
				Gemawang, Jumo, Selopampang, Tembarak,
				Kaloran, Wonoboyo, Tretep, Pringsurat,
				Bejen, Candiroto, Kandangan
3	750 - 1.000	20.079	24,30	Parakan, Bansari, Kledung, Bulu, Kedu,
				Temanggung, Tlogomulyo, Kranggan,
				Gemawang, Jumo, Selopampang, Tembarak,
				Kaloran, Wonoboyo, Tretep, Pringsurat,
				Bejen, Candiroto, Kandangan, Ngadirejo
4	1.000 -	11.428	13,80	Parakan, Bansari, Kledung, Bulu, Tretep,
	1.500			Wonoboyo, Ngadirejo, Tlogomulyo, Kaloran,
				Selopampang, Candiroto
5	> 1.500	6.429	7,80	Parakan, Bulu, Tretep, Wonoboyo,
				Selopampang, Ngadirejo, Tlogomulyo
	Jumlah	82.598	100	

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Berdasarkan tabel 2.4 maka sebagian besar wilayah terletak pada ketinggian 500-750 m dpl, yaitu mencakup 43,8% dari total luas wilayah. Sedangkan luas terkecil ada pada ketinggian >1500 m dpl, hanya 7,8 persen.

Selanjutnya berdasarkan tabel-tabel tersebut diketahui adanya perbedaan luas wilayah, dari sisi administrasi, kemiringan, dan ketinggian. Perbedaan tersebut disebabkan karena metode dan pendekatan penghitungan yang berbeda.

Dilihat dari sisi geologi, dari lahan seluas 87.065 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat (32,13%),

Latosol coklat kemerahan (9,53%), Latosol merah kekuningan (35,33%), Regosol (20,14%), dan Andosol (2,60%).

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokan menjadi:
1). Batuan Andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir.

b. Aspek Demografi

Perencanaan pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi demografi yang meliputi: pertumbuhan, sebaran dan kepadatan, struktur, komposisi penduduk.

1) Pertumbuhan Penduduk

Selama periode 2012-2016, pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung fluktuatif dan belum memiliki kecenderungan menurun pada setiap tahunnya walaupun kisaran angka pertumbuhan penduduk selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sudah dibawah 1‰.

Pertumbuhan penduduk terkait tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk (terdapat faktor penambah yaitu kelahiran dan migrasi masuk/imigrasi) atau penurunan jumlah penduduk (terdapat faktor pengurang yaitu kematian/mortalitas dan migrasi keluar/emigrasi) pada suatu daerah dari waktu ke waktu.

Tabel 2.5.
Perkembangan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun					
No	Oraian	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Angka kelahiran kasar (CBR) per 1.000	7,83	7,95	9,36	9,42	n.a	
2	Angka kematian kasar (CDR) per 1.000	4,74	4,90	5,30	5,38	n.a	
3	Angka kematian bayi (IMR) per 1.000	11,50	15,41	15,00	16,82	12,7	
4	Migrasi Masuk	3.119	3.198	3.189	1.513	5.108	
5	Migrasi Keluar	3.392	2.696	3.498	1.684	4.709	
	Laju pertumbuhan penduduk (‰)	1,02	0,98	0,96	0,93	0,98*	

Sumber : BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017, * angka sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan penduduk Kabupaten Temanggung periode tahun 2012 sampai dengan 2015, dimana Angka kelahiran kasar (CBR) jika dibandingkan antara tahun 2012 sebesar 7,83 dan pada tahun 2015 mencapai 9,42 atau mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen. Untuk data tahun 2016 sementara belum dapat ditampilkan karena masih dalam proses pendataan oleh BPS Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Angka kematian kasar (CDR), jika dibandingkan antara tahun 2012 sebesar 4,74 dan pada tahun 2015 mencapai 5,38 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,64. Sedangkan Angka kematian bayi (IMR), jika dibandingkan antara tahun 2012 sebesar 14,50 dan pada tahun 2016 mencapai 12,7 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,8.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk, jika dibandingkan antara tahun 2012 sebesar 1,02‰ dan pada tahun 2016 melambat menjadi sebesar 0,98‰, namun jika dibandingkan dengan Tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi 0,05‰.

2) Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk tahun 2016 rata-rata 923 jiwa/km² dengan persebaran penduduk relatif merata. Sebaran penduduk menurut luas wilayah dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan tercantum pada tabel di bawah ini

Tabel 2.6. Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

NI-	W	Jumlah Penduduk	Luas wilayah	Kepadatan	
No	Kecamatan	(Jiwa)	(Km ²)	(Jiwa/Km²)	
1	Parakan	55.096	22.23	2.478	
2	Kledung	28.343	32.21	880	
3	Bansari	24.265	22.53	1.077	
4	Bulu	48.932	43.04	1.137	
5	Temanggung	83.920	33.39	2.513	
6	Tlogomulyo	23.177	24.84	933	
7	Tembarak	31.479	26.84	1.173	
8	Selopampang	20.426	17.29	1.181	
9	Kranggan	49.625	57.61	861	
10	Pringsurat	52.315	57.27	913	
11	Kaloran	46.746	63.92	731	
12	Kandangan	52.706	78.36	672	
13	Kedu	61.171	34.96	1.749	
14	Ngadirejo	57.115	53.31	1.071	
15	Jumo	30.503	29.32	1.040	
16	Gemawang	34.209	67.11	509	

17	Candiroto	33.481	59.94	558
18	Bejen	21.908	68.84	318
19	Tretep	21.356	33.65	634
20	Wonoboyo	26.972	43.98	613
	Jumlah	803.745	870.65	923

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel di atas, pada tahun 2016 jumlah penduduk yang terbanyak adalah di Kecamatan Temanggung sebesar 83.920 jiwa dengan kepadatan sebanyak 2.513 jiwa/Km² dan paling sedikit kecamatan Selopampang sebesar 20.426 jiwa dengan kepadatan 1.181 jiwa/Km², namun kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Bejen sebanyak 318 jiwa/Km².

3) Struktur Penduduk

Penduduk Kabupaten Temanggung mempunyai ciri-ciri demografis seperti pada umumnya penduduk Indonesia, yaitu jumlahnya besar, berusia muda, tingkat perkembangan tinggi, dan perbandingan kota dan pedesaan agak timpang.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung laki-laki 402.181 jiwa (50,039%) dan perempuan 401.564 jiwa (49,961%). Karakteristik penduduk Kabupaten Temanggung menurut jenis kelamin ditandai dengan angka sex rasio yang berada diatas 100 sepanjang tahun 2012 – 2016. Karakteristik ini berbeda dengan karakteristik penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dimana lebih banyak penduduk perempuan dibanding penduduk laki-laki dengan sex rasio pada tahun 2016 mencapai 99,51.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Temanggung tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Nic	N. T. I.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	Caliaila
No Tahun	in (BPS) (BPS)		(BPS)	(SIAK)	Selisih	
1	2012	363.364	361.446	724.810	821.517	96.707
2	2013	366.897	365.014	731.911	746.313	14.402
3	2014	370.398	368.517	738.915	731.061	7.854
4	2015	373.819	371.959	745.778	788.264	42.486
5	2016	377.168	375.341	752.509	803.745	51.236

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016 dan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Keterangan : BPS data pertengahan tahun, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil data akhir

Ada perbedaan jumlah penduduk antara BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan metode perhitungan yang berbeda, **BPS** menggunakan data sensus penduduk dengan obyek pendataan penduduk pertengahan tahun yang berdomisili di Kabupaten Temanggung, sedangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil penghitungan berdasarkan penduduk yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	0 - 4	55.979	6,96
2	5 - 9	62.720	7,80
3	10 - 14	58.205	7,24
4	15 - 19	59.844	7,45
5	20 - 24	62.693	7,80
6	25 - 29	60.232	7,49
7	30 - 34	60.923	7,58
8	35 - 39	62.856	7,82
9	40 - 44	61.411	7,64
10	45 - 49	60.439	7,52
11	50 - 54	55.619	6,92
12	55 - 59	45.967	5,72
13	60 - 64	35.906	4,47
14	65 - 69	21.481	2,67
15	70 - 74	15.842	1,97
16	≥ 75	23.628	2,94
	Jumlah	803.745	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel di atas, kelompok umur terbesar berada 35-39 Tahun dengan persentase sebesar 7,82 persen, sedangkan yang terkecil adalah 70-74 tahun dengan persentase sebesar 1,97 persen.

4) Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 penduduk yang belum tamat SD sejumlah 173.514 orang, tamat SD/sederajat sejumlah 191.851 orang, tamat SLTP/sederajat sejumlah 108.315 orang, tamat SLTA/sederajat sejumlah 79.185 orang, tamat diploma I/II/III sejumlah 10.032 orang serta tamat DIV/Sarjana (S1) sejumlah 15.964 orang. Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung menurut tingkat pendidikan per kecamatan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9.

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

Kabupaten Temanggung, Tanun 2016									
			Tingkat Pendidikan						
No	Kecamatan	D IV/ Sarjana	DI/DII/ DIII	SLTA	SLTP	SD	Tidak/ belum tamat SD	Tidak/ Belum sekolah	Jumlah
1	Parakan	1.673	1.025	7.493	6.546	9.854	10.976	17.529	55.096
2	Kledung	149	114	1.447	3.295	7.365	5.286	10.687	28.343
3	Bansari	284	191	1.542	3.138	5.175	10.525	3.410	24.265
4	Bulu	776	484	3.934	5.580	10.526	17.922	9.710	48.932
5	Temanggung	5.107	2.457	16.790	11.549	18.412	13.597	16.008	83.920
6	Tlogomulyo	204	139	1.500	3.001	5.801	5.644	6.888	23.177
7	Tembarak	482	308	3.115	4.526	7.027	5.924	10.097	31.479
8	Selopampang	312	198	1.912	2.670	5.826	4.227	5.281	20.426
9	Kranggan	1.008	577	6.094	8.151	9.310	10.202	14.283	49.625
10	Pringsurat	713	444	5.344	8.202	13.143	5.220	19.249	52.315
11	Kaloran	564	436	4.104	7.088	11.056	6.142	17.356	46.746
12	Kandangan	724	499	4.038	6.750	11.073	8.004	21.618	52.706

13	Kedu	1.281	828	6.005	7.247	14.004	17.641	14.165	61.171
14	Ngadirejo	1.005	788	5.770	8.884	16.927	11.206	12.535	57.115
15	Jumo	452	336	2.572	4.200	7.467	6.543	8.933	30.503
16	Gemawang	205	190	1.380	3.785	8.688	8.879	11.082	34.209
17	Candiroto	541	519	2.716	3.999	8.855	11.153	5.698	33.481
18	Bejen	205	202	1.533	3.421	6.653	3.415	6.479	21.908
19	Tretep	86	88	498	2.563	6.219	5.693	6.209	21.356
20	Wonoboyo	193	209	1.398	3.720	8.470	5.315	7.667	26.972
JUM	LAH	15.964	10.032	79.185	108.315	191.851	173.514	224.884	803.745
Pers	entase (%)	1,9	1,25	9,85	13,48	23,83	21,59	27,98	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel 2.9 Kecamatan Temanggung memiliki penduduk yang telah menempuh perguruan tinggi dengan kualifikasi sarjana sebanyak 5.107 orang. Sedangkan terendah menempuh perguruan tinggi dengan kualifikasi sarjana adalah Kecamatan Tretep sebanyak 86 orang.

Secara umum mayoritas penduduk Temanggung masih setara tingkat pendidikan SD sebanyak 23,83% dan SMP sebanyak 13,48%.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indexs* (HDI). Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Tabel 2.10.
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung
Tahun 2012-2016

No	Variabel	Tahun								
NO	variabei	2012	2013	2014	2015	2016				
INI	DEKS PEMBANGUNAN	64.01	65,52	65.97	67,07	n.a.				
MA	NUSIA (IPM)	04,01	05,52	03,97	67,07					
1.	Angka Harapan	75,26	75,31	75,34	75,35	n.a.				
1.	Hidup /AHH (Tahun)	75,20								
	Harapan Lama	11.05	11.39	11.69	11.89	n.a.				
2.	Sekolah (tahun)	11,05	11,39	11,09	11,69					
۷.	Rata-rata lama	6.08	6,13	6,18	6.52	n.a.				
	sekolah (tahun)	0,08	0,13	0,18	0,52					
3.	Pengeluaran riil per	7.952.000	8.042.000	8.062.000	8.182.000	n.a.				
٥.	kapita (Rp)	7.952.000	0.042.000	0.002.000	0.102.000					

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

IPM Kabupaten Temanggung pada tahun 2013 dengan metode lama berada pada peringkat ke-9, namun dengan metode baru menjadi peringkat ke-26. Dengan kata lain, dengan metode baru, peringkat IPM Kabupaten Temanggung turun drastis sebanyak 17 peringkat, dan merupakan penurunan paling drastis di antara kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dimensi pendidikan di Kabupaten Temanggung masih cukup lemah. Hanya dengan mengganti satu variabel pendidikan saja, IPM Kabupaten Temanggung menjadi turun drastis. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Temanggung.

Sepanjang lima tahun terakhir, Kabupaten Temanggung mengalami kemajuan pembangunan sebagaimana terlihat dari nilai IPM yang semakin meningkat. Pada tahun 2011, IPM Kabupaten Temanggung adalah sebesar 64,14 kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 67,07 pada tahun 2015. Jika dibandingkan antar kabupaten/kota se Jawa Tengah, maka pada tahun 2015, IPM Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-26 diantara 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Sepanjang tahun 2011-2015, IPM Kabupaten temanggung masih berada dibawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kamajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya.

Jika dibandingkan dalam regional eks karisidenan Kedu, IPM Kabupaten Temanggung juga terlihat cukup tertinggal, yaitu hanya pada peringkat 4 pada tahun 2015 dibawah Kota Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, lebih tinggi dibanding Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo. Artinya dalam regional Karisidenan Kedu, pembangunan di Kabupaten Temanggung juga tertinggal dibanding dengan kabupaten/kota lain dalam regional tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.11.

Tabel 2.11.

IPM dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota
di Eks Karisidenan Kedu, Tahun 2011 – 2015

Vah /Vata	IPM					Peringkat IPM				
Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Kebumen	64.05	64.47	64.86	65.67	66.87	5	5	5	5	5

Purworejo	69.11	69.40	69.77	70.12	70.37	2	2	2	2	2
Wonosobo	63.07	64.18	64.57	65.20	65.70	6	6	6	6	6
Magelang	64.16	64.75	65.86	66.35	67.13	3	4	3	3	3
Temanggung	64.14	64.91	65.52	65.97	67.07	4	3	4	4	4
Kota Magelang	74.47	75.00	75.29	75.79	76.39	1	1	1	1	1

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari : (1)Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2)Kesejahteraan sosial, serta (3)Seni budaya dan olah raga.

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1) Pertumbuhan PDRB/Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode sebelumnya. Untuk waktu mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Di bawah ini akan diperlihatkan besarnya PDRB dan laju pertumbuhan Kabupaten Temanggung baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 2.12.

PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung
Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) dan Atas Dasar Harga Konstan
(adhk), Tahun 2010-2015

Tahun	PDRB	adhb	PDRB adhk			
Tanun	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan %	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan %		
2010	9.710.199,27	-	9.710.199,27	-		
2011	10.870.286,37	11,95	10.301.569,79	6,09		
2012	11.841.494,84	8,93	10.740.983,02	4,27		
2013	13.088.402,25	10,53	11.299.342,97	5,20		
2014	14.589.940,04	11,47	11.870.605,08	5,06		
2015	16.092.983,81	10,30	12.484.288,20	5,17		

 $Sumber: BPS\ Kabupaten\ Temanggung\ Tahun\ 2016$

Pada tahun 2015 besaran PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Temanggung secara agregat mencapai 16.092.983,81 juta rupiah. Dengan angka sebesar itu menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan PDRB pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 10,30 persen. Pertumbuhan PDRB adhb sebesar 10,30 persen tersebut sebenarnya belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (inflasi).

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,44 persen dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Nasional yang tumbuh sebesar 4,79 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13. Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012 – 2016

m 1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)						
Tahun	Temanggung Jawa Tengah		Nasional				
2012	4,27	5,34	6,03				
2013	5,20	5,11	5,56				
2014	5,06	5,28	5,02				
2015	5,17	5,44	4,79				
2016	5,06*	n.a.	n.a.				

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016, * angka sementara

Pada tahun 2016 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung diperkirakan mencapai 5,06 persen lebih lambat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2015 yang mencapai 5,17 persen.

Pada tabel 2.14 di bawah ini akan diperlihatkan komposisi sektor ekonomi pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.14. Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2010-2015 (persen)

	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	26,71	27,75	26,93	26,57	25,58	25,75
В	Pertembangan & Penggalian	1,03	0,93	0,83	0,78	0,83	0,88
C	Industri Pengolahan	25,27	24,90	25,13	25,50	26,47	26,55
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,09	0,08	0,09	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Penge Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	4,49	4,24	4,47	4,37	4,48	4,64
G	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda	21,81	21,69	21,20	20,99	20,72	20,33
Н	Transportasi & Pergudangan	4,31	4,03	4,11	4,18	4,17	4,26
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,62	1,54	1,53	1,51	1,47	1,53
J	Informasi & Komunikasi	1,40	1,38	1,41	1,39	1,38	1,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,86	2,86	3,03	3,07	3,14	3,19
L	Real Estat	0,82	0,78	0,75	0,75	0,75	0,75
$_{M,N}$	Jasa Perusahaan	0,28	0,28	0,29	0,32	0,32	0,33
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,30	3,12	3,14	3,04	2,93	2,90
P	Jasa Pendidikan	2,99	3,49	4,22	4,53	4,63	4,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,93	1,02	1,02	1,08	1,08
R,S,T,U	J Jasa Lainnya	2,04	1,90	1,76	1,82	1,90	1,85
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2014 sedikit bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan tahun 2014 dan 2015 yang lebih besar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan walaupun menyerap tenaga kerja terbanyak 165.227 jiwa atau sekitar 39,04 persen dari total penduduk Kabupaten Temanggung yang bekerja (Sakernas, Agustus 2015) dan luas lahan pertanian yang mencapai 68.128 ha ternyata mulai tahun 2014 nilai tambah bruto yang dicapai lebih rendah dari lapangan usaha Industri Pengolahan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 114.148 jwa atau sekitar 26,97 persen dari total penduduk Kabupaten Temanggung yang bekerja.

Kontribusi kelompok kategori lapangan usaha primer (lapangan usaha kategori A dan B) pada tahun 2015 yaitu kelompok lapangan usaha yang mengandalkan sumber daya alam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung sebesar 26,63 persen. Sementara itu kontribusi kategori lapangan usaha sekunder (lapangan usaha kategori C, D, E dan F) yaitu kelompok lapangan usaha yang memproduksi barang memberi andil sebesar 31,34 Persen. Sedangkan kontribusi di kelompok kategori lapangan usaha tersier (lapangan usaha kategori G sampai dengan kategori U) yaitu lapangan usaha yang bergerak di bidang produksi jasa, memberikan kontribusi sebesar 42,03 persen.

Penyumbang terbesar kelompok lapangan usaha tersier adalah lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta lapangan usaha kategori informasi dan komunikasi.

2) PDRB Perkapita

Secara konsepsional PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan ratarata pendapatan masyarakat secara riil. Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB Perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Perkembangannya tercantum pada tabel 2.15.

Tabel 2.15.
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Temanggung, Tahun 2010-2015

	Atas Dasar H	larga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010		
Tahun -	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2010	13.532.737,50	-	13.532.737,50	-	
2011	15.010.703,81	10,92	14.225.366,99	5,12	
2012	16.205.242,55	7,96	14.699.177,55	3,33	
2013	17.755.556,92	9,57	15.328.542,28	4,28	
2014	19.745.085,75	11,21	16.064.912,85	4,80	
2015	21.578.785,93	9,29	16.739.952,37	4,20	

 $Sumber: BPS\ Kabupaten\ Temanggung\ Tahun\ 2016$

Jika memperhatikan tabel dan grafik perkembangan PDRB perkapita dapat diketahui bahwa nilai PDRB perkapita selalu naik yang menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang

dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar Rp. 21.578.785,93 atau naik 9,29 persen dari tahun sebelumnya. Selama periode 2010–2015 telah terjadi peningkatan PDRB perkapita sebesar 59,46 persen yaitu dari Rp. 13.532.737,50 pada tahun 2010 menjadi Rp. 21.578.785,93 pada tahun 2015.

3) Pengeluaran Riil Perkapita

Tabel. 2.16.
Pengeluaran riil perkapita
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Variabel		Tahun					
variabei	2012	2013	2014	2015	2016		
Pengeluaran riil per kapita (Rp)	7.952.000	8.042.000	8.062.000	8.369.000	n.a.		

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Secara ekonomi dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung semakin meningkat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang ditunjukkan dengan kenaikan pengeluaran rill perkapita. Pengeluaran rill perkapita masyarakat di Kabupaten Temanggung pada tahun 2012 sebesar Rp 7.952.000,- meningkat menjadi Rp. 8.369.000,- pada tahun 2015. Pengeluaran rill perkapita memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk dapat dikatakan bisa memenuhi standar hidup layak.

4) Struktur Ekonomi Daerah

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi kategori lapangan usaha PDRB secara keseluruhan. Distribusi kategori lapangan usaha ini juga menunjukkan komposisi atau susunan kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian. Kategori yang dominan atau diandalkan mempunyai nilai persentase yang paling besar dalam struktur tersebut, dan dapat menjadikan ciri khas perekonomian di wilayah yang bersangkutan.

Angka agregat PDRB terbentuk dari berbagai kegiatan

ekonomi, mengikuti perjalanan waktu dan adanya perubahan faktor internal maupun eksternal. Perubahan teknologi, keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, perubahan orientasi kebijakan pemerintah maupun perubahan ekonomi nasional dan internasional akan sangat berpengaruh terhadap kinerja tiap kategori ekonomi. Akibatnya, perkembangan output tiap kategori akan berbeda satu dengan sehingga distribusi kategori yang lainnya ekonomi dalam komposisi PDRB juga mengalami pergeseran atau perubahan.

Perekonomian Kabupaten Temanggung yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku dengan metode baru *System of National Accounts* 2008 (SNA2008) pada tahun 2015 sebesar Rp. 16.092.983,81 juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp. 12.484.288,20 juta. Tiga lapangan usaha utama yaitu kategori Industri Pengolahan, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kategori penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Temanggung dengan kontribusi sebesar 72,63 persen.

Lapangan usaha kategori Industri Pengolahan memberikan nilai tambah bruto sebesar Rp. 4.272.806,45 juta atau sebesar 26,55 persen. Lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai tambah bruto sebesar Rp. 4.143.297,64 juta atau sebesar 25,75 persen dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor dengan nilai tambah bruto Rp. 3.272.212,65 juta mempunyai peranan sebesar 20,33 persen. Lapangan usaha dengan kontribusi paling kecil yaitu kategori Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai tambah bruto sebesar Rp. 11.074,59 juta atau sebesar 0,07 persen.

Dari tabel 2.17 dapat diketahui konstribusi kelompok kategori lapangan usaha di Kabupaten Temanggung, bahwa kelompok kategori lapangan usaha tersier dalam enam tahun terakhir mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 memegang peranan yang paling besar dalam perekonomian Kabupaten Temanggung. Bila dilihat distribusi persentase PDRB Kabupaten Temanggung mulai tahun 2014 kelompok lapangan usaha

sekunder mengalami pergeseran dengan kelompok lapangan usaha pimer.

Tabel 2.17.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Temanggung
Menurut Kelompok Lapangan Usaha, Tahun 2010-2015
(persen)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I Atas Dasar Harga Berlaku						
Lapangan Usaha Primer	27,74	28,68	27,76	27,35	26,41	26,63
Lapangan Usaha Sekunder	29,96	29,32	29,78	30,03	31,10	31,34
Lapangan Usaha Tersier	42,30	42,00	42,46	42,62	42,49	42,03
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II. Atas Dasar Harga Konstan 2010						
Lapangan Usaha Primer	27,74	28,02	27,10	26,23	24,54	24,42
Lapangan Usaha Sekunder	29,96	28,98	29,43	29,65	30,35	30,59
Lapangan Usaha Tersier	42,30	43,00	43,47	44,12	45,11	44,99
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

 $Sumber: BPS\ Kabupaten\ Temanggung\ Tahun\ 2016$

Pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung untuk tahun 2015 sebesar 5,17 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang tumbuh sebesar 5,06 persen.

Dari tabel di atas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan tertinggi menurut harga berlaku terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 11,95 persen, sedangkan pertumbuhan terendah 8,93 persen terjadi pada tahun 2012. Demikian pula untuk PDRB atas dasar harga konstan 2010

pertumbuhan ekonomi tertinggi juga terjadi pada tahun 2011 sebesar 6,09 persen dan terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 4,27 persen.

5) Laju Inflasi

Laju inflasi menunjukkan perkembangan indeks harga konsumen atau mencerminkan kestabilan nilai tukar rupiah. Perkembangan inflasi di Kabupaten Temanggung sangat dipengaruhi berbagai faktor eksternal di luar kendali Pemerintah Daerah. Perkembangan harga barang dan jasa di Temanggung tidak terlepas dari kondisi perkembangan harga di tingkat nasional maupun regional.

Tabel 2.18.

Perkembangan Laju Inflasi

Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Tahun 2006-2016

No	Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2006	7,73	6,53	6,60
2	2007	6,89	6,24	6,59
3	2008	12,36	9,55	11,06
4	2009	4,16	3,32	2,78
5	2010	7,35	6,88	6,96
6	2011	2,42	2,68	3,79
7	2012	4,73	4,24	4,30
8	2013	7,01	7,99	8,33
9	2014	7,81	8,22	8,36
10	2015	2,74	2,73	3,35
11	2016	2,42	2,36	3,02

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Jika diamati angka inflasi Kota Temanggung selama kurun waktu 11 tahun terakhir yaitu tahun 2006-2016 dalam perkembangannya ternyata cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun

kenaikan biaya untuk pekerja.

Pada tahun 2008 angka inflasi Kota Temanggung mencapai dua digit yaitu 12,36 persen. Pemicu terjadinya inflasi yang cukup tinggi di tahun 2008 tersebut lebih banyak dari sisi kenaikan biaya produksi (cost push inflations). Meningkatnya harga minyak dunia yang akhirnya memaksa Pemerintah untuk menaikkan harga BBM memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap tingkat inflasi. Selain itu, meningkatnya harga komoditas pangan dunia seperti kebutuhan bahan pangan impor jenis kedelai, jagung dan terigu sejak akhir tahun 2007 yang otomatis meningkatkan biaya produksi perusahaan memberikan angka inflasi yang sangat besar. Demikian juga dengan adanya kelangkaan sumber energi baik gas maupun minyak di berbagai daerah serta kekurangan suplai listrik yang mengharuskan terjadinya pemadaman juga berperan meningkatkan inflasi karena mendorong pembengkakan biaya produksi. Inflasi terendah Kota Temanggung selama 10 tahun terakhir terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 2,42 persen. Hal ini disebabkan oleh apresiasi dan penguatan nilai tukar rupiah yang menjadi penyebab daya saing ekspor melemah serta penundaan peningkatan harga pokok BBM bersubsidi.

6) Jumlah Rumah Tangga Miskin

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tahun 2009-2014 mengalami penurunan. Jumlah rumah tangga miskin yang dipakai sebagai data dasar RPJMD 2013-2018 adalah data PPLS Tahun 2011 sejumlah 34.962 rumah tangga (17,27 persen), perkembangan pada tahun 2014 menjadi 29.376 (14,25 persen) rumah tangga, sehingga terjadi penurunan 3,02 persen. Angka tersebut diperoleh dari hasil validasi data PPLS Tahun 2011 oleh Bapermades. Pada tahun 2015 dilakukan validasi dan verifikasi data PBIJKN (Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan desa/kelurahan. (data PBDT 2015)

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Secara jelas diuraikan sebagai berikut:

1) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan tolok ukur capaian kinerja pendidikan dalam skala makro yang mendasarkan pada kemampuan membaca dan menulis penduduk yang dihitung dari persentase populasi dewasa yang bisa menulis dan membaca.

Melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Melek huruf juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain. Melek huruf merupakan prasyarat utama yang memungkinkan seseorang mengakses informasi dan pengetahuan serta memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik.

Capaian angka melek huruf di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2016 capaian angka melek huruf di Kabupaten Temanggung sebesar 98,37 persen. Menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Temanggung mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Sisanya penduduk yang belum melek huruf sebesar 1,63 persen, yaitu sebagian besar penduduk berusia lanjut usia yang tidak memungkinkan tersentuh dengan program pengentasan melek huruf karena faktor usia.

Tabel 2.19.
Angka Melek Huruf
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Uraian		Tahun							
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016				
Angka Melek Huruf	95,97	95,99	95,99	98,34	98,37*				

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016 dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017, *angka sementara

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Masih menjadi kewajiban pemerintah daerah bersama masyarakat untuk lebih mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui peningkatan capaian angka rata-rata lama sekolah.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung Tahun 2016 mencapai 6,54 yang artinya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Temanggung mencapai SMP kelas satu atau masih dibawah target wajib belajar pendidikan dasar. Dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 6,52 maka ada peningkatan sebesar 0,02 pada tahun 2016.

Tabel 2.20.

Angka Rata-rata Lama Sekolah

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

T			Tahun		
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Rata-rata Lama Sekolah	6,08	6,13	6,18	6,52	6,54*

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016 dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017, *angka sementara

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-18 tahun. APK merupakan daya serap penduduk usia sekolah di tiap jenjang pendidikan.

Selama lima tahun terakhir APK tingkat SD/Sederajat lebih tinggi dibandingkan APK tingkat SMP/Sederajat. Berdasarkan APK diketahui bahwa pada tingkat SD/Sederajat jumlah siswanya lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal ini menunjukkan partisipasi yang paling baik terdapat di tingkat SD/Sederajat. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar tingkat pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NI -	Innia Calculate			Tahun		
No	Jenis Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	SD/Sederajat	103,51	105,68	103,80	103,86	109,43
2.	SMP/Sederajat	96,00	95,11	96,07	96,11	97,17

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017, *angka sementara

APK SD/sederajat mengalami kenaikan 5,92 persen dari tahun 2012 yaitu 103,51 persen menjadi 109,43 persen pada tahun 2016.

APK SMP/sederajat mengalami kenaikan 1,17 persen dari tahun 2012 yaitu 96 persen menjadi 97,17 persen pada tahun 2016.

4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang terdaftar di sekolah pada tingkat pendidikan tertentu (SD/SMP) dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-15 tahun (usia pendidikan dasar/usia pendidikan menengah pertama) dikalikan 100%. APM merupakan daya serap penduduk usia sekolah di tiap jenjang pendidikan. Perkembangan APM selama lima tahun terakhir pada setiap tingkatan pendidikan tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 2.22.
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Temanggung
Tahun 2012-2016

NO	Jenis Sekolah			Tahun		
NO	Jenis Sekolan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD/Sederajat	95,40	95,42	95,45	95,49	96,59
2.	SMP/Sederajat	83,63	83,64	83,69	83,74	84,01

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

APM baik itu di tingkat SD maupun SMP selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan partisipasi penduduk untuk menempuh pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Angka APM tingkat SD/sederajat 96,59% lebih tinggi dari angka APM tingkat SMP/Sederajat sebesar 84,01%. Hal ini menggambarkan tingkat partisipasi sekolah SMP/Sederajat lebih sedikit, salah satu penyebabnya adalah adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya (Anak Usia Sekolah Yang Tidak Sekolah/AUSTS) dan ada anak sekolah yang memilih untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi di luar Kabupaten Temanggung.

5) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun per jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikali 1.000.

Tabel 2.23.
Angka Kematian Bayi
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Uraian	Tahun						
NO	Oralan	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah kematian bayi (jiwa)	151	173	167	183	136		
2.	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	12.371	11.228	11.010	10.935	10.733		
3.	Angka kematian bayi	12,21	15,41	15,17	16,8	12,7		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Angka kematian bayi pada tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif sebagaimana tersebut pada tabel 2.23. Pada tahun 2016 angka ini mengalami penurunan 4,1 ‰ dari tahun sebelumnya, yaitu dari 16,82 ‰ menjadi 12,67 ‰. Hal ini menunjukkan bahwa programprogram untuk mengurangi angka kematian neo-natal senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anakanak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil, bayi.

6) Angka Harapan Hidup

Pada tahun 2016 angka harapan hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung telah mencapai 75,37 tahun. AHH yaitu rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang sejak lahir hingga akhir hayat. Bila dibandingkan dengan AHH tahun 2011 yang angkanya 75,22 tahun maka terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan.

Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Tabel 2.24.
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Urajan			Tahun		
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*
Angka Harapan Hidup	75,26	75,31	75,34	75,35	75,37

 $Sumber: BPS\ Kabupaten\ Temanggung\ Tahun\ 2016,\ Dinas\ Kesehatan\ Tahun\ 2017,$

7) Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak dilihat dari berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya.

^{*}angka sementara

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun.

Gizi buruk pada balita dapat dilihat melalui kegiatan pemantauan status gizi (PSG). Setiap tahun dilakukan kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan mengambil sejumlah sampel balita di tiap-tiap wilayah Puskesmas untuk mengetahui proporsi status gizi balita di Kabupaten Temanggung mulai dari gizi lebih sampai gizi buruk sebagai salah satu upaya untuk memantau tumbuh kembang balita. Hasil kegiatan PSG yang ditampilkan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 terlihat proporsi status gizi buruk berdasarkan BB/U tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 0,85 persen dari tahun 2015 yang sebesar 0,75 persen. Persentase gizi balita dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25. Kondisi Status Gizi Balita Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Urajan		Tahun					
INO	Oraian	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Persentase balita gizi buruk	1,30	0,93	2,00	0,75	0,85		
2.	Persentase balita gizi kurang	14,40	13,47	14,00	6,56	5,81		
3.	Persentase balita gizi baik	83,00	83,75	82,20	89,9	92,21		
4.	Persentase balita gizi lebih	1,30	1,85	1,80	2,79	1,98		

 $Sumber: Dinas\ Kesehatan\ Kabupaten\ Temanggung\ Tahun\ 2017$

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk cenderung fluktuatif, angka ini selalu ada di bawah 10%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 5%.

Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya diare, cacingan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita.

Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan

penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.

8) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil seperti gerakan sayang ibu, pemberian makanan tambahan ibu hamil, pelayanan kesehatan setelah melahirkan, desa siaga, dan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi.

Tabel 2.26.

Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun					
Oraian	2012	2013	2014	2015	2016	
Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	88,92	62,34	127,16	27,00	93,17	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa angka kematian ibu selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, kadang jumlahnya menurun dan bertambah secara drastis. Tahun 2014 naik 127,16 %, tahun 2015 turun 27 %, tahun 2016 turun 93,17 %.

9) Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian balita selama lima tahun masih fluktuatif, dari 13,00 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 14,26 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Faktor penyebab kematian balita antara lain karena penyakit infeksi dan juga dipengaruhi kematian bayi.

Tabel 2.27. Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Uraian		Tahun						
		2013	2014	2015	2016			
Angka Kematian Balita Per 1.000 KH	13,00	16,74	20,98	19,00	14,26			

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

10)Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum pangan dan non pangan esensial. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin namun perlu memperhatikan pula tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 2.28.

Tingkat Kemiskinan

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Liusiana	Tahun						
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*		
Tingkat kemiskinan (%)	12,32	12,42	11,55	11,76	11,55		

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2017, *angka sementara

Tingkat kemiskinan penduduk (makro) Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun cenderung menurun dari angka 12,32 di Tahun 2012 menjadi 11,55 di Tahun 2016 walau sempat meningkat di Tahun 2013.

11)Persentase Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Grafik 2.1.
Persentase Penduduk Bekerja
Kabupaten Temanggung, Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Persentase penduduk yang bekerja cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan banyak penduduk yang bekerja sebagai karyawan tidak tetap, pekerja musiman dan faktor migrasi penduduk.

12)Perbandingan TPAK, TPT, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk

Selain rasio jumlah penduduk yang bekerja juga perlu diukur tingkat pengangguran terbuka sebagai proporsi pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja dan kemudian disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan faktor jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.29.

Tabel 2.29.

TPAK, TPT, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1.	2012	4,27	1,02	77,33	3,39
2.	2013	5,20	0,98	76,70	4,67
3.	2014	5,60	0,96	76,73	3,19
4.	2015	5,17	0,93	75,47	1,50
5.	2016	5,06*	0,98*	n.a	2,22*

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2017, *Angka Sementara

Pada tabel diatas terlihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif, angka laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami penurunan, TPAK cenderung fluktuatif dan TPT cenderung mengalami penurunan. TPT menunjukkan jumlah pengangguran nilainya kecil/hanya sedikit, hal ini karena memang sebagian besar penduduk adalah penduduk yang bekerja, walaupun pada

kenyataannya banyak yang bekerja sebagai pekerja tidak tetap/hanya kadang-kadang bekerja/bekerja paruh waktu/pekerja musiman. Dengan perkembangan kebutuhan tenaga kerja saat ini maka salah satu fokus kebijakan dalam pembangunan pendidikan di daerah saat ini adalah melalui pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu.

c. Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga

Fokus Seni, Budaya dan Olahraga di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu urusan kebudayaan, serta urusan pemuda dan olahraga. Secara jelas digambarkan dalam uraian berikut ini.

1) Jumlah grup dan gedung kesenian

Kelompok kesenian di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 sejumlah 827 kelompok yang tersebar di 20 kecamatan dan sudah teregistrasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kelompok kesenian yang ada yang sudah terintegrasi dengan 64 jenis kesenian yang ada di Kabupaten Temanggung, kesenian yang paling berkembang dan mendominasi adalah grup kesenian kuda lumping.

Seni budaya di Kabupaten Temanggung termasuk berkembang dan beranekaragam. Dalam rangka melestarikan seni dan budaya maka di Kabupaten Temanggung pada tiap tahun menyelenggarakan festival seni dan budaya masyarakat.

Perkembangan jumlah grup kesenian dan gedung kesenian selama lima tahun terakhir tersebut pada tabel 2.30.

Tabel 2.30.

Jumlah Grup dan Gedung Kesenian

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Kriteria			Tahun	hun				
110	Mittia	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Jumlah grup kesenian	1.067	1.067	1.076	1.165	827			
2	Jumlah gedung kesenian	0	1	1	1	1			
3	Jumlah penduduk	821.517	746.313	731.061	788.264	803.745			
4	Rasio grup kesenian (per 10.000 penduduk)	12,99	14,29	14,72	14,78	10,29			

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2017

2) Jumlah klub dan gedung olahraga

Gedung yang disediakan pemerintah secara fisik sudah cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan olahraga tingkat kabupaten, selain itu juga didukung dengan tempat-tempat pertemuan di tingkat desa/kelurahan yang sebagian besar juga digunakan untuk kegiatan olahraga tingkat desa/kelurahan. Gambaran jumlah klub olahraga dan gedung olahraga dapat dilihat pada tabel 2.31.

Tabel 2.31.

Jumlah Klub dan Gedung Olahraga

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Capaian Pembangunan			Tahun						
110		2012	2013	2014	2015	2016				
1	Jumlah klub olahraga	807	1.024	1.024	1.091	1.213				
2	Jumlah gedung olahraga	2	2	2	2	2				
3	Jumlah penduduk	821.517	746.313	731.061	788.264	803.745				
4	Rasio klub olahraga (per 10.000 penduduk)	9,82	13,72	14,01	13,84	15,09				

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan pengertian urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

1) Urusan Pendidikan

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah urusan pendidikan diantaranya: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, Rasio guru dan murid, kondisi ruang kelas, Angka Putus Sekolah (APtS), Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, dan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV, S2 atau lebih.

a) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah PAUD di Kabupaten Temanggung pada tahun 2012 mencapai 67,84 dan tahun 2016 meningkat menjadi 76,38 hal ini karena adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak sejak dini sehingga hampir semua desa/kelurahan mempunyai PAUD baik yang dikelola oleh desa maupun perorangan.

APS pedidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (penduduk usia 7–12 tahun dan penduduk usia 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dibanding jumlah penduduk usia pendidikan dasar dikali 1.000.

Perkembangan APS masih fluktuatif, kemungkinan karena faktor ekonomi, biaya pendidikan dan biaya transportasi menuju sekolah dan biaya keperluan sekolah lainnya.

Tabel 2.32. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Kriteria			Tahun						
NO	Milleria	2012	2013	2014	2015	2016				
	PAUD									
	APS PAUD	67,84	76,15	76,15	76,18	76,38				
	Pendidikan Dasar									
1.	APS 7 - 12 tahun	996,5	987,91	994,25	999,31	996,04				
2.	APS 13 - 15 tahun	957,4	873,60	993,25	993,34	998,02				

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel di atas menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Temanggung yaitu APS pendidikan dasar 7-12 tahun sampai tahun 2016 telah mencapai 996,04 dan APS pendidikan dasar 13-15 tahun telah mencapai 998,02. Tampak bahwa lebih tinggi APS pendidikan dasar 7-12 tahun.

Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

b) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Temanggung berdasarkan jenjang yang terdiri dari SD/MI, dan SMP/MTs.

Tabel 2.33.

Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	I i D 1111	Tahun					
NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	
	PAUD						
	Jumlah sekolah PAUD	131	152	152	271	813	
	Jumlah Siswa PAUD	4.093	4.912	7.439	5.472	30.551	
	Rasio per 10.000	320,06	309,45	204,33	495,25	266,11	
	SD/MI						
1.1.	Jumlah sekolah negeri	413	411	411	411	411	
1.1.	Installation of the second	411	400	400	400	400	
1	Jumlah SD negeri	411	409	409	409	409	
1.1.			0		0		
2	Jumlah MI negeri	2	2	2	2	2	
1.2.	Jumlah sekolah swasta	158	163	164	165	166	
1.2.							
1	Jumlah SD swasta	23	23	23	23	23	
1.2.							
2	Jumlah MI swasta	135	140	141	142	143	
1.3.	Jumlah sekolah SD/MI	571	574	575	576	577	
1.4.	Jumlah penduduk usia 7-				00.050	00 450	
	12 tahun	74.343	71.530	72.848	69.970	69.459	
1.5.	Rasio per 10.000	76,81	80,25	78,93	86,61	83,07	
	Rasio ideal per 10.000			52		!	
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah sekolah negeri	43	44	44	44	44	
2.1.							
1	Jumlah SMP negeri	41	42	42	42	42	
2.1.							
2	Jumlah MTs negeri	2	2	2	2	2	
2.2.	Jumlah sekolah swasta	57	61	61	62	63	
2.2.							
1	Jumlah SMP swasta	28	30	30	31	32	
2.2.							
2	Jumlah MTs swasta	29	31	31	31	31	
2.3.	Jumlah sekolah SMP/MTs	100	105	105	106	107	
2.4.	Jumlah penduduk usia 13-						
	15 tahun	36.972	35.740	36.005	34.381	34.318	
2.5.	Rasio per 10.000	27,05	29,38	29,16	30,83	31,18	
2.0.	Rasio ideal per 10.000	21,00	20,00	$\frac{25,10}{52}$	00,00	01,10	
	Sumber & Dings Pendidikan Pennuda dan Olahraga Kahunatan Temanggung Tahun 2017						

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Ketersediaan sekolah SD/MI hampir menyeluruh ada di semua desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung, sehingga dari segi akses dan transportasi semua penduduk usia 7-12 tahun sudah tidak merasakan kesulitan untuk menempuh pendidikan di SD/MI. Rasio 83,07 menunjukkan bahwa ketersediaan SD/MI di Kabupaten Temanggung cukup memadai.

Pada tahun 2016 rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs di Kabupaten Temanggung masih kurang memadai dengan angka 31,18 karena kondisi ideal di antara 10.000 penduduk usia 13-

c) Rasio guru/murid

Rasio guru per (terhadap) murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru dan murid jenjang pendidikan dasar di SD/MI dan SMP/MTs sebagaimana dapat dilihat di tabel 2.34.

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.34.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO		001	<i>8,</i> 33	Tahun		
NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	PAUD					
	Jumlah Guru PAUD	523	583	909	1.719	2.499
	Jumlah Siswa PAUD	4.093	4.912	7.439	5.472	30.551
	Pagia Curu tarbadan siswa	1:	1:	1:	1:	1:
	Rasio Guru terhadap siswa	7,83	8,43	8,18	3,18	12,2
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah guru	5.682	5.728	5.527	5.488	5.550
1.1. 1	Jumlah guru SD PNS	2.941	2.806	2.616	2.689	2.568
1.1. 2	Jumlah guru SD Non PNS	1.425	1.576	1.634	1.558	1.722
1.1. 3	Jumlah guru MI PNS	177	164	162	153	156
1.1.	Jumlah guru MI Non PNS	1.139	1.182	1.115	1.088	1.104
1.2.	Jumlah murid sekolah negeri	57.695	56.305	55.245	54.599	54.920
1.2. 1	Jumlah murid SD negeri	57.055	55.598	54.492	53.773	54.032
1.2. 2	Jumlah murid MI negeri	640	707	753	826	888
1.3.	Jumlah murid sekolah swasta	18.989	19.461	20.107	20.978	22.108
1.3. 1	Jumlah murid SD swasta	4.600	4.860	5.174	5.233	5.316
1.3. 2	Jumlah murid MI swasta	14.389	14.601	14.933	15.745	16.792
1.4.	Jumlah murid	76.684	75.766	75.352	75.577	77.028
1.5.	Rasio per 10.000	740,96	756,0 1	733,49	726,15	720,52
	Rasio ideal per 10.000	500				
2	SMP/MTs				 	
2.1.	Jumlah guru	2.123	2.136	2.201	2.167	2.159
2.1.	Jumlah guru SMP PNS	1007	975	950	933	936

NO	Livoian			Tahun			
NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	
1							
2.1.	Jumlah guru SMP Non PNS	520	557	581	612	610	
2.1.	Jumlah guru MTs PNS	105	94	102	95	84	
2.1.	Jumlah guru MTs Non PNS	491	510	568	527	529	
2.2.	Jumlah murid sekolah negeri	20.879	21.944	20.032	20.498	21.111	
2.2. 1	Jumlah murid SMP negeri	19.264	20.310	18.431	18.788	19.352	
2.2.	Jumlah murid MTs negeri	1.615	1.634	1.601	1.710	1.759	
2.3.	Jumlah murid sekolah swasta	10.100	11.292	10.588	11.521	11.943	
2.3. 1	Jumlah murid SMP swasta	5.457	5.531	5.067	5.633	5.900	
2.3.	Jumlah murid MTs swasta	4.643	5.761	5.521	5.888	6.043	
2.4.	Jumlah murid	30.979	33.236	30.620	32.019	33.054	
2.5.	Rasio per 10.000	685,30	642,67	718,81	676,79	653,17	
	Rasio ideal per 10.000			500			

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kementrian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Rasio guru dan murid lebih banyak di SD/MI dibandingkan SMP/MTs, perkembangannya relatif stabil untuk SD/MI dan untuk SMP/MTs selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 rasio guru dan murid di SD/MI adalah 720,52. Menunjukkan bahwa ketersediaan guru relatif memadai bahkan cenderung kelebihan guru. Idealnya per 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI maupun SMP/MTs terdapat 500 guru.

Tabel 2.35.
Perkembangan PAUD
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian			Tahun					
NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016 76,38 73,49 n.a. 813 2.499			
1.	Angka Partisipasi	76,15	76,15	76,18	76,24	76,38			
	Sekolah								
2.	Angka Partisipasi Kasar	62,54	66,13	67,13	67,63	73,49			
3.	Angka Partisipasi Murni	51,90	51,7	51,79	51,88	n.a.			
4.	Jumlah sekolah PAUD	152	7	271	776	813			
5.	Jumlah Guru PAUD	583	152	1.719	2.402	2.499			
6.	Jumlah Siswa PAUD	4.912	909	5.472	24.427	30,551			
			7.439						

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Perkembangan PAUD dapat dibilang sangat bagus, karena baik itu APS, APK, APM, jumlah PAUD, jumlah guru PAUD dan jumlah siswa PAUD mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Jumlah yang sangat mencolok ada pada perkembangan jumlah siswa PAUD, pada tahun 2012 sejumlah 4.912 menjadi 30.551 pada tahun 2016, atau naik 83,92% dari tahun 2012.

d) Kondisi Ruang Kelas

- Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat

Bangunan atau gedung sekolah SD/MI dalam kondisi baik akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa saat proses pembelajaran di kelas, sehingga bisa meningkatkan prestasi siswa.

Tabel 2.36.
Persentase Kondisi Ruang Kelas SD/MI
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

			SD			MI			SD dan M	
No.	Kecamatan	Baik	Rusak	Rusak	Baik	Rusak	Rusak	Baik	Rusak	Rusak
		Daik	Ringan	Berat	Daik	Ringan	Berat	Daik	Ringan	Berat
01	PARAKAN	90,57	5,03	4,40	86,67	9,33	4,00	89,32	6,41	4,27
02	KLEDUNG	86,87	7,07	6,06	100,00	-	-	87,74	6,60	5,66
03	BANSARI	85,88	9,41	4,71	73,68	-	26,32	83,65	7,69	8,65
04	BULU	92,70	3,93	3,37	76,92	15,38	7,69	89,13	6,52	4,35
05	TEMANGGUNG	95,81	2,40	1,80	88,00	12,00	-	95,26	3,06	1,67
06	TLOGOMULYO	94,05	-	5,95	55,56	38,89	5,56	87,25	6,86	5,88
07	TEMBARAK	84,21	6,32	9,47	94,29	4,29	1,43	88,48	5,45	6,06
08	SELOPAMPANG	82,19	9,59	8,22	63,16	31,58	5,26	78,26	14,13	7,61
09	KRANGGAN	93,33	3,89	2,78	88,89	8,33	2,78	92,59	4,63	2,78
10	PRINGSURAT	92,54	3,98	3,48	68,18	24,24	7,58	82,88	12,01	5,11
11	KALORAN	93,53	2,94	3,53	63,00	31,00	6,00	82,22	13,33	4,44
12	KANDANGAN	91,78	3,42	4,79	92,62	4,10	3,28	92,16	3,73	4,10
13	KEDU	93,41	3,59	2,99	89,16	6,02	4,82	92,00	4,40	3,60
14	NGADIREJO	92,45	4,72	2,83	73,33	13,33	13,33	90,08	5,79	4,13
15	JUMO	88,57	3,81	7,62	85,71	4,76	9,52	87,76	4,08	8,16
16	GEMAWANG	88,00	5,60	6,40	71,05	15,79	13,16	84,05	7,98	7,98
17	CANDIROTO	88,89	5,56	5,56	60,53	21,05	18,42	82,32	9,15	8,54
18	BEJEN	87,91	7,69	4,40	83,33	16,67	-	86,78	9,92	3,31
19	TRETEP	87,84	6,76	5,41	75,76	15,15	9,09	84,11	9,35	6,54
20	WONOBOYO	93,46	3,74	2,80	91,67	5,56	2,78	93,01	4,20	2,80
	Rata	91,28	4,48	4,23	79,50	14,13	6,37	88,18	7,02	4,80

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Pada tahun 2016 persentase kelas SD/MI dalam kondisi baik 88,18 persen, kondisi rusak ringan 7,02 persen dan kondisi rusak berat 4,80 persen. Secara lebih jelas tercantum pada tabel 2.36.

Persentase Ruang Kelas SMP/MTs kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat.

Capaian pembangunan fasilitas pendidikan direpresentasikan dengan besaran ruang kelas dalam kondisi baik. Pada tahun 2016 persentase kelas SMP/MTs dalam kondisi baik 88,37 persen, kondisi rusak ringan 8,68 persen dan kondisi rusak berat 2,95 persen. Secara lebih jelas tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.37.
Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

					- 66	0,				
			SMP			MTs		S	MP dan M	Ts
No.	Kecamatan	Daile	Rusak	Rusak	Daile	Rusak	Rusak	Daile	Rusak	Rusak
		Baik	Ringan	Berat	Baik	Ringan	Berat	Baik	Ringan	Berat
01	PARAKAN	96,36	1,82	1,82	92,31	7,69	-	94,68	4,26	1,06
02	KLEDUNG	100	-	-	-	-	-	100	-	-
03	BANSARI	88,89	11,11	-	-	-	-	88,89	11,11	-
04	BULU	87,18	7,69	5,13	100	-	-	88,89	6,67	4,44
05	TEMANGGUNG	94,61	3,59	1,80	66,67	33,33	-	93,18	5,11	1,70
06	TLOGOMULYO	90,91	9,09	-	-	-	-	90,91	9,09	-
07	TEMBARAK	100	1	-	100	-	-	100	-	-
08	SELOPAMPANG	100	-	-	91,67	8,33	-	97,62	2,38	-
09	KRANGGAN	78,57	21,43	-	76,00	16,00	8,00	77,61	19,40	2,99
10	PRINGSURAT	93,02	6,98	-	82,35	11,76	5,88	90,00	8,33	1,67
11	KALORAN	79,63	20,37	-	72,73	18,18	9,09	78,46	20,00	1,54
12	KANDANGAN	92,86	•	7,14	80,95	19,05	-	89,61	5,19	5,19
13	KEDU	90,00	5,00	5,00	91,30	8,70	-	90,36	6,02	3,61
14	NGADIREJO	75,61	15,85	8,54	73,33	13,33	13,33	75,26	15,46	9,28
15	JUMO	100	ı	•	80,00	20,00	-	91,18	8,82	-
16	GEMAWANG	100	-	-	40,00	60,00	-	84,21	15,79	-
17	CANDIROTO	92,86	-	7,14	77,78	22,22	-	89,19	5,41	5,41
18	BEJEN	91,67	8,33	-	100	-	-	93,10	6,90	-
19	TRETEP	72,73	18,18	9,09	75,00	8,33	16,67	73,91	13,04	13,04
20	WONOBOYO	87,50	6,25	6,25	66,67	33,33	-	80,00	16,00	4,00
	Rata-rata	90,04	7,08	2,88	82,80	14,00	3,20	88,37	8,68	2,95

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

e) Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI, dan SMP/MTs selama kurun waktu 2012 ke 2016 berbeda-beda naik turunnya. Perkembangan angka putus sekolah setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38. Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian		Tahun							
	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016				
1.	APtS SD/MI	0,15	0,16	0,17	0,16	0,07				
2.	APtS SMP/MTs	0,84	0,82	0,55	0,51	0,33				

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI,

dan SMP/MTs disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor kesadaran orang tua dan anak, dan faktor lainnya.

f) Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka kelulusan pada tahun 2012-2016 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39.

Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

	Uraian		Tahun							
No	(orang)	2011/201	2012/201	2013/201	2014/201	2015/2016				
	(Orang)	2	3	4	5	2015/2010				
1.	SD/MI	11.204	11.799	11.911	12.058	11.764				
2.	SMP/MTs	9.684	9.480	9.389	9.911	10.296				

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

g) Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan adalah persentase jumlah siswa baru tingkat pertama pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa lulusan pada jenjang pendidikan di bawahnya pada tahun ajaran sebelumnya. Jumlah siswa lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dalam kurun waktu tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Perkembangan angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs selama lima tahun terakhir tercantum pada tabel 2.40.

Tabel 2.40.

Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

	No	Livoion	Tahun							
No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016				
	1.	SD/MI ke SMP/MTS	98,36	92,53	97,02	97,20	97,37			
Ī	2.	SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	68,32	64,36	72,97	73,74	82,15			

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

h) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV, S2 atau lebih

Guru yang memenuhi kualifikasi S_1/D_{IV} , S_2 atau lebih diharapkan dapat meningkatkan kapasitas guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas anak didiknya. Selama kurun waktu tahun 2012 - 2016, persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S_1/D_{IV} , S_2 atau lebih di berbagai jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41. Jumlah Guru Memiliki Kualifikasi S_1/D -IV, S_2 atau lebih Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016

Urajan	Tahun							
Oraian	2012	2013	2014	2015	2016			
Kualifikasi S_1/D_{rv}								
a. Guru SD/MI	3.576	3.576	4.508	4.666	4.809			
b. Guru SMP/MTs	1.726	1.726	1.823	1.904	1.815			
Kualifikasi S ₂ atau lebih								
a. Guru SD/MI	15	19	19	31	69			
b. Guru SMP/MTs	28	53	53	62	49			

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

2) Urusan Kesehatan

a) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu sebagai wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan KB mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah:

- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian
 Ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas);
- Membudayakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera);
- Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat

- untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lain yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
- Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Rasio posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, agar status gizi/derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan/ditingkatkan.

Rasio posyandu terhadap jumlah balita di Kabupaten Temanggung tahun 2012 – 2016 tercantum pada tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Rasio Posyandu dan Balita
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	**	Tahun								
	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016				
1.	Jumlah posyandu	1.493	1.497	1.505	1.506	1.505				
2.	Jumlah balita	58.592	58.221	45.428	53.645	55.019				
3.	Rasio	1:39	1:39	1:31	1:36	1:37				
	Rasio Ideal	1:50								

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk

Rasio sarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik kesehatan desa terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Secara jelas perkembangannya tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2.43.

Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu dan
Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Lingian		Tahun							
	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016				
1	Jumlah Penduduk	821.517	746.313	731.061	788.264	803.745				

Ma	Lingian			Tahun		
No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
2	Jumlah Puskesmas	24	24 24		24	24
	a. Puskesmas Rawat Inap	3	3	3	4	4
	b. Puskesmas Non Rawat Inap	21	21	21	20	20
3	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:34.230	1:31.096	1:30.461	1:31.844	1:33.489
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	40	40	41	40	40
5	Rasio Pustu per satuan penduduk	1:20.538	1:18.658	1:17.831	1:19.706	1:20.094
6	Jumlah Pos Kesehatan Desa	159	161	162	162	215
7	Rasio PKD per satuan penduduk	1:5.167	1:4.635	1:4.513	1:4.866	1:3.738

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Jumlah Puskesmas selama kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan, ada 24 terdiri dari 20 Puskesmas dengan rawat jalan dan 4 Puskesmas dengan rawat inap yang tersebar di 20 kecamatan. Puskesmas pembantu jumlahnya juga relatif sama selama 5 tahun terakhir, yaitu 40 puskesmas pembantu, terdapat jumlah 41 pada tahun 2014 tapi karena ada 1 Puskesmas pembantu di Kecamatan Kledung yang tidak aktif atau tidak banyak pasien maka ditutup sehingga jumlahnya kembali menjadi 40. Jumlah PKD jumlahnya cenderung bertambah, pada tahun 2012 sebanyak 159 PKD menjadi 215 PKD pada tahun 2016, dengan pertambahan yang mencolok sebanyak 53 PKD pada tahun 2016. Sarana kesehatan lain adalah 24 puskesmas keliling.

Jumlah sarana prasarana kesehatan yang meningkat pertahunnya, diharapkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini tentu saja juga diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sarana prasarana kesehatan ini, misalnya berobat bila sakit, memeriksakan kehamilan, melahirkan, imunisasi dan lainya.

Rasio Puskesmas menurut standar Kementerian Kesehatan RI yaitu 1 (satu) Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Jumlah dan rasio puskesmas di breakdown sampai tingkat kecamatan dapat diamati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44.

Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

NO		Jumlah		Puskesm	as	Puskesr	nas P	embantu	Polikli	nik Kese Desa	ehatan
NO	Kecamatan	Pendudu k	Jumla h	F	Rasio			Rasio	Jumla h	F	Rasio
1	Parakan	55.096	2	1:	27.548	2	1:	27.548	7	1:	7.871
2	Kledung	28.343	1	1:	28.343	2	1:	14.172	9	1:	3.149
3	Bansari	24.265	1	1:	24.265	0		0	8	1:	3.033
4	Bulu	48.932	1	1:	48.932	2	1:	24.466	7	1:	6.990
5	Temanggung	83.920	2	1:	41.960	2	1:	41.960	6	1:	13.987
6	Tlogomulyo	23.177	1	1:	23.177	2	1:	11.589	6	1:	3.863
7	Tembarak	31.479	1	1:	31.479	0		0	7	1:	4.497
8	Selopampang	20.426	1	1:	20.426	1	1:	20.426	8	1:	2.553
9	Kranggan	49.625	2	1:	24.813	2	1:	24.813	6	1:	8.271
10	Pringsurat	52.315	1	1:	52.315	4	1:	13.079	5	1:	10.463
11	Kaloran	46.746	2	1:	23.373	4	1:	11.687	6	1:	7.791
12	Kandangan	52.706	1	1:	52.706	2	1:	26.353	12	1:	4.392
13	Kedu	61.171	1	1:	61.171	2	1:	30.586	10	1:	6.117
14	Ngadirejo	57.115	1	1:	57.115	1	1:	57.115	12	1:	4.760
15	Jumo	30.503	1	1:	30.503	2	1:	15.252	11	1:	2.773
16	Gemawang	34.209	1	1:	34.209	2	1:	17.105	9	1:	3.801
17	Candiroto	33.481	1	1:	33.481	3	1:	11.160	9	1:	3.720
18	Bejen	21.908	1	1:	21.908	2	1:	10.954	10	1:	2.191
19	Tretep	21.356	1	1:	21.356	2	1:	10.678	7	1:	3.051
20	Wonoboyo	26.972	1	1:	26.972	3	1:	8.991	7	1:	3.853
	Jumlah	803.745	24	1:	33.489	40	1:	20.094	162	1:	4.961

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Menurut standar Kementrian Kesehatan RI rasio ideal Puskesmas dengan penduduk adalah 1 : 20.094, sehingga menurut standar tersebut dapat dikatakan keseluruhan Puskesmas di Kabupaten Temanggung masih dibawah standar.

c) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.45. Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	NO Urojon	Tahun							
NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016			

1.	Jumlah Penduduk	821.517	746.313	731.061	788.264	803.745
2.	Jumlah Rumah	4	4	4	4	1
۷.	Sakit	4	4	4	4	4
	Rumah Sakit	1	1	1	1	1
	Pemerintah	1	1	1	1	1
	Rumah Sakit	3	3	3	3	3
	Swasta	3	3	ა	ა	3
3.	Rasio Rumah Sakit	1:	1:	1:	1:	1:
٥.	Rasio Ruillali Sakit	205.379	186.578	182.765	197.066	200.936

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Sejak tahun 2012–2016 jumlah rumah sakit ada 4 (empat), terdiri dari rumah sakit daerah 1 (satu) buah dan rumah sakit swasta 3 (unit) buah.

Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2016 adalah 1 : 200.936 artinya satu rumah sakit melayani 200.936 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Temanggung dengan penduduk sebesar 803.745 jiwa membutuhkan 8 rumah sakit atau membutuhkan 4 rumah sakit baru.

d) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk selama lima tahun terakhir tersebut dalam tabel 2.46.

Tabel 2.46.

Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian		Tahun							
NO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016				
1	Jumlah penduduk	821.517	746.313	731.061	788.264	803.745				
2	Jumlah dokter umum	89	91	91	91	71				
3	Rasio dokter umum	1 : 9.230	1 : 8.201	1 : 8.033	1 : 8.662	1 : 11.320				
4	Jumlah dokter gigi	39	39	39	29	28				
5	Rasio dokter gigi	1: 21.064	1 : 19.136	1 : 18.745	1 : 27.181	1 : 28.705				

No	Uraian		Tahun					
NO	2	2012	2013	2014	2015	2016		
6	Jumlah dokter spesialis	24	25	25	25	49		
7	Rasio dokter	1:	1:	1:	1:	1:		
	spesialis	34.230	29.852	29.242	31.530	16.403		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Rasio dokter umum 1 banding 11.320 menunjukkan satu orang dokter umum melayani 11.320 penduduk. Angka rasio tersebut masih jauh dari ideal karena idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk sehingga masih memerlukan penambahan jumlah dokter.

e) Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, dan RSU).

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Temanggung pada periode tahun 2016 mencapai 100%, artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan telah ditangani seluruhnya dan bahkan termasuk melayani ibu hamil yang berasal dari luar wilayah kerjanya. Secara rinci terlihat pada tabel 2.47.

Tabel 2.47.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Urajan	Tahun						
NO	Oraian	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	2.776	2.652	3.619	3.863	3.796		
2	Jumlah penanganan komplikasi kebidanan	3.243	2.972	3.619	3.863	3.796		
3	Cakupan komplikasi kebidanan	116,82	112,07	100	100	100		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

f) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.48.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Urajan		Tahun						
NO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Jumlah ibu yang ditolong	12.488	9.495	11.031	10.970	10.616			
1	oleh tenaga kesehatan	12.400	3.433	11.031	10.370	10.010			
2	Jumlah seluruh sasaran	12.532	12.628	11.033	11.561	10.616			
	ibu bersalin	12.002	12.026	11.033	11.501	10.010			
3	Cakupan pertolongan	99,65	75.19	99.98	94.9	100			
	persalinan	33,03	75,19	33,36	34,9	100			

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sejak 2012 sampai dengan 2016 cenderung fluktuatif, hal ini bukan karena kurangnya penanganan namun karena sebagian dari jumlah ibu sasaran bersalin belum proses melahirkan sampai dengan bulan Desember.

Hal ini menunjukkan meningkatnya kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam pertolongan persalinan sesuai standar.

g) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) ialah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada ≥ 80 % sasaran bayi (0-11 bulan) dalam satu tahun. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 (satu) dosis BCG, 3 (tiga) dosis DPT, 4 (empat) dosis Polio, 4 (empat) dosis Hepatitis B,1 (satu) dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 (dua) dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi, 1 (satu) dosis DT, 1 (satu) dosis campak, 2 (dua) dosis TT.

Desa UCI adalah desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Cakupan desa UCI tiap tahun sama dari tahun 2012, sampai tahun 2016 mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi telah mendapatkan imunisasi. Rincian data selengkapnya seperti terlihat pada tabel 2.49.

Tabel 2.49.

Cakupan Desa UCI (*Universal Child Immunization*)

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Uraian	Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Jumlah Desa/Kelurahan	289	289	289	289	289		
2	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	288	288	288	288	288		
3	Persentase	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Selama 5 (lima) tahun terakhir capaian yang sama tersebut dikarenakan ada 1 (satu) desa yang masyarakatnya menolak untuk dilakukan imunisasi pada balita mereka, yaitu desa Bonjor Kecamatan Tretep.

h) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan medis dibagi jumlah balita gizi buruk yang ada di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sejak 2012 sampai dengan 2016 selalu tercapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah serta masyarakat di lingkungan sekitar.

Tabel 2.50.

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO Uraian	Lincian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Balita Gizi Buruk	253	16	28	25	19	
2	Balita Gizi buruk mendapatkan perawatan	253	16	28	25	19	
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

i) Cakupan Ibu hamil dengan K4

Cakupan ibu hamil dengan K4 menggambarkan besaran ibu hamil yang melakukan kontak dengan tenaga kesehatan

untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan, yaitu paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 (satu) kali pada trimester pertama, 1 (satu) kali pada trimester kedua dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga.

Cakupan ibu hamil dengan K4 di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2012 – 2016 masih fluktuatif. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.51.

Tabel 2.51.

Cakupan Ibu Hamil K4

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Urajan	Tahun						
NO	Oraiair	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Jumlah Ibu Hamil	13.878	12.654	11.765	12.081	11.634		
2	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4	12.801	11.694	11.094	10.991	10.794		
3	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	92,24	92,41	94,30	90,98	92,78		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

j) Cakupan Kunjungan Neonatus

Masa neonatal dalam siklus hidup manusia merupakan masa yang paling rentan karena seseorang masih dalam kondisi yang sangat lemah sehingga tingkat ketergantungannya sangat tinggi pada ibunya. Tingginya kematian pada bayi, sepertiganya terjadi dalam satu bulan pertama setelah kelahiran dan sekitar 80% kematian ini terjadi pada minggu pertama.

Pelayanan kesehatan terhadap neonatal idealnya dilakukan minimal dilakukan pada saat bayi berusia 6-48 jam selama satu kali, 3-7 hari selama satu kali dan 8-28 hari selama satu kali.

Capaian kunjungan neonatus lengkap selama lima tahun terakhir cenderung meningkat, mengalami 100 persen pada tahun 2016 seperti terlihat pada tabel 2.52.

Tabel 2.52.
Penanganan Neonatus
Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Urajan	Tahun						
NO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Jumlah bayi lahir hidup	12.144	11.203	11.010	10.939	10.733		
2	Jumlah kunjungan neonatus	11.729	10.927	11.055	10.938	10.733		
3	Cakupan kunjungan neonatus	96,58	97,54	99,95	99,99	100		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

k) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA selama kurun waktu tahun 2012 - 2016 masih fluktuatif. Masih rendahnya cakupan karena masih adanya sebagian masyarakat yang dropout dalam berobat. Perkembangannya tercantum pada tabel 2.53.

Tabel 2.53.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC

BTA Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Urajan	Tahun						
NO	Oraian	2012	2013	2014	2015	2016		
	Jumlah penderita baru TBC							
1.	BTA yang ditemukan dan	202	179	275	285	281		
	diobati							
2.	Jumlah perkiraan penderita	853	820	824	791	892		
۷.	baru TBC BTA	655	620	024	791	092		
	Cakupan penemuan dan							
3.	penanganan penderita penyakit	23,68	21,83	12,00	36,03	31,5		
	TBC BTA							

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

1) Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD

Penyakit-penyakit yang ditularkan vektor dan menjadi masalah kesehatan di indonesia adalah malaria, filariasis dan demam berdarah. Penularannya dari orang ke orang dengan perantaraan nyamuk, demam berdarah sendiri ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat dijumpai di daerah sub tropik dan tropik dan mengenai sekitar 500 – 100 juta jiwa per tahun. Dengan demikian sekitar dua per lima penduduk dunia bertempat tinggal di daerah berisiko tinggi termasuk Indonesia.

Penderita demam berdarah dengue (DBD) yang ditangani adalah penderita DBD yang ditangani sesuai standar satu wilayah dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Temanggung tahun 2012-2016 tercantum pada tabel 2.54.

Tabel 2.54.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Urajan	Tahun					
NO	Oraian	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah penderita demam	41	320	283	493	810	
1.	berdarah DBD	41	320	200	433	010	
2.	Jumlah penderita demam	41	320	283	493	810	
۷.	berdarah ditangani	41	320	200	433	610	
	Cakupan penemuan dan						
3.	penanganan penderita penyakit	100	100	100	100	100	
	DBD						

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

m) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100%. Namun pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan 100% semuanya tertangani.

Tabel 2.55. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Urajan	Tahun							
NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016			
1.	Jumlah kunjungan pasien	871	154.771	158.834	51.530	47.146			
	miskin di sarana kesehatan								
	strategis (orang)								
2.	Cakupan pelayanan	0,38	53,01	34,42	76,29	100			
	kesehatan rujukan pasien								

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	
	masyarakat miskin (%)						

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

n) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama.

Cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 (empat) kali, pada kurun waktu 2012 - 2016 cenderung fluktuatif. Capaian pada tahun 2016 sebesar 97,64 persen. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Temanggung telah melebihi target SPM sebesar 90 persen, perkembangannya selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.56.

Tabel 2.56. Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun							
INO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Jumlah Kunjungan Bayi	11.682	10.960	10.876	10.531	10.480			
2	Jumlah Bayi Lahir Hidup	12.371	11.211	11.010	10.939	10.733			
3	Persentase Kunjungan Bayi	94,4	97,8	98,8	96,27	97,64			

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

o) Cakupan kunjungan Nifas

Pada saat masa nifas (paska persalinan) masih terjadi kemungkinan kematian ibu maternal, sehingga perlu mendapatkan pelayanan kesehatan paska persalinan minimal 3 (tiga) kali.

Cakupan pelayanan kepada ibu paska persalinan yang sesuai standar pada kurun waktu tahun 2012 - 2016 cenderung fluktuatif. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa jangkauan dan kualitas pelayanan terhadap ibu pasca melahirkan telah merata dan sesuai standar. Data cakupan

kunjungan nifas dapat dilihat pada tabel 2.57.

Tabel 2.57. Cakupan Kunjungan Nifas Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Uraian	Tahun							
NO		2012	2013	2014	2015	2016			
1	Jumlah Kunjungan Nifas	11.823	10.82	11.031	10.677	10.378			
2	Jumlah Ibu Nifas	12.503	10.842	11.031	11.561	10.616			
3	Cakupan Kunjungan Nifas	94,56	96,25	100	92,35	97,76			

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

p) Persentase penanganan KLB<24 Jam

Kemampuan wilayah memberikan jaminan hidup yang sejahtera bagi penduduknya salah satunya dapat dilihat dari cakupan penanganan terhadap Desa/Kelurahan yang terkena Kejadian Luar Biasa (KLB).

Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung yang terkena KLB selama lima tahun terakhir tidak sama setiap tahunnya. Dari Desa/Kelurahan yang terkena KLB tersebut telah tertangani seluruhnya, namun tidak semuanya dapat tertangani <24 jam. Hal tersebut disebabkan karena laporan yang terlambat dari desa/kelurahan yang terkena KLB. Jumlah desa/kelurahan dengan kejadian KLB ditangani selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.58.

Tabel 2.58.

Jumlah Desa/Kelurahan dengan kejadian KLB ditangani <24
jam di Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Urajan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah Desa/kelurahan dengan kejadian KLB	26	45	31	24	46	
2	Jumlah Desa/kelurahan dengan kejadian KLB yang ditangani <24 jam	25	44	31	24	46	
3	Jumlah Desa/kelurahan dengan kejadian KLB yang tidak dapat ditangani <24 jam	1	1	0	0	0	
4	Cakupan Desa/ Kelurahan dengan KLB yang ditangani < 24 jam (%)	96,15	97,78	100	100	100	

q) Persentase rumah tangga yang Ber-PHBS

Salah satu tolak ukur dari kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari rumah tangga yang mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Jumlah rumah tangga yang dipantau perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Cakupan rumah tangga yang ber-PHBS dari tahun ke tahun tersebut pada tabel 2.59.

Tabel 2.59.
Persentase Rumah Tangga yang Ber-PHBS
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Urajan			Tahun		
NO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016
	Jumlah rumah					
1	tangga yang	208.532	205.988	197.660	204.180	220.668
	dipantau					
	Jumlah rumah					
2	tangga yang ber-	156.964	156.897	156.294	170.725	176.577
	PHBS					
	Persentase rumah					
3	tangga yang ber-	75,27	76,2	79,07	79,23	80,00
	PHBS					

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

r) Persentase Desa Siaga Aktif

Jumlah desa siaga aktif di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir mencapai 100%, menunjukkan bahwa semua desa/kelurahan mampu dalam memberikan jaminan kehidupan masyarakat untuk memperoleh jaminan layanan kesehatan yang memadai. Keberadaan Desa Siaga menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat melalui pelayanan dasar kesehatan.

3) Urusan Pekerjaan Umum

a) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jalan nasional yang melewati wilayah Kabupaten Temanggung adalah sepanjang 45,66 Km. Pada tahun 2015 dari semua ruas jalan nasional tersebut 26,33 km dalam kondisi baik. Sedangkan yang kondisinya sedang menjadi 19,33 Km.

Untuk ruas-ruas jalan berstatus jalan provinsi yang melewati wilayah Kabupaten Temanggung adalah sepanjang 59,33 Km. Apabila dilihat dari kondisi jalan pada tahun 2015 maka jalan provinsi dalam kondisi baik 28,33 Km, kondisi sedang 12,6 Km, kondisi rusak 18,4 Km dan kondisi rusak berat tidak ada.

Jaringan jalan yang berstatus jalan kabupaten ada 545 ruas jalan dan mencakup 739,13 Km. Data Tahun 2016 menunjukkan bahwa jalan kabupaten dalam kondisi baik ada 452,763 Km, jalan yang kondisinya sedang 122,204 Km dan yang kondisinya rusak ringan yaitu 46,707 Km dan kondisi rusak berat yaitu 27,895 Km.

b) Persentase rumah tinggal bersanitasi

Pelayanan di bidang sanitasi meliputi pengelolaan air limbah dan drainase. Perkembangan persentase jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60.
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Uraian	Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	138.084	139.138	195.991	165.297	165.363		
2.	Jumlah rumah tinggal	195.282	196.825	196.294	196.294	196.943		
3.	Persentase	70,71	70,69	99,84	84,21	83,96		

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c) Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

Salah satu indikator untuk melihat kinerja di bidang persampahan adalah dengan melihat rasio jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) per 1.000 penduduk sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.61. Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian			Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016			
1.	Jumlah TPS (unit)	82	139	164	430	437			
2.	Jumlah Daya	45.288	47.450	98.259	E0 770	49.040			
	Tampung TPS (m3)	43.200	47.450		50.779	48.049			
3.	Jumlah Penduduk	821.517	746.313	731.061	788.264	803.745			
	(jiwa)	021.317	740.313	731.001	700.204	603.743			
	Presentase daya								
	tampung TPS	·				- 00			
4.	terhadap jumlah	5,51	6,36	13,44	6,44	5,98			
	penduduk								
	Rasio Daya Tampung	1.	1.		1.				
4.	TPS terhadap Jumlah	1:	1:	1:7,44	1:	1: 16,73			
	penduduk	18,14	15,73		15,52	, 			

Sumber : DPUPKP Kabupaten Temanggung Tahun 2017

4) Urusan Perumahan

a) Jumlah Kebutuhan Rumah

Jumlah rumah yang dibutuhkan di Kabupaten Temanggung adalah jumlah kepala keluarga (yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dikurangi jumlah rumah. Secara rinci tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62.

Kebutuhan Rumah

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian		Tahun					
NO		2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah KK	248.985	241.809	239.692	246.088	252.796		
2.	Jumlah rumah	192.814	195.282	196.282	190.700	194.420		
3.	Kebutuhan rumah	53.703	44.984	43.398	49.794	37.285		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Rumah Tangga Pengguna Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik pada suatu daerah atau wilayah menunjukkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut, secara jelas tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63.

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun						
INO	Oraian	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	168.101	175.475	169.278	169.278	183.587		
2.	Jumlah Rumah Tangga	192.080	193.096	208.874	194.116	252.796		
3.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	87,52	90,87	81,04	87,20	72,62		

Sumber: PLN Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c) Lingkungan pemukiman kumuh

Kondisi permukiman yang sehat dan tertata dengan baik menjadi faktor peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Penanganan permukiman kumuh menjadi salah satu fokus dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang sehat. Luasan kawasan kumuh pada tahun 2014 ada **47,62** Ha meliputi kawasan perkotaan Temanggung dan Parakan.

d) Penataan Drainase

Sistem drainase menjadi salah satu pendukung utama upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, disamping dua komponen lainnya yaitu pengolahan air limbah dan persampahan. Sampai dengan tahun 2014, penataan sistem drainase yang sudah memadai pada skala kawasan/kota baru mencapai **38,72%.** Pada beberapa lokasi khususnya di perkotaan Parakan dan Temanggung masih terjadi genangan dan luapan air hujan ke jalan yang perlu penanganan saluran drainase.

e) Rumah layak huni

Penanganan rumah layak huni di Kabupaten lima tahun terakhir mengalami Temanggung selama peningkatan karena adanya beberapa program pemugaran rumah yang didukung pemerintah Kabupaten Temanggung melalui program pemugaran perumahan di desa binaan, program PNPM Mandiri Perdesaan, program PNPM Mandiri perkotaan, program pemugaran rumah tidak layak huni oleh dinas sosial, dan program rehab rumah oleh lembaga swasta. Persentase rumah layak huni dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.64.

Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun					
INO		2012	2013	2014	2015	2016	
1	. Jumlah rumah layak huni	183.7	186.1	183.3	169.9	152.4	
1.		65	18	54	64	18	
2	Jumlah rumah	192.8	195.2	196.2	190.7	194.4	
3.		14	82	82	00	20	
4	Persentase rumah layak huni	95.53	95.31	93.41	89.13	78.39	
4.	terhadap jumlah rumah	95,53	95,31	93,41	89,13	10,39	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2017

f) Rumah tidak layak huni

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama lima tahun terakhir adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai pendanaan meliputi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI.

Adapun perkembangan jumlah rumah tidak layak huni dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.65.
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian			Tahun		
NO		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah rumah tidak layak	11.157	10.707	12.858	26.330	25.501
2.	Jumlah rumah	192.814	195.282	196.282	190.700	194.420
3.	Persentase rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah	5,78	5,48	6,55	13,81	13,12

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel 2.67, bisa dilihat bahwa persentase RTLH terhadap total jumlah rumah mengalami kenaikan meskipun relatif kecil. Pada tahun 2012 persentasenya 5,78 persen, sedangkan pada tahun 2016 angkanya 13,12 persen atau mengalami peningkatan hampir 100 persen. Jika melihat data tersebut maka dapat dikatakan bahwa mekipun RTLH terus ditangani namun juga terdapat penambahan jumlah rumah, sehingga persentase RTLH terhadap jumlah rumah yang ada masih relatif kecil.

g) Tipe rumah

Perkembangan tipe rumah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.66.
Perkembangan Peningkatan Tipe Rumah
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Tipe Rumah	Tahun						
NO		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Tipe A	66.061	68.577	70.221	71.343	73.527		
2	Tipe B	84.910	85.573	85.906	80.817	81.964		
3	Tipe C	41.843	41.132	40.155	38.540	38.929		
4	Jumlah Rumah	192.814	195.282	196.282	190.700	194.420		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel 2.66 pada tahun 2016 rumah tipe B menduduki persentase terbesar dengan jumlah 85.910 buah. Sedangkan rumah tipe A sebanyak 70.224 buah dan rumah tipe C sebanyak 40.160 buah.

Apabila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, maka telah terjadi peningkatan jumlah bangunan rumah maupun tipe rumahnya yang menggambarkan terjadi peningkatan kemampuan dalam penyediaan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan peningkatan kualitas bangunan rumah.

Tabel 2.67.

Jumlah Rumah Menurut Tipe Rumah
Per Kecamatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

Vocamatan	Rumah Tinggal Menurut Tipe (unit)			Jumlah
Kecamatan	Α	В	С	(Unit)
1. Parakan	5.569	5.054	2.251	12.874
2. Kledung	1.053	1.357	816	3.226
3. Bansari	2.070	2.591	1.391	6.052
4. B u l u	4.150	4.570	1.995	10.715
5. Temanggung	11.885	6.854	1.702	20.441
6. Tlogomulyo	2.326	2.080	1.132	5.538
7. Tembarak	3.123	3.008	1.249	7.380
8. Selopampang	1.212	2.348	1.264	4.824
9. Kranggan	6.649	5.415	2.127	14.191
10. Pringsurat	4.373	6.225	2.217	12.815
11. Kaloran	5.516	5.025	2.954	13.495
12. Kandangan	5.525	4.784	2.364	12.673
13. K e d u	3.930	7.902	3.210	15.042
14. Ngadirejo	3.548	6.620	3.170	13.338
15. J u m o	2.499	3.676	2.283	8.458
16. Gemawang	1.956	3.140	2.166	7.262
17. Candiroto	2.987	3.307	2.181	8.475
18. Bejen	1.958	2.768	1.487	6.213
19. Tretep	1.281	2.288	1.353	4.922
20. Wonoboyo	1.917	2.952	1.617	6.486
Jumlah	73.527	81.964	38.929	194.420

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Adapun rincian jumlah tipe rumah di tahun 2016 menurut tipenya di masing-masing wilayah kecamatan dapat

5) Urusan Penataan Ruang

a) Ruang terbuka hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemic, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% terdiri dari RTH Privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan keseimbangan mikrolimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat mengkatkan nilai estetika kota. Perkembangan persentase RTH di Perkotaan Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.68. Persentase Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Lingian		Tahun						
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016			
Persentase Ruang Terbuka	20.15	29.15	20.5	20	24.0			
Hijau di Perkotaan (%)	29,15	29,13	29,5	30	34,9			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Walaupun capaian RTH publik masih kurang dari target namun capaian luasan RTH kawasan perkotaan privat dan publik sudah mencapai lebih dari 30%. Di Temanggung masih lebih banyak RTH privat daripada RTH Publik dikarenakan luasan RTH sebagian besar masih berupa sawah.

b) Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

Untuk menjaga agar setiap bangunan dapat memperperhatikan kaidah-kaidah pembangunan tersebut diperlukan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang memperhatikan memperhatikan konsep keruangan baik tata bangun, tata letak, ketinggian, garis sempadan, Koefisien Dasar

Bangunan (KDB), dan Koefisien Luas Bangunan (KLB). Rasio bangunan yang mempunyai IMB dapat dilihat pada tabel 2.69.

Tabel 2.69. Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016

No	Urajan	Tahun						
INO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah Bangunan	196.346	199.720	199.871	n.a	n.a		
2.	Jumlah Bangunan yang memiliki IMB	13.938	14.110	14.261	14.385	14.523		
3.	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	7,10	7,06	7,14	n.a	n.a		

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2017

6) Urusan Perencanaan Pembangunan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2009. Sedangkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014. Sedangkan untuk Dokumen Rencana Kerja Pembangunan daerah pada setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada setiap tahunnya diharapkan tercapai 100%.

Pada tahun ke tiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, dari 747 indikator kinerja daerah baru 202 indikator, sehingga baru tercapai 46,62%. Beberapa indikator kinerja daerah yang belum tercapai akan diupayakan percepatan.

7) Urusan Perhubungan

a) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah penumpang angkutan umum selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya. Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut dimungkinkan terjadi diakibatkan adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat dan peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua. Jumlah penumpang angkutan umum

di Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70.

Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

I Imaia m	Tahun						
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016		
Jumlah	12.039.985	12.021.336	10.533.531	10.404.259	10.489.305		
penumpang							

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Rasio Ijin Trayek

Dalam rangka melegalilasi mobil angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang diperlukan adanya Ijin Trayek. Moda angkutan umum yang beroperasi yaitu mulai Bus AKAP (Antar Kota Antar Propinsi), AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi), Minibus, Angkutan perkotaan (Angkot), dan angkutan perdesaan (Angkudes). Disamping itu terdapat juga moda angkutan yang bersifat tradisional yang mendukung pelayanan sebagian kawasan perkotaan yaitu delman/andong. Ijin trayek yang dikeluarkan di Kabupaten Temanggung adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.71.
Rasio Ijin Trayek
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun						
INO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah Ijin Trayek	523	543	591	591	591		
2.	Jumlah penduduk	821.517	746.313	731.061	788.264	803.745		
3.	Dogio Jim Trovola	1:	1:	1:	1:	1:		
J.	Rasio Ijin Trayek	1.571	1.374	1.237	1.334	1.360		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan penumpang umum dan juga angkutan barang. Pengujian tersebut adalah uji berkala kendaraan bermotor untuk pemeriksaan laik jalan yang dilakukan dalam periode satu tahun. Jumlah Uji Kir di Kabupaten Temanggung selama tahun 2012-2016 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.72.

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Urajan	Tahun					
INO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah Kendaraan Bermotor	8.200	8.700	7.568	7.558	8.518	
1.	Wajib Uji (unit kendaraan)	0.200	8.700	7.306	7.336	0.010	
2.	Frekunsi Uji KIR Angkutan	16 491	17 510	16 400	17.052	17 449	
۷.	Umum (kali)	10.461	17.519	10.400	17.032	17.442	
3.	Persentase (%)	99	100	108	112	102	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

d) Jumlah Terminal

Terminal bus merupakan tempat menurunkan dan menaikkan <u>penumpang</u>, perpindahan intra dan/atau antar <u>moda transportasi</u> serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan <u>kendaraan</u> umum. Jumlah terminal di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.73.

Tabel 2.73.

Jumlah Terminal Kabupaten Temanggung

Tahun 2012-2016

No	Ilmion	Tahun					
INO	No Uraian		2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah terminal tipe B	1	1	1	1	1	
2.	Jumlah terminal tipe C/Sub Terminal	9	10	10	9	9	
3.	Jumlah	10	11	11	10	10	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

8) Urusan Lingkungan Hidup

a) Persentase penanganan sampah

Data volume sampah yang direduksi di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.74. Persentase Volume Sampah Yang Direduksi Pada Tingkat TPST Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Urajan	Tahun						
INO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Volume sampah yang direduksi (m³)	171,37	188,11	195,79	202,7	205,78		
2.	Volume sampah yang seharusnya direduksi (m³)	1.438,1 6	1.6540,19	1.665	1.882	1.982		
3.	Persentase (%)	11,92	11,40	11,76	10,77	10,38		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

b) Persentase penduduk berakses air minum

Salah satu variabel penting dalam aspek pelayanan umum adalah pelayanan kepada masyarakat terhadap akses air minum layak. Ukuran layak menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat.

Ukuran tingkat pelayanan akses air minum dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum baik berasal dari air mineral, air PDAM/Perpipaan, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal.

Proporsi jumlah rumah tangga yang sudah terlayani air minum tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.75.
Proporsi Rumah Tangga Yang Mendapat Air Minum Layak
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Lincian	Tahun						
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016		
Proporsi rumah tangga dengan air minum layak	74,48	82,48	82,69	70,31	81,41		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2017

9) Urusan Pertanahan

a) Persentase luas lahan bersertifikat

Jumlah lahan bersertifikat adalah jumlah lahan yang sudah bersertifikat (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Milik, dan Hak Pakai). Jumlah bidang lahan bersertifikat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76. Jumlah Bidang Lahan Bersertifikat Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 - 2016

		Tahun					
No	No Uraian		2014	2015	2016		
1.	Jumlah tanah bersertifikat HGB	4.189	6.923	6.029	6.457		
2.	Jumlah tanah bersertifikat HGU	10	17	11	11		
3.	Jumlah tanah bersertifikat HM	200.870	199.092	202.862	210.740		

			Tal	nun	
No	Uraian	2013	2014	2015	2016
4.	Jumlah tanah bersertifikat Hak Pakai	7.089	1.899	1.095	1.246
5.	Jumlah tanah bersertifikat Wakaf	271	n.a	n.a	429
6.	Jumlah total bidang tanah sesuai SPPT	547.985	n.a.	558.031	526.569
7.	Jumlah tanah yang bersertifikat (BPN)	216.617	207.931	209.997	218.979
8.	Jumlah tanah milik Pemda	1.288	n.a.	n.a	23.713
9.	Jumlah tanah milik Pemda yang bersertifikat	977	n.a.	n.a	1.381

Sumber : Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Penyelesaian kasus tanah Negara

Tanah milik Pemda ada sejumlah 23.713 bidang, yang bersertifikat ada 1.381 bidang atau 5,82%, dan yang belum bersertifikat sejumlah 22.332 bidang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut.

10) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a) Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte NIkah

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dillihat berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte lahir dan Akte Nikah.

Tabel 2.77. Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Limaiona			Tahun		
NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kepemilikan KTP	507.516	530.602	572.978	579.144	586.011
2	Kepemilikan KK	248.985	241.809	259.558	246.088	252.796
3	Kepemilikan Akte Nikah	188	186	181	193	130
4	Kepemilikan Akte Lahir	331.639	358.917	376.666	462.030	488.045

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2017

11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun yang dibahas dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu 1)Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah. 2)Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 3)Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta sebagai berikut:

a) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV. Secara jelas tercantum pada berikut.

Tabel 2.78. Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Urajan			Tahun	2015 2016 2 3 3 2 26 34 3 278 293 0 4.216 4.255 5 417.223 241.564		
INO	Oraiaii	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	2	2	2	3	3	
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	24	22	22	26	34	
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	264	262	258	278	293	
4	Pekerja perempuan di pemerintah	4.555	4.240	5.060	4.216	4.255	
5	Jumlah pekerja perempuan	166.331	217.149	190.835	417.223	241.564	
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2,74	1,95	2,65	1,01	1,98	

b) Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Adapun partisipasi perempuan di lembaga swasta dapat dilihat dengan tabel berikut.

Tabel 2.79.
Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Urajan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah perempuan						
	yang bekerja di lembaga	7.677	48.003	48.010	11.838	64.718	
	swasta						
2	Jumlah pekerja	166.331	190.835	190.835	417.223	241.564	
	perempuan	100.331	190.633	190.633		241.304	
3	Persentase pekerja						
	perempuan di lembaga	4,61	25,15	25,15	2,84	26,79	
	swasta						

Sumber : Badan Pengendalian Penduduk KB PP dan PA Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel 2.79 dapat dilihat menurunnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta, di tahun 2014 sebanyak 48.010 mengalami kenaikan sebesar 64.718 pekerja perempuan atau sebesar 2,84% hal ini diasumsikan karena keterbatasan modal usaha dan skil sehingga terjadi penurunan.

c) Partisipasi Perempuan yang Bekerja Mandiri

Persentase partisipasi perempuan yang bekerja mandiri adalah adalah proporsi perempuan yang bekerja secara perorangan (swasta) namun bukan bekerja di bawah suatu lembaga/kantor/perusahaan terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Adapun partisipasi perempuan yang bekerja mandiri dapat dilihat dengan tabel berikut.

Tabel 2.80.
Pekerja Perempuan yang Bekerja Mandiri Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Urajan	Tahun				
NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016

1	Jumlah perempuan yang bekerja mandiri	154.099	164.906	137.765	1.777	172.591
2	Jumlah pekerja perempuan	166.331	190.835	190.835	417.223	241.564
3	Persentase pekerja perempuan yang bekerja mandiri	92,65	86,41	72,19	0,43	71,45

Sumber : Badan Pengendalian Penduduk KB PP dan PA Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel 2.80 dapat dilihat partisipasi perempuan yang bekerja mandiri pada tahun 2016 sebanyak 172.591 dari 241.564 pekerja perempuan atau sebesar 71,45%. Proses pendataan perempuan yang bekerja mandiri mengalami kesulitan karena tidak semua mendaftarkan diri di Disperindakop, sebagian besar usaha non formal (penjual gorengan, penjual makanan kecil keliling dan lain sebagainya).

d) Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik

Dari tabel 2.81 dapat dilihat partisipasi perempuan yang berkecimpung di dunia politik, terutama yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Temanggung pada tahun 2012-2016 sebanyak 8 orang dari total anggota DPRD 45 orang atau sebesar 18% dan sejak tahun 2014 bertambah menjadi 14 orang dari total anggota DPRD 45 orang atau sebesar 31%. Hal ini sudah sesuai ketentuan bahwa unsur perempuan dalam partai politik minimal 25%.

Tabel 2.81. Partisipasi perempuan dalam partai politik Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Liucian	Tahun					
INO	No Uraian		2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah perempuan yang	8	8	14	14	14	
	menjadi anggota DPRD	8 8		14	14	14	
2	Jumlah anggota DPRD	45	45	45	45	45	
3	Persentase perempuan yang	18%	18%	31%	31%	31%	
	menjadi anggota DPRD	1070	1070	5170	3170	3170	

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2017

e) Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan seksual meliputi: 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.

Tabel 2.82. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Ilmaian			Tahun		
No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah KDRT	88	89	62	16	15
2	Jumlah Rumah	192.080	193.096	208.874	194.116	252.796

	Tangga					
3	Rasio KDRT	1: 2.183	1:2158	1:6402	1:16.57 1	1:14.500

Sumber : Badan Pengendalian Penduduk KB PP dan PA Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel 2.82, KDRT di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, pada tahun 2015 sebanyak 16 kejadian menjadi 15 kejadian pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap perlindungan anak dan perempuan di keluarga.

f) Partisipasi Angkataan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung terlihat fluktuatif. Partisipasi terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 61,92%.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2011-2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.83.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2011-2016

Nic	Lingian	Tahun					
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bekerja	161.469	170.062	164.738	180.666	178.877	241.564
2	Mencari Kerja	-	_	-	-	_	
3	Angkatan Kerja	170.264	178.016	172.175	188.479	181.552	
4	Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,98	64,94	61,92	66,90	63,53	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2017

g) Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat memperhatikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Kegiatan supervisi dilaksanakan secara terpadu antara Women Child Center, BPPKBPPPA, Kejaksaan, Polres, Tim Penggerak PKK Kabupaten dan LSM Sahabat Perempuan. Jumlah kegiatan supervise penanganan korban kekerasan dan penanganan korban KDRT yang melapor tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2.84.
Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	No Uraian		Tahun				
NO			2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah kegiatan supervise	60	n.a.	n.a.	12	15	
2	Persentase korban KDRT yang melapor tertangani	100	100	100	85,71	100	

Sumber : Badan Pengendalian Penduduk KB PP dan PA Kabupaten Temanggung Tahun 2017

12) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a) Peserta KB

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dimana dicanangkan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB.

Tabel 2.85.

Jumlah Penduduk Peserta KB

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Toloren		Jumlah Penduduk Peserta KB					
INO	Tahun	PUS	Peserta KB	Tidak KB				
1	2012	151.148	125.845 (83.26%)	25.303 (16.74%)				
2	2013	140.757	113.432 (80.59%)	27.325 (19,41%)				
3	2014	140.016	111.498((79,63%)	28.518 (25,57%)				
4	2015	142.274	116.549 (81,92%)	25.725 (18,08%)				
5	2016	144.641	119.659 (82,73%)	24.982 (17,27%)				

Sumber : Badan Pengendalian Penduduk KB PP dan PA Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel 2.85 Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Temangung pada tahun 2016 dengan jumlah 144.641 pasangan. Dengan perincian yang mengikuti Keluarga Berencana sebanyak 119.659 pasangan (82,73%) dan yang tidak mengikuti Keluarga Berencana sebanyak 24.982 pasangan (17,27%).

b) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.86.
Rasio Akseptor KB
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Urajan			Tahun		
NO	Oralan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Akseptor KB	125.845	113.432	111.498	116.459	119.659
2	Jumlah Pasangan Usia subur	151.148	140.757	140.016	142.274	144.641
3	Rasio Akseptor KB	1:1,20	1:1,24	1:1,26	1:1,22	1:1,21

Sumber : Badan Pengendalian Penduduk KB PP dan PA Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c) Cakupan Peserta KB Aktif

Sedangkan persentase peserta KB aktif terhadap PUS di 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.87.

Tabel 2.87.
Persentase Peserta KB Aktif Terhadap PUS
Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

NO	Kecamatan	Peserta KB Aktif (PA)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Persentase PA terhadap PUS
1	Parakan	7.155	9.165	78,07
2	Kledung	4.293	5.190	82,72
3	Bansari	3.943	4.812	81,94
4	Bulu	7.394	8.804	83,98
5	Temanggung	11.333	13.521	83,82
6	Tlogomulyo	3.827	4.541	84,28
7	Tembarak	4.600	5.387	85,39
8	Selopampang	2.985	3.535	84,44
9	Kranggan	6.953	8.387	82,90
10	Pringsurat	8.301	9.718	85,42
11	Kaloran	7.139	8.576	83,24
12	Kandangan	7.604	9.398	80,91
13	Kedu	8.784	10.781	81,48
14	Ngadirejo	8.867	10.508	84,38
15	Jumo	4.479	5.567	80,46
16	Gemawang	5.404	6.829	79,13
17	Candiroto	4.692	5.665	82,82
18	Bejen	3.413	4.083	83,59
19	Tretep	4.217	5.125	82,29

NO	Kecamatan	Peserta KB Aktif (PA)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Persentase PA terhadap PUS	
20	Wonoboyo	4.276	5.049	84,69	
	Jumlah 119.659		144.641	82,73	

Sumber : Badan Pengendalian Penduduk KB PP dan PA Kabupaten Temanggung Tahun 2017

d) Tahapan Keluarga Sejahtera

Dengan pendekatan Pentahapan Keluarga Sejahtera maka keluarga diklasifikasikan menjadi Keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III Plus. Definisi dari klasifikasi keluarga sejahtera adalah sebagai berikut:

- Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal (agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan)
- Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi)
- Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan social psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan (menabung dan memperoleh informasi)
- Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan tetapi belum dapat memberi sumbangan/kontribusi terhadap masyarakat secara teratur dalam bentuk material dan keuangan, dan berperan aktif dalam lembaga di kemasyarakatan.

Tabel 2.88. Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Tahapan Keluarga	Tahun						
	Sejahtera (KK)	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Pra Sejahtera	51.172	48.044	53.866	n.a	n.a		
2	Sejahtera I	24.891	23.207	28.814				

No	Tahapan Keluarga	Tahun							
	Sejahtera (KK)	2012	2013	2014	2015	2016			
3	Sejahtera II	36.505	41.070	31.568					
4	Sejahtera III	100.518	101.512	102.280					
5	Sejahtera III Plus	4.598	5.765	7.981					

Sumber : Badan Pengendalian Penduduk KB PP dan PA Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Pendataan terakhir dilakukan pada tahun 2014, jadi data pada tahun 2015 dan 2016 data tidak tersedia. Keluarga sejahtera I, II, III, dan III Plus sudah beralih kewenangan, sehingga bukan merupakan kewenangan Kabupaten lagi.

13) Urusan Sosial

a) Sarana Sosial

Sarana sosial yang ada di Kabupaten Temanggung adalah panti asuhan anak, panti sosial bina netra dan panti sosial bina grahita. Secara rinci tersebut dalam tabel 2.89. Pada tahun 2015 jumlah sarana panti asuhan anak yang sudah terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dan mempunyai SIOP bertambah 2 panti yaitu Panti Asuhan Darul Mutaqien yang berada di Desa Ngadirejo Kecamatan Selopampang dan Panti Asuhan Darul Hadlonah Putra yang berada di Desa Campursari Kecamatan Bulu.

Tabel 2.89.
Perkembangan Sarana Sosial
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	TZ-vitvi-	Tahun							
	Kriteria	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Panti asuhan anak	6	6	6	8	8			
2	Panti sosial bina netra	1	1	1	1	1			
3	Panti sosial bina grahita	1	1	1	1	1			

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang memperoleh bantuan sosial selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2015 menurun menjadi 19,97%. Pada tahun 2016 jumlah tersebut mengalami kenaikan secara drastis sebanyak 22,17% menjadi 42,14%. Hal

ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya. Secara jelas tercantum pada tabel 2.90.

Tabel 2.90.

PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

		Tahun							
No	Kriteria	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	10.625	9.834	9.204	8.963	20.210			
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	45.898	45.898	45.003	44.877	47.955			
3	Persentase PMKS yang menerima bantuan	23,15	21,43	20,45	19,97	42,14			

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga/masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, sosial secara memadai dan wajar) (Depsos, 1004).

Tabel 2.91. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

		Tahun						
No	KATEGORI	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Anak jalanan	72	65	75	19	41		
2.	Penderita sakit jiwa	459	998	0	0	0		
3.	Gepeng	37	97	102	98	70		
4.	Tuna susila	9	17	12	3	9		
5.	Penderita HIV/AIDS	27	72	0	0	0		
6.	Penderita Narkoba	0	0	0	0	0		
7.	Penyandang cacat	7.662	7.391	7.331	6.749	6.073		
8.	Bekas narapidana	299	323	391	482	7.459		
9.	Korban NAPZA	28	49	35	59	753		
Jum	lah	8.593	9.012	7.946	7.410	14.405		

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2017

d) Penanganan Lansia

Salah satu penanganan urusan sosial adalah pelayanan terhadap penduduk lanjut usia (lansia). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Lansia adalah sesorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Jumlah lansia setiap tahun bertambah sebagaimana tabel 2.103. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, papan dan terlantar secara psikis, dan sosial.

Grafik 2.2.

Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2015



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2017

14) Urusan Ketenagakerjaan

a) Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja, Pengangguran Dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja menunjukkan jumlah penduduk dalam usia kerja yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Data tentang ketenagakerjaan dibedakan menjadi:

 Angkatan kerja yaitu penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau pekerja dan potensi penduduk yang

- akan masuk pasar kerja;
- Bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja;
- TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) adalah angka untuk menyatakan jumlah angkatan kerja yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja
- Kesempatan kerja (permintaan atas tenaga kerja) merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja);
- Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Data perkembangan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92.

Data Ketenagakerjaan

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian			Tahun		
NO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016
1	Angkatan Kerja	411.144	437.543	403.959	418.095	429.715
2	Bukan Angkatan Kerja	119.981	131.656	69.196	66.878	139.637
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) (%)	77,41	76.74	85,38	86,21	75,5
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka) (%)	3,40	4,86	5,86	4,08	1,5
5	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	96,60	95,14	94,14	95,92	98,5
6	Jumlah Pengangguran	13.975	16.519	26.673	17.065	6.459
7	Jumlah penduduk	531.125	569.199	473.155	484.973	569.352

No	Ilusian	Tahun						
	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016		
	usia kerja/produktif							

Sumber : Pusdatinaker Kemenaker RI - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja

Angka sengketa pengusaha-pekerja di Kabupaten Temanggung menurun pada tahun 2014 dan kembali meningkat tajam pada tahun 2015 dan 2016. Secara rinci perkembangan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik 2.3.

Grafik 2.3.

Angka Sengketa pengusaha-pekerja
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c) Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Jumlah pencari yang ditempatkan di kabupaten Temanggung tahun 2012-2016 terlihat fluktuatif, hal ini karena menyesuaikan dengan permintaan tenaga kerja yang ada dengan ketrampilan/latar belakang pendidikan pencari kerja yang mendaftar. Secara jelas terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93.
Pencari Kerja Yang Ditempatkan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

	Tahun						
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016		
Persentase penempatan pencari	23,48	33,33	75,38	70	35		
kerja yang mendaftarkan diri							

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2017

d) Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2012-2016 tidak ada perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah, hal ini karena adanya koordinasi dan kerjasama yang terjalin bagus sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan suasana menjadi kondusif.

15) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok orang demi kepentingan bersama.

Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun tingkat perkembangan koperasi dapat dilihat sebagai berikut:

a) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi aktif yaitu koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif dapat dilihat pada tabel 2.94.

Tabel 2.94.

Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Uraian	Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Jumlah total koperasi	473	485	485	509	602		
2	Jumlah koperasi aktif	383	405	409	430	524		
3	Persentase koperasi aktif	80,97	83,51	84,33	84,47	87,04		

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Jenis dan Jumlah Koperasi

Jenis koperasi di Kabupaten Temanggung dapat diklasifikasikan menjadi 22 (dua puluh dua) tipe sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 2.95.

Klasifikasi Jenis Koperasi

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO				Tahun		
NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	KOPERASI UNIT DESA	15	15	15	15	15
2	KOPPONTREN	23	23	23	23	23
3	KOPINKRA/KOPTI	2	3	3	3	3
4	KPRI	64	64	64	64	64
5	KOPKAR	29	29	24	24	29
6	KOP AD	1	1	1	1	1
7	KOP KEPOLISIAN	1	1	1	1	1
8	KOP SERBA USAHA	120	125	130	141	140
9	KOP PASAR	22	22	22	22	22
10	KOP SIMPAN PINJAM	59	47	47	59	68
11	KOP ANGKUTAN	4	23	23	24	32
12	KOP WANITA	1	1	1	1	1

NO	T.T.			Tahun		
NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
13	KOP PROFESI/TKBM	2	2	1	1	1
14	KOP VETERAN	1	1	1	1	1
15	KOP WREDATAMA	3	3	3	3	3
16	KOP PEPABRI	1	1	1	1	1
17	KOP MAHASISWA	1	1	1	1	2
18	KOP PEMUDA	5	5	5	5	5
19	KOP PEDAGANG KAKI LIMA	2	2	2	2	2
20	KOP PERTANIAN	78	78	79	79	150
21	KOP LAIN-LAIN	33	34	34	34	34
22	KOP SEKUNDER	4	4	4	4	4
	JUMLAH	471	485	485	509	602

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c) Jumlah BPR/LKM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Adapun jumlah BPR/LKM dapat dilihat dalam tabel 2.96.

Tabel 2.96.

Jumlah BPR/LKM

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NI-	T.T.		-	Tahun		
No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah BPR	21	21	21	21	23
2	Jumlah BMT dan KJKS	7	9	9	9	16
3	LKM					
	a. Komisi Ekonomi Kecamatan	20	20	20	-	-
	b. UKM	n.a	12	12	12	38
	c. KUBE	101	101	101	101	286
	d. PUAP	250	281	281	281	281

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dan BI data bulan November 2016

16) Bidang Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah pengeluaran atau perbelanjaan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

a) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)

Investor di Kabupaten Temanggung terdiri dari Investor PMDN dan PMA sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.97.
Nilai Investasi PMDN
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

	Per	setujuan	I	Realisasi
Tahun	Jumlah	Nilai Investasi (M)	Jumlah	Nilai Investasi (M)
	Investor	Miai ilivestasi (M)	Investor	Miai investasi (M)
2012	503	123.457	503	123.457
2013	1.200	99.810	1.200	99,810
2014	1.429	69.429	1.429	69.429
2015	2.666	124.679	2.666	124.679
2016	2.552	147.182	2.552	147.182

Sumber : Dinas Penanaman Modan dan PTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2017

17) Urusan Kebudayaan

a) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara rutin dilaksanakan di Kabupaten Temanggung dalam rangka mendukung kelestarian seni dan budaya Kabupaten Temanggung. Perkembangan jumlah kegiatannya secara jelas tampak pada tabel 2.98.

Tabel 2.98. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Vuitania			Tahun		
Kriteria	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah pertunjukan seni	11	2	°	4	5
budaya	11	ى ا	3	4	3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Temanggung ada di desa tempat budaya tersebut ada serta gedung pertemuan yang disediakan pemerintah daerah untuk kegiatan kesenian dan budaya, yaitu di Pendopo Pengayoman dan Gedung Pemuda dan Kebudayaan.

Budaya yang ada juga berkembang secara turun menurun dan biasanya dilakukan melalui upacara adat yang dilakuti sekelompok masyarakat di suatu wilayah. Tradisi Suran Traji di Desa Traji Kecamatan Ngadirejo pada setiap malam 1 (satu) Sura. Tradisi Nyadran Pete di Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan dan Desa Jetis Kecamatan Selopampang menjelang bulan ramadhan. Tradisi Nyadran Kali di Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung. Tradisi Nyadran Nyai Cemoro di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan. Tradisi Padusan di Pikatan Desa Mudal Kecamatan Temanggung pada satu hari sebelum bulan puasa. Tradisi Jumat Pahingan di Masjid Jami Desa Menggoro Kecamatan Tembarak pada setiap malam jumat pahing, dan lain-lain.

18) Urusan Pemuda dan Olahraga

a) Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2012-2016 jumlahnya tetap yaitu 7 buah seperti tercantum pada tabel 2.99.

Tabel 2.99.
Organisasi Pemuda
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Kriteria			Tahun		
Miteria	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah organisasi pemuda	7	7	7	7	7

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Jumlah Organisasi Olah Raga

Organisasi olahraga di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2012-2016 jumlahnya meningkat yaitu 57 buah organisasi pada tahun 2016 seperti tercantum pada tabel 2.100.

Tabel 2.100. Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Tahun						
2012	2013	2014	2015	2016		
56	56	57	57	57		
		2012 2013	2012 2013 2014	2012 2013 2014 2015		

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2012-2016 jumlahnya tetap yaitu 9 kegiatan seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.101.

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Kritorio	Tahun						
Kriteria	2012	2013	2014	2015	2016		
Jumlah kegiatan kepemudaaan	9	9	9	9	9		

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

d) Jumlah Kegiatan Olah Raga

Jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2012 jumlahnya meningkat dari 70 kegiatan menjadi 80 kegiatan pada tahun 2016 seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.102.

Jumlah Kegiatan Olahraga

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Kriteria -	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016		
Jumlah kegiatan olahraga	70	80	109	81	80		

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

e) Lapangan Olah Raga

Lapangan olahraga milik pemerintah kabupaten terdiri dari :

- Lapangan sepak bola (stadion Bumi Phala, Lapangan
 Sidorejo, Lapangan Sroyo dan lapangan Atletik)
- Lapangan basket satu buah
- Lapangan tenis empat buah
- Lapangan bulu tangkis satu buah.

Tabel 2.103.

Lapangan Olahraga

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Kriteria			Tahun		
	Kriteria	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah lapangan olahraga	800	815	798	798	806

a.Olahraga sepak bola	256	256	254	254	254
b.Olahraga futsal	11	15	15	15	15
c.Olahraga volley	365	365	358	358	358
d.Ola raga bulu tangkis	158	169	159	159	159
e.Olahraga basket	3	3	3	3	3
f.Olahraga tenis lapangan	7	7	7	7	15
g.Kolam renang	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Lapangan olahraga yang ada cukup dapat menampung minat masyarakat untuk berolahraga.

19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2012-2016 seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.104.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Kriteria			Tahun		
Miteria	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kegiatan	1	1	1	1	2

 $Sumber: Kantor\ Kesatuan\ Bangsa\ dan\ Politik\ Kabupaten\ Temanggung\ Tahun\ 2017$

b) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2012-2016 jumlahnya fluktuatif seperti tercantum pada tabel 2.105.

Tabel 2.105. Kegiatan pembinaan politik daerah Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Kriteria			Tahun		
Milleria	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kegiatan	1	2	2	5	1

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c) Jumlah Partai Politik

Jumlah partai politik di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2012-2015 jumlahnya sama yaitu 44 partai, akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penambahan menjadi 46 partai, seperti tercantum pada tabel 2.106. Sedangkan partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Temanggung ada 10

partai, yaitu PDIP, GOLKAR, PPP, PKB, PAN, GERINDRA, HANURA, NASDEM, PKS, dan DEMOKRAT.

Tabel 2.106. Jumlah Partai Politik Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Kriteria			Tahun		
Mitteria	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah partai politik	44	44	44	44	46

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2017

20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Rasio jumlah polisi pamong tersebut praja menggambarkan kapasitas Pemerintah dalam Daerah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.107.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah polisi pamong praja	182	137	126	122	121	
2.	Jumlah penduduk	821.517	746.313	731.061	788.264	803.745	
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja	1:4.514	1:5.447	1:5.802	1:6461	1:6.642	

Sumber: Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Jumlah Linmas Per 10.000 Jumlah Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Tabel 2.108. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah Linmas	9.158	8.879	8.789	8.797	9.158	
2.	Jumlah penduduk	821.517	746.313	731.061	788.264	803.745	
3.	Rasio	1:89	1:84	1:83	1:89	1:87	

Sumber: Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel 2.108 rasio jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk pada tahun 2012 sebesar 89 per penduduk dan pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 87 per penduduk.

c) Rasio poskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos siskamling merupakan perbandingan jumlah poskamling pada masing-masing desa/kelurahan pada periode tahun tertentu. Rasio ini menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Adapun rasio jumlah pos siskamling dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.109. Rasio Jumlah Poskamling Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

	1 00						
NO	Uraian	Tahun					
	Oraian	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah Poskamling	867	867	867	867	867	
2.	Jumlah Poskamling Aktif	867	867	867	867	466	
3.	Jumlah desa/kelurahan	289	289	289	289	289	
4.	Rasio jumlah poskamling per desa/kel	3:1	3:1	3:1	3:1	1,6:1	

Sumber : Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel 2.109 jumlah poskamling aktif pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah dikarenakan setelah dilakukan pendataan ulang hanya terdapat 466 poskamling yang aktif sehingga diperoleh rasio per desa/kelurahan 1,6:1.

d) Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Cakupan patroli petugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) adalah jumlah patroli petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam waktu 24 jam. Cakupan selama lima tahun terakhir tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.110.

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Uraian			Tahun		
	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan patroli petugas satpol polisi pamong praja	137	137	123	120	100

Sumber: Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2017

e) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran K3 yang dapat diselesaian dalam waktu 24 jam. Perkembangan selama lima tahun terakhir tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.111.
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Urajan	Tahun						
INO	No Craian	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah pelanggaran K3	3.806	1.200	965	263	638		
1.	(kasus)	0.000	1.200	300	200	000		
2.	Jumlah pelanggaran K3	3.806	1.200	965	263	638		
۷.	yang diselesaikan (kasus)	3.000	1.200	903	200	030		
3.	Tingkat penyelesaian	100	100	100	100	100		
J.	pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	100		

Sumber : Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2017

f) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten adalah jumlah mobil pemadam kebakaran dibagi jumlah penduduk kali 100. Perkembangan cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2012-2016 sebagaimana tersebut pada tabel 2.112.

Tabel 2.112.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Urajan			Tahun		
NO	NO Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah mobil pemadam kebakaran	4	4	4	5	12
2.	Jumlah penduduk	821.517	746.313	731.061	788.264	803.745
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	0,00048	0,00053 5	0,00054 7	0,00063 4	0,001493

Sumber : Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2017

g) Cakupan Kantor Pemerintahan Desa yang Baik

Persentase kantor pemerintahan desa menurut kondisi bangunan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 tersebut pada tabel 2.113.

Tabel 2.113. Cakupan Kantor Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Temanggung,Tahun 2016

NO	Kecamatan	Jumlah Desa	Kondisi Kantor Desa		Nama Desa yang Mempunyai Kantor Desa
		Desa	Baik	Rusak	Rusak
1.	Parakan	14	9	5	Traji, Watukumpul, Caturanom, Glapansari, Sunggingsari
2.	Kledung	13	13	0	-
3.	Bansari	13	9	4	Balesari, Tlogowero, Gentingsari (Tanurejo tidak punya)
4.	Bulu	19	12	7	Ngimbrang, Danupayan, Pakurejo, Malangsari, Wonotirto, Pengilon (Tegalurung tidak punya)
5.	Temanggung	6	6	0	-
6.	Tlogomulyo	12	12	0	-
7.	Tembarak	13	9	4	Jragan, Gandu, Krajan, Kemloko
8.	Selopampang	12	5	7	Tanggulanom, Jetis, Gambasan, Bagusan, Plumbon, Ngaditirto (Kebonagung tidak punya)
9.	Kranggan	12	8	4	Gentan, Purwosari, Pare, Bengkal
10.	Pringsurat	14	14	0	-
11.	Kaloran	14	8	6	Tlogowungu, Tleter, Geblog, Kemiri, Tempuran, Tegowanuh
12.	Kandangan	16	14	2	Baledu dan Rowo
13.	Kedu	14	12	2	Gondangwayang tidak punya
14.	Ngadirejo	19	17	2	Ngadirejo, Tegalrejo

NO	NO Kecamatan			i Kantor esa	Nama Desa yang Mempunyai Kantor Desa
			Baik	Rusak	Rusak
15.	Jumo	13	13	0	-
16.	Gemawang	10	7	3	Gemawang, Karangseneng, Krempong
17.	Candiroto	14	14	0	-
18.	Bejen	14	3	11	Bejen, Bansari, Jlegong, Prangkokan, Lowungu, Laranganluwok, Kebondalem, Kemuning, Selosabrang, Petung, Duren, Ngaliyan
19.	Tretep	11	6	5	Sigedong, Bonjor, Bojong, Simpar, Tlogo
20.	Wonoboyo	13	7	6	Purwosari, Kebonsari, Pesantren, Rejosari, Tawangsari, Wates
Jumlal	1	266	198	68	-
Cakup	Cakupan kantor desa yang baik (%)				74,44

Sumber : Bagian Pemdes Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2017

21) Urusan Pangan

Ketahanan pangan, sesuai definisi menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kondisi perkembangan capaian SPM ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel. 2.114.

Tabel 2.114.
Perkembangan Ketahanan Pangan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

KRITERIA	TAHUN							
KRITERIA	2012	2013	2014	2015	2016			
Ketersediaan energy dan protei	n perkapita	a						
a.Energi (Kkal/kapita/hari)	2.846,55	2.794,62	2.706	2.833	3.020			
b.Protein (Kkal/kapita/hari)	74,99	70,88	134,08	150,46	100,6			
Tingkat ketersediaan energy								
dan protein								
a.Energi (%)	129,39	127,03	169	128,8	137			
b.Protein (%)	131,56	124,35	253	263,16	176,5			
Tingkat konsumsi rata-rata					217			
Penduduk								
a.Energi (Kkal/kapita/hari)	2.246,00	2.194,50	2.320,4	1.828,1	2.077			
b.Protein (Kkal/kapita/hari)	60,00	55,20	62,1	50,4	66,3			
Tingkat konsumsi energy								
protein								
a.Energi (%)	112,30	109,70	116	91,4	110,8			

b.Protein (%)	115,38	96,84	119	96,9	127,5
Kecamatan yang mempunyai	80	80	85	82	n.a
cadangan pangan (%)					
Penguatan cadangan pangan	100	100	100	100	100
(%)					
Ketersediaan informasi	66.67	66.67	100	100	100
pasokan harga dan akses					
pangan					
Stabilitas harga dan pasokan	46.67	50	91	83,3	90
pangan (%)					
Skor pola pangan harapan	88	88,5	89,2	82,9	85,5
Penanganan kerawanan	100	-	100	100	100
pangan					

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Ketersediaan protein dan protein per kapita adalah berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2016 sebesar 100,6 gr/kap/hr.

22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

LPMD/LPMK mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPMD/ LPMK dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Adapun jumlah LPMD di Kabupaten Temanggung 266 dan LPMK 23 buah.

Pada setiap tahunnya LPMD/K dibina oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program desa/kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan SKPD terkait maupun program lainnya.

b) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga.

Pada setiap tahun dilaksanakan pembinaan khusus dan

terpadu melalui desa/kelurahan binaan baik oleh tingkat kecamatan/kabupaten. Jumlah kelompok binaan PKK berdasarkan data SIPD Tahun 2016 yaitu 1251 buah dengan jumlah yang aktif hanya 310 kelompok.

Ruang lingkup pembinaan TP.PKK baik desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah/pusat.

c) Jumlah LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat WNI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Adapun jumlah LSM aktif dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.115. Jumlah LSM Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016

	No Uraian			Tahun			
		2012	2013	2014	2015	2016	
	1.	Jumlah LSM terdaftar	36	25	42	42	45
	2.	Jumlah LSM aktif	36	25	28	28	22

Sumber : Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2017

23) Urusan Kearsipan

a) Pengelolaan Arsip Secara Baku

Pengelolan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Perkembangan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun 2012-2016 tersebut pada tabel 2.116.

Tabel 2.116.
Pengelolaan Arsip Secara Baku
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Uraian			Tahun		
Oraian	2012	2013	2014	2015	2016

Pengelolaan arsip secara baku oleh Perangkat Daerah	25	25	28	32	54
--	----	----	----	----	----

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan senantiasa dilaksanakan rutin pada setiap tahunnya karena belum semua Perangkat Daerah dan Desa menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Dalam rangka pengelolaan arsip secara baku pemerintah daerah melakukan pembinaan secara intensif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan monitoring kearsipan di lingkungan pemerintahan.

24) Urusan Komunikasi dan Informatika

a) Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi di Kabupaten Temanggung dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.117. Operator Telekomunikasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	NO Uraian	Tahun						
NO		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Jumlah operator telepon genggam	8	7	5	5	6		
2	Jumlah operator telepon stasioner	1	1	1	1	1		
3	Total operator telekomunikasi	9	8	6	6	7		

Sumber : PT. Telkom Indonesia Cabang Temanggung Tahun 2017

b) Rasio Warnet terhadap Penduduk

Rasio warnet terhadap penduduk adalah jumlah warnet dibagi jumlah penduduk kali 1.000. Perkembangan rasio warnet tahun 2012-2016 sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2.118. Rasio Warnet Terhadap penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No Jenis Kriteria Tahun		
-------------------------	--	--

		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah warnet	71	70	70	70	59
2 Jumlah penduduk	821.5	746.3	731.0	788.2	803.7	
	Jumian penduduk	17	13	61	64	45
2	Rasio warnet per 1000	0,08	0,09	0,09	0,08	0,07
3	penduduk	6	4	6	9	3

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c) Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Media Cetak mempunyai makna sebuah media yang menggunakan bahan dasar kertas atau kain untuk menyampaikan pesan-pesannya. Unsur-unsur utama adalah tulisan (teks), gambar visualisasi atau keduanya. Adapun jumlah media cetak di Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.119.

Jumlah Media Cetak (Surat Kabar)

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No Jenis Media				Tahun		
NO Jeili	Jenis Media	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Cetak Nasional	6	6	6	6	6
2.	Cetak Lokal	10	11	11	12	10

Sumber : Bagian Humas Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa media cetak nasional tahun 2016 berjumlah 6 (enam) media cetak yang beredar secara nasional yang beredar di Temanggung diantaranya adalah Tempo, Republika, Kompas, Media Indonesia, Sindo, dan Jawa Pos.

Sedangkan media cetak lokal pada tahun 2016 berjumlah 10 (sepuluh) yang beredar di Temanggung.

d) Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik (listrik) untuk mengakses kontennya. Media elektronik dibagi menjadi media radio dan televisi, sebagaimana tersebut pada uraian berikut ini.

Tabel 2.120. Jumlah Stasiun Radio dan TV Lokal Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No Jenis Media Tanun

		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Radio Nasional	4	4	4	4	17
2.	Radio Lokal	5	5	5	6	5
3.	TV Nasional	11	11	11	11	20
4.	TV Lokal	9	9	9	9	10

Sumber : Bagian Humas Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2017

e) Website Milik Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai website resmi milik pemda yaitu http://www.temanggungkab.go.id/. Website tersebut terhubung langsung dengan beberapa Perangkat Daerah yang juga sudah mempunyai website dan berada di bawah domain temanggungkab.go.id.

f) Pusat Jaringan dan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Temanggung

Pembangunan Jaringan online untuk mengkoneksikan seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan Pembangunan Pusat Jaringan dan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Temanggung terangkum pada tabel berikut.

Tabel 2.121.
Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

	Jo Uraian			Tahun		
No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Aplikasi Sistem Informasi	2	6	6	8	93
	Pemerintahan		0	0	0	93
2.			10	10	40	77
	Besaran Bandwith	8 Mb	Mb	Mb	Mb	Mb
3.	Perangkat Daerah terkoneksi	10	4	4	6	39
	online	10	4	4	Ö	39

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2017

25) Urusan Perpustakaan

a) Jumlah perpustakaan

Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Temanggung dapat dilhat dengan 6 (enam) indikator yaitu: jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah (Pemda), jumlah perpustakaan desa/kelurahan, jumlah perpustakaan SD/MI, dan jumlah

perpustakaan SMP/MTS. Data jumlah perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.122. Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016

NO) Urajan		Tahun					
NO Uraian	2012	2013	2014	2015	2016			
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1		
2.	Jumlah Perpustakaan desa/kelurahan	289	289	289	289	289		
3.	Jumlah Perpustakaan desa/kelurahan aktif	87	87	87	87	87		
4.	Jumlah perpustakaan SD/MI	301	313	313	578	578		
5.	Jumlah perpustakaan SMP/MTS	73	74	74	106	106		

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Jumlah pengunjung perpustakaan

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun, baik yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Adapun jumlah Pengunjung Perpustakaan dapat dilihat pada tabel 2.123.

Tabel 2.123.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemda
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Uraian			Tahun		
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah pengunjung	56.473	76.598	63.487	71.959	66.987

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan dapat dilihat pada tabel 2.124.

Tabel 2.124. Koleksi Buku Perpustakaan Milik Pemda Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian			Tahun		
No	Oralan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Koleksi Buku perpustakaan	39.346	41.946	43.086	44.814	49.174
2	Koleksi judul buku perpustakaan					

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Urusan Pertanian

a) Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia menghasilkan bahan pangan. Komoditas tanaman pangan Kabupaten Temanggung terdiri dari 7 (tujuh) jenis tanaman yaitu tanaman padi sawah, tanaman padi ladang, tanaman jagung, tanaman kacang kedelai, tanaman kacang tanah, tanaman ubi kayu, dan tanaman ubi jalar.

Tabel 2.125. Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

mixing								
			TAHUN					
JENIS DATA	2012	2013	2014	2015	2016			
Tanaman Padi Sawah								
- Luas tanam (ha)	25.687	26.618	25.375	21.689	30.667,2			
- Luas panen (ha)	25.753	25.678	26.175	25.403	30.667,0			
- Produktivitas (Kw/ha)	62	60	60,43	64,31	69,41			
Tanaman Padi Ladang								
- Luas tanam (ha)	404	1.465	25	0	0			
- Luas panen (ha)	552	852	891	0	0			
- Produktivitas (Kw/ha	37,80	37,15	38,80	0	0			
Tanaman Jagung								
- Luas tanam (ha)	23.254	23.839	21.450	15.355	17.390,8			
- Luas panen (ha)	24.872	22.331	22.865	19.190	20.803,4			
- Produktivitas (Kw/ha)	56	49,82	45,72	42,81	49,70			
Tanaman Kacang Kedelai								
- Luas tanam (ha)	9	4	n.a.	8	2,8			
- Luas panen (ha)	17	2	1	8	7,8			
- Produktivitas (Kw/ha)	19	21	20,92	22,67	20,51			

	TAHUN							
JENIS DATA	2012	2013	2014	2015	2016			
Tanaman Kacang Tanah								
- Luas tanam (ha)	579	388	269	294	347,4			
- Luas panen (ha)	653	440	210	341	300,8			
- Produktivitas (Kw/ha)	10,4	15,35	13,38	15,23	17,02			
Tanaman Ubi Kayu								
- Luas tanam (ha)	2.783	1.712	2.288	921	765,6			
- Luas panen (ha)	2.308	2.461	1.739	1.970	1.352,6			
- Produktivitas (Kw/ha)	244,8	257,35	302,69	242,58	321,6			
Tanaman Ubi Jalar								
- Luas tanam (ha)	224	251	199	197	283,1			
- Luas panen (ha)	115	280	251	219	129,5			
- Produktivitas (Kw/ha)	55	143.9	172,26	200,85	248,58			

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Perkebunan

Perkembangan sektor perkebunan dapat dilihat dari 10 (sepuluh) komoditas yaitu tanaman teh, tanaman kopi robusta, tanaman tembakau, tanaman kakao, tanaman lada, tanaman panili, tanaman tebu, tanaman kelapa, tanaman cengkeh, dan tanaman aren. Perkembangan komoditas tersebut dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 2.126.
Perkembangan Sektor Perkebunan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Jenis Data			Tahun		
Jenis Dala	2012	2013	2014	2015	2016
Tanaman Teh					
- Luas tanaman menghasilkan (ha)	6,17	5,25	5,25	5,25	5,25
- Luas tanaman (ha)	6,40	6,00	6,00	6,00	6
- Jumlah produksi (ton)	11,21	7,21	7,93	10,06	7,93
- Produktivitas (ton/ha)	1,82	1,37	1,51	1,916	1,51
Tanaman Kopi Robusta					
- Luas tanaman menghasilkan (ha)	7.610,29	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.158,55
- Luas tanaman (ha)	9.256,28	9.304,47	9.304,47	9.561,55	9.304,47
- Jumlah produksi (ton)	8.518,45	7.388,79	10.254,33	7.536,49	10.254,33
- Produktivitas (ton/ha)	1,10	0,90	1,25	0,924	1,26
Tanaman Kopi Arabika					
- Luas Tanaman Menghasilkan (ha)	1.048,57	1.377,82	1.377,82	1.377,82	1.378,57
- Luas Tanaman (ha)	1.429,48	1.463,93	1.743,93	1.840,30	1.463,93
- Jumlah Produksi (ton)	991,63	1.027,11	1.405,96	1.109,42	1.305,96
- Produktivitas (ton/ha)	0,95	0,74	0,94	0,805	0,95
Tanaman Tembakau					
- Luas panen (ha)	15.587,5	14.517,00	12.587,00	18.248	16.821
- Luas tanam (ha)	0	14.948,00	15.730,00	19.209	17.021
- Jumlah produksi (ton)	15.587,5	7.146,12	6,922,92	10.581,3	6.041,25
	0	0,49	0,55	0,58	0,53

Jania Data			Tahun		
Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
- Produktivitas (ton/ha)	9.978,50				
Tanaman Kakao	0,64	179,66	179,66	179,66	179,66
- Luas tanaman menghasilkan (ha)		258,01	258,01	256,80	258,01
- Luas tanaman (ha)	228,80	46,12	40,50	137,65	145,33
- Jumlah produksi (ton)	528,60	0,25	0,22	0,766	0,81
- Produktivitas (ton/ha)	181,14				
	0,79				
Tanaman Lada		10,42	10,42	10,42	10,42
- Luas tanaman menghasilkan (ha)		15,91	15,91	15,91	15,91
- Luas tanaman (ha)	10,42	8,54	7,44	8,23	7,44
- Jumlah produksi (ton)	15,91	0,82	0,71	0,79	0,71
- Produktivitas (ton/ha)	9,14				
Tanaman panili	0,88	24,34	20,59	20,59	20,59
- Luas tanaman menghasilkan (ha)		34,14	34,14	32,20	34,14
- Luas tanaman (ha)	60,24	6,39	5,32	9,69	5,32
- Jumlah produksi (ton)	73,43	0,26	0,21	0,471	0,26
- Produktivitas (ton/ha)	13,68				
	0,22				
Tanaman Tebu		214,98	214,98	168,22	128,96
- Luas panen (ha)		209,98	214,98	168,22	128,96
- Luas tanam (ha)	210,08	1.139,63	668,70	8,499	6.824,16
Jumlah produksi (ton)Produktivitas (ton/ha)	210,08	5,30	3,10	0,492	5,29
- Produktivitas (tori/ria)	1.002,63 4,77	1.712,72	1.712,72	1.712,72	1.722,17
Tanaman Kelapa	4,77	1.934,42	1.934,42	1.929,21	1.934,42
- Luas tanaman menghasilkan (ha)	1.637,66	1.193,23	1.178,37	876,57	1.178,37
- Luas tanaman (ha)	1.942,37	0,69	0,68	0,51	0,68
- Jumlah produksi (ton)	1.150,85				
- Produktivitas (ton/ha)	0,70				
Tanaman Cengkeh		871,96	871,96	871,96	452,40
- Luas tanaman menghasilkan (ha)		1.377,04	1.417,04	1.466,30	1.377,04
- Luas tanaman (ha)	865,26	167,14	203,80	132,88	203,80
- Jumlah produksi (ton)	1.347,04	0,19	0,23	0,152	0,45
- Produktivitas (ton/ha)	185,53			•	
	0,21				
Tanaman Aren		296,67	378,65	378,65	378,65
- Luas tanaman menghasilkan (ha)		471,46	471,46	469,30	471,46
- Luas tanaman (ha)	296,67	877,62	1.054,39	1.195,46	38,86
- Jumlah produksi (ton)	469,96	2,96	2,78	3,157	0,10
- Produktivitas (ton/ha)	922,06				
	3,11				

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c) Peternakan

Peternakan adalah usaha budidaya ternak untuk diambil manfaatnya. Potensi peternakan yang ada di Kabupaten Temanggung cukup beragam, antara lain ternak sapi potong, sapi perah, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik, burung puyuh, dan angsa. yang terlihat dalam tabel 2.127.

Tabel 2.127.
Perkembangan Sektor Peternakan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

	Tahun					
Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016	
Sapi Potong						
- Jumlah populasi (ekor)	43.515	27.282	29.115	32.665	32.830	
- Jumlah produksi (ton)	720,00	365,06	3878	519,624	622.934	
- Jumlah pemotongan/th (ekor)	4.500	2.296	0,82	3.093	3.686	
- Laju pertumbuhan populasi/th (%)	7,95	- 37,61	1,6	1	1	
- Rata-rata kepemilikan per peternak	4	2	-	2	2	
(ekor)						
Cari Danah						
Sapi Perah		004	040	200	275	
- Jumlah populasi (ekor)	247	264	246	269	275	
- Jumlah produksi susu/th (liter)	730.256	737.688	680.625	175.512	223.200	
- Laju pertumbuhan (%)	19	4,76	0,74	0,01	0,01	
- Rata-rata kepemilikan per peternak (ekor)	5	5	5	-	1,3	
- Rata-rata produktivitas ekor/hari (liter)	14,4	14,5	15	12	10	
Jumlah populasi kambing (ekor)	_	61.098	70.046	75.685	75.685	
Jumlah populasi domba (ekor)	58.731	287.584	286.058	350.770	350.770	
Jumlah populasi babi (ekor)	270.497	267.364 78	84	85	87	
	209		_		1.464	
Jumlah populasi kerbau (ekor)	1.392	1.411	1.425	1.434		
Jumlah populasi kuda (ekor) Jumlah populasi kelinci (ekor)	444	447 9.756	451 9.856	453 9.859	461 9.880	
Junian populasi kelilici (ekor)	9.360	9.750	9.000	9.009	9.000	
Ternak unggas						
a. Populasi ayam buras (ekor)		1.659.835	1.862.390	1.877.909	1.884.775	
b. Ayam petelur	1.658.996	1.003.000	1.002.330	1.077.303	1.004.773	
- Junlah populasi (ekor)		686.825	681.503	682.641	684.235	
- Jumlah produksi telur (ton)	678.694	4.464	4.480,31	4.445	7.328	
- Jumlah peternak (orang)	4.431	68	70	50	50	
- Kepemilikan/peternak (ekor)	67	10.000	10.000	13.500	13.500	
c. Ayam Pedaging	10.000	10.000	10.000	13.300	15.500	
- Junlah populasi (ekor)	=00 ==0	600.000	786.136	933.967	4.759.500	
- Jumlah peternak (orang)	588.550	130	150	125	125	
- Jumlah produksi daging(ton)	125	5.199	7.861	1.238	3.962	
- Kepemilikan/peternak (ekor)	5.100	4.615	5.000	7.000	7.000	
d. Itik	4.708	4.010	3.000	7.000	7.000	
- Jumlah populasi (ekor)	101 005	102.838	102.145	102.190	102.405	
- Jumlah peternak (orang)	101.805	5.120	5.120	13.372	13.372	
- Jumlah produksi telur (ton)	5.090	664	659,47	660	661	
- Kepemilikan/peternak(ekor)	658	20	20	8	8	
e. Populasi Itik Manila (ekor)	20	24.977	24.950	24.975	25.034	
f. Populasi Burung puyuh (ekor)	24.865	51.255	51.357	18.745	51.605	
g. Populasi Burung Merpati (ekor)	51.410	23.064	23.064	33.707	33.775	
h. Populasi Angsa (ekor)	22.928	18.758	18.745	51.476	18.781	
iii. i opulusi Aligsu (choi)	18.762	10.700	10.143	31.470	10.701	

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

d) Bidang Kehutanan

Kabupaten Temanggung memiliki hutan negara/rakyat seluas 8.399 Ha. Hutan negara/rakyat merupakan hutan produksi yang menghasilkan kayu. Selain sebagai hutan produksi juga sebagai kawasan konservasi, yang berfungsi untuk mengurangi lahan kritis dan meningkatkan produktivitas lahan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2016, Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan beralih kewenangan dari kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi.

2) Urusan Energi, Sumber Daya Mineral

a) Pertambangan tanpa ijin

Kabupaten Temanggung bukan merupakan daerah pertambangan, namun ada beberapa lokasi yang sebagian masyarakat melakukan penambangan pasir tanpa ijin.

Beberapa lokasi sudah ditutup oleh pemerintah daerah dan tanahnya dibeli pemda untuk dilaksanakan reklamasi. Lokasi bekas penambangan pasir di Desa Kledung saat ini menjadi lokasi Rest Area. Ada salah satu lokasi penambangan pasir tanpa ijin yang juga sudah dibeli pemda dan dinyatakan sebagai lokasi cagar budaya yaitu Situs Liyangan di Desa Purbasari Kecamatan Ngadirejo.

3) Urusan Pariwisata

a) Kunjungan Wisata dan Tempat Wisata/Cagar Budaya

Jumlah wisatawan di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini karena adanya beberapa tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, antara lain adalah Pikatan water park dan Posong. Tempat wisata yang baru berkembang dan mampu menarik wisatawan berkunjung adalah tempat wisata berbasis alam, antara lain Sedengkeng, Sedhadap, Watu Layah, Watu Angkrik, beraneka Curug, dan beraneka Embung. Salah satu cagar budaya yang menarik wisatawan adalah Situs Liyangan.

Perkembangan wisatawan tahun 2012-2016 sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2.128.
Perkembangan Wisatawan (jiwa)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No Uraian			Tahun						
NO Claian	2012	2013	2014	2015	2016				
1.	Jumlah wisatawan manca negara	77	21	155	8	381			
2.	Jumlah wisatawan domestik	360.061	269.614	338.781	150.945	446.497			

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2017

4) Urusan Kelautan dan Perikanan

Perkembangan sektor perikanan dapat dilihat dari

perkembangan empat hal, yaitu kolam air tenang, sawah/mina padi, perairan umum, dan unit pembenihan rakyat yang dapat dilihat di tabel 2.129.

Tabel 2.129.
Perkembangan Sektor Perikanan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Jonio Deta			Tahur	1	
Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Kolam air tenang					
- Luas areal (ha)	117,88	119,29	120,25	120,29	121,85
- Produksi ikan nila (ton)	335,8	414,71	519,59	619,06	837,35
- Produksi ikan lele (ton)	1.225,5	1.513,49	1.946,59	2.182,97	2.826,45
- Produksi ikan gurami (ton)	3,18	3,93	3,94	3,25	54,14
- Produksi ikan mas (ton)	277,13	342,26	364,15	n.a	n.a
- Produksi ikan patin (ton)	3,37	4,16	n.a.	n.a	n.a
- Produksi ikan lainnya (ton)	19,10	23,59	25,65	29,33	32.99
- Nilai produksi (juta)	34.321,45	54.037,84	45.691,21	63.957,99	66.212.688
Sawah/mina padi					
- Luas areal (ha)	3.064,97	3.127,80	3.190,39	1.351,2	3.251.2
- Produksi ikan mas (ton)	932,39	1.152,26	1.323,42	1.182,99	1.777,698
- Produksi ikan nila (ton)	219,35	270,96	445,09	788,65	1.185,124
- Nilai produksi (juta)	24.851,34	28.532,80	42.451,77	46.925.050	51.509.016
Perairan Umum					
- Luas areal (ha)	21.456	21.456	21.506	21.506	21.506
- Produksi (ton)	121,28	181,92	239,01	299.534	427.278
- Nilai produksi (juta)	2.482,72	3.755,70	5.482,15	10.255.866	14.313.089
Unit Pembenihan Rakyat					
- Jumlah (unit)	255	275	275	267	267
- Produksi usaha (juta ekor)	51,68	68,90	78.038,998	84.019.819	89.853.319
- Nilai produksi (juta)	6.610,80	12.890,50	16.830.69	12.602.972.850	23.092.302.983
Produksi ikan hias (ekor)	540.220	702.000	n.a.	n.a	n.a

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

5) Urusan Perdagangan

Perdagangan di Kabupaten Temanggung didukung dengan sarana prasarana pasar daerah, pasar desa dan pasar modern. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.130.

Tabel 2.130. Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

No	Kasamatan	Pasar L	Jmum	Pasar H	lewan	Pasar I	Buah	Pasar	Ikan	Jumlah
No	Kecamatan	daerah	desa	daerah	desa	daerah	desa	daerah	desa	Juillian
1	Parakan	2	1	0	0	0	0	0	1	4
2	Kledung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bansari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bulu	0	1	0	0	0	0	0	1	2
5	Temanggung	1	1	1	0	0	0	0	0	3
6	Tlogomulyo	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7	Tembarak	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8	Selopampang	0	1	0	1	0	0	0	0	2
9	Kranggan	1	1	0	1	0	0	0	0	3
10	Pringsurat	1	1	1	2	1	1	0	0	6
11	Kaloran	0	4	0	1	0	0	0	0	5
12	Kandangan	0	4	0	1	0	0	0	0	5
13	Kedu	0	1	0	0	0	0	0	0	1
14	Ngadirejo	1	0	1	0	0	0	0	0	2
15	Jumo	0	1	0	1	0	0	0	0	2
16	Gemawang	0	2	0	1	0	0	0	0	3
17	Candiroto	1	0	0	0	0	0	0	0	1
18	Bejen	0	1	0	0	0	0	0	0	1
19	Tretep	0	1	0	0	0	0	0	0	1
20	Wonoboyo	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	Jumlah	7	24	3	8	0	1	0	2	45

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2017

a) Jumlah SPBU dan SPBE

Jumlah SPBU dan SPBE di Kabupaten Temanggung secara rinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.131. Nama dan Alamat SPBU – SPBE

Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

No	Uraian
1	Nomor dan Alamat SPBU
1.1	Nomor : 44.562.01, di Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo
1.2	Nomor : 44.562.02, di Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat
1.3	Nomor : 44.562.03,di Desa Candimulyo Kecamatan Kedu
1.4	Nomor : 44.562.04,di Jalan Suwandi Suwardi Kecamatan Temanggung
1.5	Nomor : 44.562.05,di Jalan Raya Kedu Parakan Kecamatan Kedu
1.6	Nomor : 44.562.06,di Desa Bengkal Kecamatan Kranggan
1.7	Nomor : 44.562.07,di Desa Caturanom Kecamatan Parakan
1.8	Nomor : 44.562.08,di Desa Danupayan Kecamatan Bulu
1.9	Nomor : 44.562.09,di Desa Candiroto Kecamatan Candiroto
1.10	Nomor : 44.562.10,di Desa Manden Kecamatan Parakan
1.11	Nomor : 44.562.11,di Desa Kledung Kecamatan Kledung
1.12	Nomor : 44.562.12,di Jalan Tembus Kranggan Pringsurat Desa Nguwet
1.12	Kecamatan Kranggan
1.13	Nomor: 44.562.13, di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Manding
1.14	Nomor : 44.562.14, di Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo
2	Nama dan Alamat SPBE
2.1	PT. Usaha Dua Sahabat, di Jalan Raya Kranggan-Pringsurat
2.2	PT. Mitra Manunggal Perkasa, di Jalan Raya Kedu-Parakan (Mojotengah
2.2	Kedu Temanggung)

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2017

6) Urusan Perindustrian

Perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari 3 (tiga) jenis industri yaitu mikro dan kecil, menengah, dan besar sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.132.

Tabel 2.132.
Perkembangan Sektor Perindustrian
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Kriteria			Tahun		
	2012	2013	2014	2015	2016
Industri Mikro dan Kecil					
- Unit kerja (unit)	15.707	15.731	15.725	15.848	15.848
- Tenaga Kerja (orang)	64.892	64.940	56.480	58.230	58.230
- Nilai produksi(juta rupiah)	862.352	862.585	862.965	880.224	880.235
Industri Menengah					
- Unit kerja (unit)	46	47	50	53	54
- Tenaga Kerja (orang)	1.897	1.995	4.415	4.675	4.774
- Nilai Produksi (juta rupiah)	-	-	-	-	-
Industri Besar					
- Unit kerja (unit)	28	30	38	38	38
- Tenaga Kerja (orang)	12.792	12.993	23.902	24.405	24.405
- Nilai produksi (juta rupiah)	2.013.000	2.815.257	2.138.079	2.180.841	2.180.855
Nilai Ekspor (\$ US)					
-Kayu olahan	108.406.133,6	150.927.864,90	149.986.530,34	140.632.388,06	233.202.703
-Non kayu olahan	6.603.021,04	353.088,33	n.a	25.397,00	1.022.665

Kriteria							
	2012	2013	2014	2015	2016		

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.133. Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

No			Uraian						
INO	Viitorio	Perusahaa	Tenaga	Jumlah	Nilai				
	Kriteria		kerja		produksi				
		n	(orang)	produksi	(Rp)				
	INDUSTRI PANGAN								
1	Pemotongan hewan	24	133	180	4.186				
$ $ $_{2}$ $ $	Pengolahan buah	31	99	47,84	910				
	(dalam botol)	51	33	47,04					
3	Pisang aroma	16	159	709,28	3.021,20				
4	Jahe instan	4	15	20,80	314,08				
5	Susu segar	1	23	2.789	1.716				
6	Susu kedelai	5	15	728	52				
7	Pembersihan kopi	954	3080	1.200	6.500				
_	Tepung jagung	5	21	244,40	832				
9	Tepung tapioka	16	76	294,32	780				
10	Ransum pakan	4	36	1.433,12	3.432				
	ternak								
11	Roti dan sejenisnya	71	328	561,6	6.136				
12	Gula aren	1.224	2.524	676	8.065				
13	Glukosa	1	13	140,40	364				
14	Sirup	1	5	21.994	187,2				
15	Mie	1	8	280,80	660,40				
16	Pembungkus teh	2	6	0	31,2				
17	Kopi bubuk	145	335	62,40	4.686				
18	Es	23	57	72,8	312				
19	Kecap	7	37	497,12	1.248				
	Tempe	492	909	4.420	16.432				
-	Tahu	109	468	4.971,2	13.728				
22	Kedele goreng	4	16	24,96	119,60				
23	Kacang telur	12	32	36,40	260				
24	Kerupuk dan	1.709	5.995	9.271,6	30.992				
05	sejenisnya	0.1	F0.	00.40	70.00				
-	Tape ketela	31	52	62,40	72,80				
26	Kue basah	473	1.891	988	9.152				
27	Makanan lain (jamur dan madu)	7	24	36,4	676				
	Air minum dalam								
28	kemasan	3	160	780.000	6.832,8				
29	Rokok cerutu	1	48	5,72	1.768				
30	Cengkeh rajangan	3	11	8,32	130				
55	Pengeringan dan	3	11	0,02	100				
31	pengolahan	3.360	24.939	13.520	2.792,4				
	tembakau	0.000	21.000	10.020	2.702,1				
	СПОШМИ								
	INDUSTRI SANDANG								
1	Rajutan	173	237	15.700	260				
2	Kasur dan bantal	19	42	832	81,12				

1			Uraian						
Rerja Produksi Produksi Rerja Produksi Repja Ratik G	No	Kritorio	Dorugahaa	Tenaga	Jumlah	Nilai			
Replication	NO	Killella		kerja		produksi			
4 Batik			11	(orang)	produksi	(Rp)			
5 Pakaian kesenian 5 16 12.480 590. 6 Training pack 10 35 12.480 296. 7 Masker, kain pel, dan lain-lain 7 22 34.320 31.3 8 Pengawetan kulit 1 3 624 83.3 9 Barang dari kulit 2 6 644	3	Pakaian jadi	138	367	6.032	1.508			
6 Training pack 10 35 12.480 296.6 7 Masker, kain pel, dan lain-lain 7 22 34.320 31.3 8 Pengawetan kulit 1 3 624 83.3 9 Barang dari kulit 2 6 644 31.3 10 Alas kaki/sepatu 2 7 700 20.3 1 Ubi kayu 1 2.816 65.832 520.3 2 Panel 28 6.641 86.840 660.4 kayu/Balken/papan 423 2.750 639.600 18.7 4 Percetakan 18 85 520.000 2.1 5 Foto copy 20 46 4.120 3 6 Cetak film 7 15 156 66 7 Pupuk alam 6 458 239.20 67.6 8 Sabun 3 9 35.36 7. 9 Vulkanisir ban	4	Batik	6	22	2.132	728			
Masker, kain pel, dan lain-lain 7	5	Pakaian kesenian	5	16	12.480	590,72			
Masker, kain pel, dan lain-lain 7	6	Training pack	10	35	12.480	296,40			
Iain-lain	_		_						
9 Barang dari kulit 2 6 644 10 Alas kaki/sepatu 2 7 700 20.0	7	_	7	22	34.320	31,20			
9 Barang dari kulit 2 6 644 10 Alas kaki/sepatu 2 7 700 20.0	8	Pengawetan kulit	1	3	624	83,20			
10 Alas kaki/sepatu 2 7 700 20.5	9		2	6	644	78			
INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN	10		2	7	700	20,80			
1		, 1				,			
Ubi kayu		INDUSTRI KIMIA DAN	BAHAN BANGI	UNAN					
2 Panel kayu/Balken/papan 28 6.641 86.840 660.44 3 Moulding dan bahan bangunan 423 2.750 639.600 18.75 4 Percetakan 18 85 520.000 2.11 5 Foto copy 20 46 4.120 3 6 Cetak film 7 15 156 6 7 Pupuk alam 6 458 239.20 67.66 8 Sabun 3 9 35.36 7.3 9 Vulkanisir ban 5 13 884 11 10 Minyak atsiri 3 9 5.20 98 11 Kemasan plastik 1 60 728.000 894, 12 Tas plastik 46 130 35.360 88, 13 Daur ulang plastik 3 37 239.2 20 14 Batu bata 328 1.073 18.720.000 4.4 15	1		1	i	65.832	520.312			
Rayu/Balken/papan		•			00.002	020,012			
Moulding dan bahan banguman 423 2.750 639.600 18.75	2		28	6.641	86.840	660.400			
Bangunan									
4 Percetakan	3	_	423	2.750	639.600	18.720			
5 Foto copy 20 46 4.120 3 6 Cetak film 7 15 156 66 7 Pupuk alam 6 458 239.20 67.66 8 Sabun 3 9 35.36 7.3 9 Vulkanisir ban 5 13 884 10 10 Minyak atsiri 3 9 5.20 98 11 Kemasan plastik 1 60 728.000 894. 12 Tas plastik 46 130 35.360 88. 13 Daur ulang plastik 3 37 239.2 20 14 Batu bata 328 1.073 18.720.000 4.42 15 Genteng 575 1.820 15.600.000 7.5 16 Gips 9 40 6.670 218 17 Barang dari semen 9 33 28.080 72 18 Furnitur kayu	4		18	85	520,000	2.184			
6 Cetak film 7 15 156 66 7 Pupuk alam 6 458 239,20 67.66 8 Sabun 3 9 35,36 7.7 9 Vulkanisir ban 5 13 884 10 10 Minyak atsiri 3 9 5,20 98 11 Kemasan plastik 1 60 728,000 894, 12 Tas plastik 46 130 35,360 88, 13 Daur ulang plastik 3 37 239,2 20 14 Batu bata 328 1,073 18,720,000 4.4 15 Genteng 575 1,820 15,600,000 7.5 16 Gips 9 40 6,670 218 17 Barang dari semen 9 33 28,080 7.7 18 Furnitur kayu 135 344 52,000 5.8 20 Furnitur bambu <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>312</td>				-		312			
7 Pupuk alam 6 458 239,20 67.66 8 Sabun 3 9 35,36 7.3 9 Vulkanisir ban 5 13 884 16 10 Minyak atsiri 3 9 5,20 98 11 Kemasan plastik 1 60 728,000 894,4 12 Tas plastik 46 130 35,360 88,4 12 Tas plastik 46 130 35,360 88,4 12 Tas plastik 46 130 35,360 88,4 13 Daur ulang plastik 3 37 239,2 20 14 Batu bata 328 1,073 18,720,000 4.4* 15 Genteng 575 1,820 15,600,000 7.5* 16 Gips 9 40 6,670 218 17 Barang dari semen 9 33 28,080 7. 18 Furnitu				 		624			
8 Sabun 3 9 35,36 7.3 9 Vulkanisir ban 5 13 884 16 10 Minyak atsiri 3 9 5,20 98 11 Kemasan plastik 1 60 728,000 894. 12 Tas plastik 46 130 35,360 88. 13 Daur ulang plastik 3 37 239.2 20 14 Batu bata 328 1.073 18.720.000 4.4 15 Genteng 575 1.820 15.600.000 7.5 16 Gips 9 40 6.670 218 17 Barang dari semen 9 33 28.080 7.7 18 Furnitur kayu 135 344 52.000 6.0 19 Furnitur cat duco 8 98 5.200 5.8 20 Furnitur bambu 4 16 124,8 93,4 1 Teral			-	-		67.600			
9 Vulkanisir ban 5 13 884 10 10 Minyak atsiri 3 9 5,20 98 11 Kemasan plastik 1 60 728,000 894,4 12 Tas plastik 46 130 35,360 88,6 13 Daur ulang plastik 3 37 239,2 2 14 Batu bata 328 1,073 18,720,000 4,4 15 Genteng 575 1,820 15,600,000 7,5 16 Gips 9 40 6,670 218 17 Barang dari semen 9 33 28,080 7 18 Furnitur kayu 135 344 52,000 6,0 19 Furnitur cat duco 8 98 5,200 5,8 20 Furnitur bambu 4 16 124,8 93, 1 Teralis besi 12 46 915,2 1,060 2			l			7,28			
10 Minyak atsiri			-	<u> </u>					
11 Kemasan plastik				 		104			
Tas plastik		· ·			· · · · · ·	98,8			
13 Daur ulang plastik 3 37 239,2 29 29 21 14 Batu bata 328 1.073 18.720.000 4.44 15 Genteng 575 1.820 15.600.000 7.5 16 Gips 9 40 6.670 218 17 Barang dari semen 9 33 28.080 73 18 Furnitur kayu 135 344 52.000 6.03 19 Furnitur cat duco 8 98 5.200 5.83 20 Furnitur bambu 4 16 124.8 93.4 16 124.8 93.4 17 124 244.4 436 3 Pande besi 2 4 1.300 39.3 18 48 811.2 19 18 18 18 18 19 18 18									
14 Batu bata 328 1.073 18.720.000 4.4: 15 Genteng 575 1.820 15.600.000 7.5: 16 Gips 9 40 6.670 218 17 Barang dari semen 9 33 28.080 7. 18 Furnitur kayu 135 344 52.000 6.00 19 Furnitur cat duco 8 98 5.200 5.8: 20 Furnitur bambu 4 16 124,8 93,4 INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA 1 Teralis besi 12 46 915,2 1.060 2 Las 77 124 244,4 436 3 Pande besi 2 4 1.300 39,3 4 Mesin perajang tembakau 16 70 780 2.131 5 Alat perajang tembakau 18 48 811,2 15 6 Penetas telur 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>88,40</td></td<>				-		88,40			
15 Genteng 575 1.820 15.600.000 7.5-16 Gips 9 40 6.670 218 17			l	 		260			
16 Gips 9 40 6.670 218 17 Barang dari semen 9 33 28.080 73 18 Furnitur kayu 135 344 52.000 6.03 19 Furnitur cat duco 8 98 5.200 5.83 20 Furnitur bambu 4 16 124,8 93,4 INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA 1 Teralis besi 12 46 915,2 1.060 2 Las 77 124 244,4 436 3 Pande besi 2 4 1.300 39,3 4 Mesin perajang tembakau 16 70 780 2.131 5 Alat perajang tembakau 18 48 811,2 9 6 Penetas telur 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 20			1			4.420			
17 Barang dari semen 9 33 28.080 73 18 Furnitur kayu 135 344 52.000 6.03 19 Furnitur cat duco 8 98 5.200 5.83 20 Furnitur bambu 4 16 124,8 93,4 20 Furnitur bambu 4 16 124,8 93,4 30 INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA 3 24 915,2 1.060 2 Las 77 124 244,4 436 3 Pande besi 2 4 1.300 39,3 4 Mesin perajang tembakau 16 70 780 2.131 5 Alat perajang tembakau 18 48 811,2 39,5 6 Penetas telur 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 20 <				-		7.540			
18 Furnitur kayu 135 344 52.000 6.00 19 Furnitur cat duco 8 98 5.200 5.80 20 Furnitur bambu 4 16 124,8 93,0 20 Furnitur bambu 4 16 124,8 93,0 30 INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA 4 46 915,2 1.060 2 Las 77 124 244,4 436 3 Pande besi 2 4 1.300 39,3 4 Mesin perajang tembakau 16 70 780 2.131 5 Alat perajang tembakau 18 48 811,2 91,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 20 9 Pemeliharan dan reparasi mobil 41 244 3.016 3.22 10 Pemeliharan dan reparasi elektronika 15 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>218,4</td>						218,4			
19 Furnitur cat duco						728			
20 Furnitur bambu 4 16 124,8 93,0 INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA 1 Teralis besi 12 46 915,2 1.060 2 Las 77 124 244,4 436 3 Pande besi 2 4 1.300 39,0 4 Mesin perajang 16 70 780 2.131 5 Alat perajang 18 48 811,2 6 Penetas telur 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 20 9 Pemeliharaan dan 41 244 3.016 3.20 10 Pemeliharan dan 47 72 91.520 3.20 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83.50 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN 10 10 10 10 10 10 10 1						6.032			
INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA 1 Teralis besi 12 46 915,2 1.060 2 Las 77 124 244,4 436 3 Pande besi 2 4 1.300 39,3 4 Mesin perajang 16 70 780 2.131 5 Alat perajang 18 48 811,2 5 Embakau 19 Pemetas telur 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 15 15 15 15 15 15 1						5.824			
1 Teralis besi 12 46 915,2 1.060 2 Las 77 124 244,4 436 3 Pande besi 2 4 1.300 39,3 4 Mesin perajang tembakau 16 70 780 2.131 5 Alat perajang tembakau 18 48 811,2 31 6 Penetas telur 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 20 9 Pemeliharan dan reparasi mobil 41 244 3.016 3.22 10 Pemeliharan dan reparasi spd motor 47 72 91.520 3.23 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83,3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN 4 2 93,60 15	20	Furnitur bambu	4	16	124,8	93,60			
1 Teralis besi 12 46 915,2 1.060 2 Las 77 124 244,4 436 3 Pande besi 2 4 1.300 39,3 4 Mesin perajang tembakau 16 70 780 2.131 5 Alat perajang tembakau 18 48 811,2 31 6 Penetas telur 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 20 9 Pemeliharan dan reparasi mobil 41 244 3.016 3.22 10 Pemeliharan dan reparasi spd motor 47 72 91.520 3.23 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83,3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN 4 2 93,60 15									
2 Las 77 124 244,4 436 3 Pande besi 2 4 1.300 39,3 4 Mesin perajang tembakau 16 70 780 2.131 5 Alat perajang tembakau 18 48 811,2 31 6 Penetas telur 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 20 9 Pemeliharan dan reparasi mobil 41 244 3.016 3.22 10 Pemeliharan dan reparasi spd motor 47 72 91.520 3.23 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83,3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN 436 244,4 436 436 244 3.016 3.22 3.22 3.23 3.23 3.23 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24			N ELEKTRONII	KA	Г				
3 Pande besi 2 4 1.300 39,3 4 Mesin perajang tembakau 16 70 780 2.131 5 Alat perajang tembakau 18 48 811,2 31 6 Penetas telur 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 20 9 Pemeliharaan dan reparasi mobil 41 244 3.016 3.27 10 Pemeliharan dan reparasi spd motor 47 72 91.520 3.25 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83,3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.060,8</td>						1.060,8			
4 Mesin perajang tembakau 16 70 780 2.131 5 Alat perajang tembakau 18 48 811,2 395 6 Penetas telur 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 26 9 Pemeliharan dan reparasi mobil 41 244 3.016 3.22 10 Pemeliharan dan reparasi spd motor 47 72 91.520 3.22 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83.3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN 8 811,2 2.131			l	<u> </u>		436,8			
4 tembakau 16 70 780 2.131 5 Alat perajang tembakau 18 48 811,2 3 6 Penetas telur 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 20 9 Pemeliharan dan reparasi mobil 41 244 3.016 3.2 10 Pemeliharan dan reparasi spd motor 47 72 91.520 3.2 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83. 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN 8 811,2 2 2.131	3		2	4	1.300	39,52			
5 Alat perajang tembakau 18 48 811,2 395 6 Penetas telur 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 26 9 Pemeliharan dan reparasi mobil 41 244 3.016 3.27 10 Pemeliharan dan reparasi spd motor 47 72 91.520 3.25 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83,3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN KERAJINAN 8 811,2	4		16	70	780	2.131,6			
5 tembakau 18 48 811,2 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 26 9 Pemeliharan dan reparasi mobil 41 244 3.016 3.27 10 Pemeliharan dan reparasi spd motor 47 72 91.520 3.26 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83,3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN KERAJINAN 8 811,2									
tembakau 3 26 291,20 395 7 Furnitur logam 2 6 572 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 20 9 Pemeliharan dan reparasi mobil 41 244 3.016 3.22 10 Pemeliharan dan reparasi spd motor 47 72 91.520 3.22 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83,3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN KERAJINAN 8	5		18	48	811.2	52			
7 Furnitur logam 2 6 572 15 8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 20 9 Pemeliharaan dan reparasi mobil 41 244 3.016 3.22 10 Pemeliharan dan reparasi spd motor 47 72 91.520 3.22 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83.3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN KERAJINAN KERAJINAN KERAJINAN									
8 Daur ulang timah bekas aki 1 7 603,2 20 9 Pemeliharaan dan reparasi mobil 41 244 3.016 3.22 10 Pemeliharan dan reparasi spd motor 47 72 91.520 3.22 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83,3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN KERAJINAN Image: Control of the property of						395,2			
8 bekas aki 1 7 603,2 26 9 Pemeliharaan dan reparasi mobil 41 244 3.016 3.27 10 Pemeliharan dan reparasi spd motor 47 72 91.520 3.22 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83,3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN KERAJINAN 8	7		2	6	572	15,6			
Pemeliharaan dan reparasi mobil Pemeliharan dan reparasi spd motor Perakitan antenna Perak	8	=	1	7	603.2	208			
9 reparasi mobil 41 244 3.016 3.27 10 Pemeliharan dan reparasi spd motor 47 72 91.520 3.22 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83,3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN KERAJINAN			1		555,2	200			
reparasi mobil	9		41	244	3.016	3.276			
10 reparasi spd motor 47 72 91.520 3.23 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83,3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 13 KERAJINAN KERAJINAN		_	11		2.013	3.2.3			
reparasi spd motor 11 Reparasi elektronika 15 29 10.920 83,3 12 Perakitan antenna 1 2 93,60 13 KERAJINAN	10	Pemeliharan dan	47	79	91 520	3.224			
12 Perakitan antenna 1 2 93,60 15 KERAJINAN	10		47	12	31.320	0.224			
KERAJINAN	11	Reparasi elektronika	15	29	10.920	83,20			
	12	Perakitan antenna	1	2	93,60	156			
1 Bordin 4 19 9.009 95		KERAJINAN							
<u> </u>	1	Bordir	4	12	8.008	85,28			

			U	Jraian			
No	Kriteria	Perusahaa n	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)		
2	Anyaman bambu/ keranjang tembakau	3.595	10.264	1.940.120	15.600		
3	Kerajinan bamboo	4	9	7.800	218,40		
4	Kuda lumping	6	26	2.288	223,60		
5	Anyaman lidi	153	458	9.464	332,80		
6	Anyaman pelepah pisang	260	541	7.072	296,40		
7	Anyaman mendong	4	26	13.104	67,60		
8	Kerajinan kayu/ patung	18	30	59.072	135,2		
9	Alat dapur dari bambu	362	1.016	1.623.232	644,80		
10	Bedug	2	10	93,60	395,20		
11	Tangkai cangkul	6	15	3.120	31,20		
12	Terompah kayu	38	98	17.000	81,12		
13	Alat jemur bambu	15	41	10.244	104		
14	Gerabah tanah	168	308	63.232	114,40		
15	Relief tembaga	7	99	8.008	5.200		
16	Gamelan tradisional	1	2	-	-		
17	Alat musik	2	14	22.880	72,80		
18	Alat olahraga	1	2	7.124	58,24		
19	Mainan anak	3	38	31.720	2.028		
20	Radio kayu dan alat fungsional	1	31	5.928	2.288		
21	Sapu ijuk	279	640	47.923,2	780		
	INDUSTRI KAYU PRIMER HASIL HUTAN						
1	Laminating, bare core, veneer, dll	27	14.158	844.578,8	3.759.533,6		

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2017

7) Urusan Transmigrasi

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang melaksanakan transmigrasi di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.134. Jumlah Transmigrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016

Limiter		Tahun						
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016			
Jumlah transmigrasi (KK)	10	12	4	5	15			

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Faktor yang menjadi penyebab penurunan tersebut lebih disebabkan oleh kuota KK Transmigrasi untuk Kabupaten Temanggung yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dimilikinya. Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah karena akan bertumpu pada aspek-aspek ekonomi daerah, penciptaan iklim kemampuan berinvestasi, ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur pendukung, dan ketersediaan sumberdaya manusia bagi pengembangan usaha.

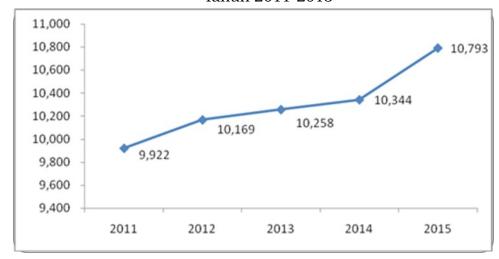
Adapun keberhasilan aspek daya saing daerah diukur dengan kemampuan ekonomi daerah dan fasilitas wilayah/infrastruktur.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dari perannya mampu memicu daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebagaimana dapat dilihat sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2.4.
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Kabupaten Temanggung
Tahun 2011-2015



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat rendah karena cukup jauh di bawah rata-rata

kemampuan daya beli masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 8.182.000, 00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp.9.930.000,00.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor antara lain dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang melalui terminal, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah makan, dan ketersediaan penginapan.

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor antara lain dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang melalui terminal, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah makan, dan ketersediaan penginapan.

1) Urusan Perhubungan

a) Jumlah orang yang terangkut angkutan umum

Perkembangan jumlah orang yang terangkut angkutan umum selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya jumlah kendaraan pribadi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Data jumlah orang yang terangkut angkutan umum sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.135. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Uraian		Tahun						
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016			
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	1.002.072	971.667	970.442	969.224	964.638			

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Jumlah orang melalui terminal

Perkembangan jumlah orang yang melalui terminal selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena orang cenderung naik kendaraan pribadi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat dalam melakukan perjalanan sehingga tidak masuk terminal. Data jumlah orang yang melalui terminal tercantum pada tabel:

Tabel 2.136.

Jumlah Orang yang Melalui terminal
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Limian	Tahun						
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016		
Jumlah orang yang							
melalui terminal	12.039.985	10.521.336	10.521.336	10.404.259	10.489.305		

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

2) Urusan Penataan Ruang

a) Ketaatan terhadap RTRW

Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir fluktuatif. Pelanggaran terhadap tata ruang sesuai RTRW Kabupaten Temanggung tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2.137. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Theire	Tahun						
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016		
Jumlah pelanggaran (unit)	0	95	20	20	33		

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Luas wilayah produktif

Dari total luas lahan Kabupaten Temanggung sebesar 87.065 Ha terdapat 59.039 Ha (67,81%) berupa lahan produktif. Lahan produktif tersebut merupakan bagian dari wilayah budidaya seluas 73.560,07 Ha yang masih terdapat potensi pengembangan. Jika dilihat dari rasio luas wilayah produktif selama periode 2012 – 2016 menunjukkan angka 1:1,475.

Tabel 2.138.

Rasio Luas Wilayah Produktif (Ha)

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

	Павиран					
NO	Uraian			Tahun		
NO	Ulaidii	2012	2013	2014	2015	2016
	Luas Wilayah					
1	Kabupaten	87,065	87,065	87.065	87.065	87.065
	Luas Wilayah					
2	Lindung	3,282	3,282	3.282	3.282	13.504,93
	Luas Wilayah					
3	Budidaya	83,783	83,783	83.783	83.783	73.560,07
	Luas Wilayah					
4	Produktif	60,630	60,611	60.215	60.215	59.039
	Rasio Wilayah	1:	1:	1:	1:	
5	Produktif	1,436	1,436	1,445	1,445	1:1,475
6	Jumlah Luas Lahan	8	19	19	19	19
	Produktif yang					
	dikembangkan					

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2017

3) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a) Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi/Cabangnya

Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa dengan bentuk usaha menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Cabang perusahaan asuransi jiwa yang ada di Kabupaten Temanggung tahun 2016 ada 2 (dua) perusahaan yaitu Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Bumi Putera.

b) Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Tabel 2.139.

Jumlah Restoran dan Rumah Makan

Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

	Urajan	Tahun				
No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Restoran	1	1	1	1	1
	Rumah makan	42	43	43	43	43
2.	1.Kelas Talam Gangsa	1	1	1	1	1
	2.Kelas Piring Emas	7	n.a	n.a	n.a	n.a
	3.Kelas Piring Perak	12	14	14	14	14
	4.Kelas Piring Perunggu	1	4	4	4	4
	5.Belum diklasifikasi	22	20	20	20	20

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Penentuan kelas rumah makan dan restoran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan berdasarkan pada kriteria kelengkapan sarana dan prasarana yang ada, ketersediaan pekerja khusus (koki) dan kriteria lainnya sehingga kelas restoran dan rumah makan berubah mulai tahun 2015.

c) Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut.

Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Adapun perkembangan penginapan/hotel/wisatawan dapat dilihat dari tabel 2.140.

Tabel 2.140.
Perkembangan Penginapan/Hotel
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Urajan	Tahun						
INO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah Hotel Bintang	1	1	1	1	1		
1.	Satu (buah)	1	1	1	1	1		
	Jumlah Hotel Non	10	12	12	12	12		
2.	Bintang (buah)	12		12	12	12		
2	Jumlah kamar	200	000	200	200	000		
3.	penginapan/hotel (unit)	208	208	208	208	208		
4	Jumlah rata-rata	0.32	0.44	0.44	0.44	0.44		
4.	penggunaan kamar (hari)	0,32	0,44	0,44	0,44	0,44		
	Jumlah kamar							
5.	penginapan/hotel yang	32.29	34.322	25.476	34.322	36.473		
	terisi (unit)							

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2017

4) Urusan Lingkungan Hidup

a) Sumber Air Bersih Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung

Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, mata air, air sumur dangkal dan air sumur dalam. Data rumah tangga yang menggunakan air bersih per kecamatan sebagaimana tercantum pada tabel 2.141.

Tabel 2.141.
Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
per Kecamatan di Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

		•	00	0		
No	Sumber Air Bersih	Perpipaaan	Sumur	Sumur	Mata Air	PDAM
INO		Air Kran	Gali	Pompa	IVIALA AII	PDAIN
1.	Kecamatan Parakan	2.436	1.500	53	669	5.623
2.	Kecamatan Kledung	4.146	-	2	-	109
3.	Kecamatan Bansari	4.035	1.978	12	64	-
4.	Kecamatan Bulu	2.993	1.123	152	12	1.083

No	Sumber Air Bersih	Perpipaaan	Sumur	Sumur	Mata Air	PDAM
140	Camber 7 iii Bereiii	Air Kran	Gali	Pompa	- Wicker / III	1 57 (11)
5.	Kecamatan Temanggung	1.312	5.010	480	227	14.039
6.	Kecamatan Tlogomulyo	3.499	707	600	713	52
7.	Kecamatan Tembarak	3.605	1.009	15	-	1.050
8.	Kecamatan Selopampang	4.109	133	2		174
9.	Kecamatan Kranggan	3.600	2.895	112	19	2.426
10.	Kecamatan Pringsurat	3.368	1.997	682	40	3.920
11.	Kecamatan Kaloran	5.009	952	178	33	1.425
12.	Kecamatan Kandangan	3.903	4.647	140	476	620
13.	Kecamatan Kedu	2.235	7.827	1.878	8	2.758
14.	Kecamatan Ngadirejo	6.778	2.433	97	331	2.184
15.	Kecamatan Jumo	1.128	3.644	455	3	1.340
16.	Kecamatan Gemawang	7.833	332	229		123
17.	Kecamatan Candiroto	7.163	264	20	621	220
18.	Kecamatan Bejen	2.811	1.248	103	782	-
19.	Kecamatan Tretep	3.666	10	-	-	-
20.	Kecamatan Wonoboyo	4.017	7	2	171	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan PDAM Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Pencemaran Lingkungan dan Plasma Nuftah

Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Temanggung termasuk masih rendah meskipun meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Plasma nuftah dikelompokkan menjadi plasma nuftah dilindungi, plasma nuftah terancam punah dan plasma nuftah endemik. Secara jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.142. Kasus Pencemaran Lingkungan dan Plasma Nuftah Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NT.				Tahun				
No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016		
Kası	us Pencemaran (kasus)							
1.	Pencemaran tanah	0	0	0	1	-		
2.	Pencemaran air	1	0	0	3	3		
3.	Pencemaran udara	2	5	1	5	3		
Plas	Plasma Nuftah (jenis)							
1.	Plasma Nuftah Dilindungi							
	a.Hewan	14	14	16	16	14		
	b.Tumbuhan	4	4	14	14	2		
2.	Plasma Nuftah Terancam Punah							
	a.Hewan	7	7	16	16	12		
	b.Tumbuhan	4	4	4	4	1		
3.	Plasma Nuftah Endemik							
	a.Hewan	27	27	0	0	2		
	b.Tumbuhan	14	14	0	0	_		

 $Sumber: Dinas\ Lingkungan\ Hidup\ Kabupaten\ Temanggung\ Tahun\ 2017$

5) Urusan Energi, Sumber Daya Mineral

a) Ketersediaan daya listrik

Jumlah penggunaan daya listrik tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan. Ketersediaan daya listrik terpasang di Kabupaten Temanggung tercantum dalam tabel:

Tabel 2.143. Penggunaan Daya Listrik Terpasang (KwH) Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun						
INO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	DI N Tomonggung	72.582.890	67.872.190	89.498.690	95.600.940	100.367.240		
2.	PLN Temanggung PLN Parakan	62.329.350	51.203.750	69.857.650	69.857.650	77.290.430		
3.		134.912.24	119.075.94	159.356.34	165.458.59	177.657.670		
	Total	0	0	0	0			

Sumber: PLN Kabupaten Temanggung Tahun 2017

b) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Temanggung belum mencapai 100%, namun dibandingkan dengan tahun 2012 sudah ada peningkatan yang cukup tajam, dari 87,52% menjadi 93,23%.

Tabel 2.144. Persentase Rumah <mark>Tangga</mark> yang Menggunakan Listrik Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun					
Oralan	2012	2013	2014	2015	2016	
Persentase Rumah Tangga yang	87.52	90,87	95 33	95,33	93.23	
menggunakan listrik	01,32	30,07	30,00	90,00	30,20	

Sumber : PLN Kabupaten Temanggung Tahun 2017

6) Urusan Komunikasi dan Informatika

a) Persentase Penduduk yang Menggunakan Telpon

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi telepon rumah biasa.

Tabel 2.145.
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Telepon
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun						
INO	Uraiaii	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Rumah tangga	7.442	7.622	7.717	7.717	7.827		
1.	berlangganan telepon	7.442	7.022	7.717	7.717	1.021		
2.	Jumlah rumah tangga	192.0	193.09	208.87	194.11	252.796		
2.	Jumlah rumah tangga	80	6	4	6	232.790		
3.	Persentase rumah tangga	3.919	3,947	3,69	3,98	3,10		
	menggunakan telepon	3,919	3,947	3,09	3,96	3,10		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Untuk menggambarkan kondisi iklim berinvestasi di daerah ditunjukkan dengan beberapa indikator yaitu angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, perkembangan perizinan, persentase desa berstatus swasembada, dan jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim berusaha.

1) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a) Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Berbagai kategori tindak kriminal adalah seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Adapun angka kriminalitas dapat dilihat dari tabel 2.146.

Tabel 2.146.
Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Temanggung
Tahun 2012–2016

No	Jenis Kriminal			Tahun		
NO	Jenis Killilliai	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah kasus Narkoba	7	3	14	13	17
2.	Jumlah kasus	2	1	1	0	0
۷.	Pembunuhan	3	1	1	U	U
3.	Jumlah Kejahatan	3	3	6	11	19

Ma	Ionia Vuiminal			Tahun		
No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
	Seksual					
4.	Jumlah kasus	37	13	35	24	39
4.	Penganiayaan	37	13		24	39
5.	Jumlah kasus	64	64	97	134	117
5.	Pencurian	04	04	97	134	117
6.	Jumlah kasus Penipuan	41	20	29	60	52
7.	Jumlah kasus	0	0	2	3	0
7.	Pemalsuan uang	0	0			U
8.	Total Jumlah Tindak	155	104	184	245	244
0.	Kriminal	155	104	104	245	244
	Installate Davidantala	724.81	731.9	738.9	745.7	909 745
9.	Jumlah Penduduk	0	11	15	78	803.745
10	Angka Kriminalitas	2,14	1,42	2,49	3,28	3,17

Sumber : Kepolisian Resort Temanggung dan Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel di atas tercantum bahwa jumlah tindak kriminal pada tahun 2016 sebanyak 244 kasus dengan perincian sebagai berikut: jumlah kasus narkoba sebanyak 17 kasus, pembunuhan sebanyak 0 kasus, kejahatan seksual sebanyak 19 kasus, penganiayaan sebanyak 39 kasus, pencurian sebanyak 117 kasus, dan penipuan sebanyak 52 kasus.

Selama Tahun 2012-2016 jumlah tindak kriminal cenderung meningkat dari 155 kasus di Tahun 2012 menjadi 244 kasus di Tahun 2016, angka kejahatan yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah kasus narkoba dan kejahatan seksual, yang cenderung naik setiap tahun.

b) Jumlah demo

Jumlah demo/unjuk rasa adalah jumlah demo/unjuk rasa yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Demo/unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Adapun dinamika jumlah demonstrasi di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel 2.147.

Tabel 2.147.

Jumlah Demonstrasi

Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016

No	Urajan	Tahun						
No	Oraian	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Bidang Politik	0	0	0	0	0		
2	Ekonomi	0	12	2	0	1		
3	Bidang lainnya	0	3	2	7	2		
4	Kasus pemogokan kerja	0	0	0	0	0		
5	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	0	15	4	7	3		

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2017

c) Lama proses perijinan

Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Lama proses perijinan di Kabupaten Temanggung tahun 2016 sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2.148. Lama Perijinan di Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2016

NO	Uraian	2015	2016
1.	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	6	2
2.	TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	6	2
3.	IUI (Izin Usaha Industri)	6	6
4.	TDI (Tanda Daftar Industri)	6	6
5.	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	12	12
6.	HO (Izin Gangguan)	12	12

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2017

d) Perkembangan perizinan

Kemudahan perizinan diukur antara lain melalui jumlah perizinan yang dikeluarkan untuk masing-masing jenis perizinan. Perkembangan jumlah perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.149. Jumlah dan Jenis Perizinan yang Dikeluarkan Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	IENIC IZINI	JUMLAH IZIN YANG KELUAR TAHUN						
NO	JENIS IZIN	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Izin Prinsip			1	5			
		-	-			6		
2	Izin Lokasi			-	-			
		-	-			-		
3	Izin Gangguan (HO)	1.0	3	402	486	5		
		36	13			47		
4	Izin Mendirikan Bangunan Tower			3	-			
	_	-	-			-		
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4	1	151	126	1		
		59	56			47		
6	Surat Izin Usaha Perdagangan	9	2	313	399	3		
	(SIUP)	46	93			23		
7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	9	2	325	410	4		
		41	96			01		

		,			•	
8	Tanda Daftar Gudang (TDG)	2		2	10	
		1	4			3
9	Tanda Daftar Industri (TDI)	1	1	-	-	
		11	4			3
10	Izin Usaha Industri PHHK (IUI	1		-	7	
	РННК)	2	2			3
11	Izin Usaha Industri (IUI)	1		3	2	
		8	2			7
12	Izin Perluasan Industri (IPI)			-	1	
		2	2			1
13	Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi	4	2	109	52	8
	(SIUJK)	3	9			9
14	Izin Trayek (IT)	1	8	115	142	1
		95	0			50
15	Izin Usaha Angkutan (IUA)	1		2	1	
		4	6			1
16	Surat Izin Apotik (SIA)			13	11	1
	* ` `	_	2			0
17	Izin Balai Pengobatan (BP)			-	5	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_	1			6
18	Toko Obat (TO)			-	-	
	, ,	_	_			4
19	Izin Praktek Dokter Hewan			-	_	
	Mandiri	_	-			4
20	Izin Tempat Praktek Dokter Hewan			-	_	
	Mandiri	_	_			9
21	SKAL			_	_	2
		_	_			38
22	IPPT			_	_	1
		_	_			48
23	TDUP			_	-	
		_	_			9
24	PATEN			_	_	4
		_	_			23
25	Inseminasi Buatan			_	_	
-		_	_			9
26	Veteriner			_	_	1
		_	_			1
	JUMLAH			1.439	1.657	
		3.798	1.200	1.100	1.00.	2.552
	nber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP K			T. 1 . 0	0.1.7	_ 2.002

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2017

2) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Desa Swadaya; adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa swadaya berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

- Desa Swakarsa; adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat desa swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.
- Desa Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing daerah maka salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada.

Penilaian status desa/kelurahan diambil berdasarkan data dari profil desa/kelurahan yang berisi data potensi dan perkembangan. Sehingga pengisian data-data dalam profil desa/kelurahan menjadi sangat penting karena menentukan status desa.

Tabel 2.150. Status Desa/Kelurahan Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Lingian	Tahun						
NO	o Uraian		2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	289	275	275	215	215		
2.	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	0	14	14	40	40		
3.	Jumlah Desa/Kelurahan	0	0		6	6		
J.	Swasembada	U	0	0	0	O		
4.	Jumlah Desa/Kelurahan	289	289	289	289	289		

Sumber : Bagian Pemdes Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2017

d. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Urusan Ketenagakerjaan

a) Rasio lulusan \$1/\$2/\$3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.151.
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Lingian					
	Uraian	2012 2013	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	11.861	12.006	13.804	14.902	15.964
2.	Jumlah penduduk	733.418	739.873	731.061	788.264	803.745
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	1:62	1:62	1:54	1:53	1:50
4	Persentase	1,62	1,62	1,84	1,89	1,99

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Dari tabel di atas jumlah lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2016 sebesar 15.964 atau 1.99% dari jumlah penduduk Kabupaten Temanggung sebanyak 803.745 jiwa. Angka ini relatif masih sangat kecil atau dapat dikatakan masih sedikit yang berkualifikasi ahli.

b) Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya.

Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun.

Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.152.
Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun						
No		2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	179.726	176.077	165.550	173.743	176.904		
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	56.145	58.575	49.657	58.791	60.951		
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	235.871	234.652	215.207	232.534	237.855		
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	497.547	505.223	515.854	555.730	565.890		
5.	Rasio ketergantungan	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1		
6	Persentase	47,41	46,46	41,72	41,84	42,03		

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel di atas, dapat diperoleh angka ketergantungan pada Tahun 2016 sebesar 42,03 persen menurun dari Tahun 2015 sebesar 47,71 persen Semakin besar angka ketergantungan mengandung arti semakin besar pula beban tanggungan bagi kelompok usia produktif dalam menanggung kelompok usia non produktif dan angka 42,03 persen termasuk

dalam kategori tinggi. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Temanggung setiap dua orang penduduk berusia produktif harus menanggung beban satu orang penduduk yang tidak produktif.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD 2013-2018 sampai Tahun 2016

Ketepatan dan keakuratan proses serta hasil evaluasi kinerja RKPD ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, baik perencanaan di tingkat kabupaten maupun perencanaan lingkup SKPD. Kondisi dokumen perencanaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.171

Kondisi Dokumen Perencanaan Kabupaten Temanggung

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Perda Nomor 1 Tahun 2014)	RPJMD Kabupaten Temanggung ditetapkan Tahun 2014 sehingga penyusunan RKPD Tahun 2014 masih mengacu pada Program Indikatif. Sedangkan penyusunan RKPD Tahun 2015 sudah mengacu kepada sasaran dan arah kebijakan RPJMD 2013-2018.
2.	Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2015 sampai dengan Triwulan II.	Hasil evaluasi RKPD 2015 s/d Triwulan II belum sepenuhnya menggambarkan capaian akhir kinerja RKPD tahun berjalan, di samping itu terdapat beberapa SKPD yang belum melaporkan hasil pelaksanaan RKPD nya sesuai dengan format ketentuan yang berlaku dan masih terjadi keterlambatan pengiriman laporan. Hal ini mengakibatkan perhitungan capaian kinerja tingkat kabupaten sebagai akumulasi capaian SKPD juga mengalami keterlambatan.
3.	Renstra SKPD 2014-2018	Beberapa SKPD tidak mencantumkan target kinerja dan anggaran secara jelas.
4.	Renja SKPD 2015.	Banyak indikator dan satuan target antara renstra dengan renja SKPD tidak sama.
5.	Renja dengan DPA SKPD	Terdapat perbedaan nama program dan total anggaran pada beberapa kegiatan antara Renja SKPD dengan DPA, sehingga harus disesuaikan.

2.2.1Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Keselarasan Program dan Kegiatan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran :

- Keselarasan program RPJMD 2013-2018 dengan RKPD 2016 sudah mencapai 100%, artinya seluruh program lima tahunan yang ada pada RPJMD telah dijabarkan ke dalam program tahunan yang terdapat dalam RKPD 2018.
- 2) Keselarasan program dan kegiatan RKPD dengan APBD mencapai 192 program, sedangkan 2 Program dalam RKPD tidak muncul pada Program APBD, begitu juga sebaliknya 9 program di APBD tidak tertuang didalam RKPD.
- 3) Ketidakselarasan masih terjadi antara Renstra SKPD dengan Renja SKPD, ditandai banyak kegiatan baru dalam Renja SKPD yang diluar Renstra. Kesesuaian kegiatan hanya 1148 yang sesuai sedangkan sebanyak 178 kegiatan di RKPD tidak muncul di RKPD dan sebaliknya 217 kegiatan muncul di APBD.

Selain hal tersebut diatas, terdapat kendala teknis dalam penyusunan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2016 yang berbeda dengan RKPD tahun 2016 dikarenakan belum terlaksananya sinkronisasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Informasi Penganggaran yang digunakan saat menyusun APBD.

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 atas Capaian RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 –2018

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sebagai berikut:

1) Bidang Pendidikan

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja yang diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan mempunyai 78 (tujuh puluh delapan) indikator RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 dan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang berpindah kewenangan.

Status capaian indikator RPJMD urusan pemerintahan bidang pendidikan sampai tahun 2016 adalah :

- a. 40 (empat puluh) indikator telah tercapai, yaitu:
 - 1. Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun):
 - Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun);
 - 3. Rasio siswa per kelas TK;
 - 4. Persentase APK SD Sederajat;
 - 5. Persentase APK SMP Sederajat;
 - 6. Persentase TK/RA Terakreditasi A;
 - 7. Persentase SD/MI Terakreditasi A;
 - 8. Persentase SD/MI Terakreditasi B;
 - 9. Persentase SD/MI Terakreditasi C;
 - 10. Persentase SMP/MTs Terakreditasi A;
 - 11. Persentase SMP/MTs Terakreditasi B;
 - 12. Persentase SMP/MTs Terakreditasi C;
 - 13. Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
 - 14. Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan;
 - 15. Rasio Siswa per Pendidik TK/RA;
 - 16. Rasio Siswa per Pendidik SD/MI;
 - 17. Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs;
 - 18.Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik;
 - 19.Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik;
 - 20.Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik;
 - 21.Cakupan Kualifikasi Akademik pengawas sekolah/Madrasah;
 - 22.Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik;
 - 23.Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik;
 - 24.Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik;
 - 25. Besaran Pegawai Administrasi Sekolah;
 - 26. Rasio Pengawas Sekolah;
 - 27. Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
 - 28. Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs).
 - 29. Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata Nilai

- Ujian Nasional ≥ 7,00;
- 30. Persentase Siswa SMP/MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00;
- 31. Cakupan kualifikasi akademik Kepala SD/MI;
- 32. Persentase APM SD Sederajat;
- 33. Persentase APM SMP Sederajat;
- 34. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun;
- 35. Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun;
- 36. Persentase Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA;
- 37. Angka Putus Sekolah SD/MI;
- 38. Angka Putus Sekolah SMP/MTs;
- 39. Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs;
- 40. Cakupan Ketersediaan Ruang Guru;
- b. 37 (tiga puluh tujuh) indikator dengan status akan tercapai yaitu antara lain:
 - 1. Rasio Siswa per Kelas SD/MI;
 - 2. Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs;
 - 3. Persentase TK/RA Terakreditasi B;
 - 4. Persentase TK/RA Terakreditasi C;
 - Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa;
 - 6. Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun):
 - 7. Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun):
 - 8. Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat;
 - 9. Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Dasar;
 - 10.Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar;
 - 11.Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun;
 - 12. Rata-rata Lama Sekolah;
 - 13. Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 14. Persentase Angka Lulusan SD/MI;
 - 15. Persentase Angka Lulusan SMP/MTs;
 - 16.Cakupan Kunjungan pengawas Sekolah ke satuan pendidikan;
 - 17. Persentase pendidik yang disiplin;
 - 18. Persentase angka kenakalan siswa;
 - 19. Cakupan ketersediaan guru SD/MI;
 - 20.Cakupan ketersediaan guru SMP/MTS per Satuan mata pelajaran;
 - 21.Cakupan ketersediaan Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV yang telah memiliki

- sertifikat pendidik;
- 22. Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs;
- 23.Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn;
- 24. Cakupan Kualifikasi Akademik Kepala SMP/MTs;
- 25. Besaran Penilik Pendidikan Nonformal;
- 26. Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik;
- 27. Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran;
- 28.Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya;
- 29. Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang;
- 30. Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang;
- 31. Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik;
- 32. Persentase Ruang Kelas SMP yang Kondisinya Baik;
- 33. Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana;
- 34. Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana;
- 35.Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memliki ruang belajar beserta perlengkapannya;
- 36.Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar:
- 37.Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan.
- c. 1 (satu) indikator dengan Status capaian perlu upaya keras yaitu indikator Besaran Pamong Belajar.

Status capaian indikator RPJMD urusan pemerintahan bidang pendidikan yang berpindah kewenangan ke Provinsi yaitu untuk jenjang pendidikan Menengah adalah :

- a. 11 (sebelas) indikator telah tercapai, yaitu:
 - 1. Persentase APK Pendidikan Menengah;
 - 2. Persentase APM Pendidikan Menengah;
 - 3. Angka Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Menengah;
 - 4. Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun;
 - 5. Rasio Siswa per Kelas SMK;
 - 6. Tersedianya layanan pendidikan menengah di setiap

- kecamatan;
- 7. Rasio ketersediaan sekolah (SMA/MA/SMK) per Penduduk Usia 16-18 Tahun;
- 8. Rasio Siswa per Pendidik SMA/MA;
- 9. Persentase Pendidik SMA/MA yang memenuhi standar kualifikasi akademik:
- 10.Persentase Pendidik SMK yang memenuhi standar kualifikasi akademik;
- 11.Persentase Pendidik SMA/MA yang memiliki setifikat pendidik.
- b. 18 (delapan belas) indikator dengan status akan tercapai yaitu antara lain:
 - 1. Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK;
 - 2. Persentase Pendidik SMA/MA yang memiliki sertifikat pendidik;
 - 3. Rasio Siswa per Pendidik SMK;
 - 4. Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Menengah;
 - 5. Rasio Siswa per Kelas SMA/MA;
 - 6. Persentase SMA/MA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana;
 - 7. Persentase SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana;
 - 8. Persentase SMA/MA Terakreditasi A:
 - 9. Persentase SMA/MA Terakreditasi B;
 - 10. Persentase SMA/MA Terakreditasi C;
 - 11. Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi A;
 - 12. Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi B;
 - 13. Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi C;
 - 14. Persentase Angka Lulusan SMA/MA/SMK;
 - 15.Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Menengah;
 - 16. Persentase Siswa SMA/MA/SMK yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00;
 - 17. Persentase ruang kelas SMA/MA yang kondisinya baik;
 - 18. Persentase ruang kelas SMK yang kondisinya baik.

2) Bidang Kesehatan

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan bidang kesehatan diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan yang mempunyai 51 (lima puluh satu) indikator dan 8 (delapan) indikator diimplementasikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah status capaian indikator RPJMD sampai tahun 2016 adalah :

a. 36 (tiga puluh enam) indikator telah tercapai, yaitu:

- 1. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup;
- 2. Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan);
- 3. Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan);
- 4. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan;
- 5. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani;
- 6. Cakupan Pelayanan Nifas;
- 7. Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1);
- 8. Cakupan Pelayanan Anak Balita;
- 9. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani;
- 10. Cakupan Penemuan Kasus baru HIV/AIDS;
- 11.Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 10.000 Penduduk;
- 12.CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue);
- 13. Cakupan Layanan Kesehatan Peserta Aktif KB;
- 14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin;
- 15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin:
- 16. Cakupan Penemuan Penderita Diare;
- 17.CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk);
- 18. Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk;
- 19. Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani;
- 20. Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak;
- 21.Acut Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun;
- 22. Cakupan Desa atau Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam;
- 23. Cakupan Penderita diare Yang ditangani;
- 24.Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin;
- 25. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan;
- 26. Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan;
- 27. Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan SDM sesuai Standar;
- 28.Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi;
- 29. Rasio ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas;
- 30.Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan;
- 31.Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan;
- 32.Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan;
- 33. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Tingkat Dasar;
- 34. Cakupan Desa Siaga Aktif;
- 35. Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri;

- 36.Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten.
- b. 13 (tiga belas) indikator dengan status akan tercapai yaitu antara lain:
 - 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4;
 - 2. Cakupan Kunjungan Bayi;
 - 3. Angka Kelangsungan Hidup Bayi;
 - 4. Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup;
 - 5. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup;
 - 6. Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup;
 - 7. Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate):
 - 8. Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI);
 - 9. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan;
 - 10. Cakupan Penduduk yang Memanfaatkan Jamban;
 - 11. Cakupan Rumah Tangga Sehat;
 - 12. Proporsi Penduduk Usia 15 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS;
 - 13. Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita.
- c. 2 (dua) indikator dengan status perlu Upaya Keras yaitu antara lain:
 - 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD;
 - Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate).

Status capaian indikator RPJMD untuk RSUD sampai tahun 2016 adalah :

- a. 5 (lima) indikator telah tercapai, yaitu:
 - 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
 - 2. BOR:
 - 3. NDR;
 - 4. Kinerja Pelayanan BLUD;
 - 5. Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD.
- b. 3 (tiga) indikator akan tercapai, yaitu:
- 1. LOS;
- 2. TOI;
- 3. GDR.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kinerja penyelenggaran Bidang Pekerjaan Umum diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Terdapat 16 (enam belas) IKD RPJMD 2013-2018 pada Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan capaian: 2 (dua) IKD perlu upaya keras, 11 (sebelas) IKD akan tercapai dan 3 (tiga) IKD telah tercapai.

IKD yang perlu upaya keras adalah:

- Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkar kota Parakan;
- 2. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) beserta rencana rincinya.

IKD yang akan tercapai adalah:

- Persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat;
- Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman;
- 3. Persentase jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana;
- 4. Persentase jalan yang kondisi baik;
- 5. Persentase jembatan yang kondisi baik;
- 6. Persentase tersedianya alat berat dengan kondisi baik;
- 7. Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada;
- 8. Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif;
- 9. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan;
- 10. Persentase kondisi bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai;
- 11. Cakupan tersedianya jalur pedestrian.

Sedangkan IKD yang telah tercapai adalah:

- Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW beserta rencana rincinya;
- 2. Cakupan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya;
- 3. Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang.

4) Bidang Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat ini diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Terdapat 5 (lima) IKD dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018, yang akan tercapai, dan 1 (satu) IKD yang masih perlu upaya keras.

IKD yang akan tercapai adalah:

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni;

- 2. Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan;
- 3. Cakupan Layanan Air Minum yang layak;
- 4. Cakupan sanitasi pemukiman yang layak;
- Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum.

IKD yang perlu upaya keras adalah Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota.

5) Bidang Sosial

Kinerja Urusan pemerintahan bidang Sosial ditunjukkan dalam 12 (dua belas) indikator kinerja, adapun status capaian indikator RPJMD sampai dengan perkiraan capaian tahun 2016 adalah:

- a. 6 (enam) indikator dengan status capaian telah tercapai, yaitu:
 - Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - 2. Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial;
 - 3. Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial:
 - 4. cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS;
 - 5. cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS; dan
 - 6. persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran.
- b. 4 (empat) indikator dengan status capaian akan tercapai, yaitu:
 - 1. Persentase anak terlantar yang tertangani;
 - 2. Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial;
 - 3. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial;
 - 4. Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

- c. Indikator dengan status capaian perlu upaya keras ada 2 (dua), yaitu:
 - 1. Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
 - 2. Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis.

6) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat lainnya diimplementasikan oleh SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD) dalam 9 (sembilan) indikator RPJMD 2013-2018, dengan capaian: 4 (empat) IKD perlu upaya keras, 1(satu) IKD akan tercapai dan 6 (enam) IKD telah tercapai.

IKD dengan status capaian perlu upaya keras yaitu:

- Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana;
- Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat;
- 3. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi.

IKD dengan status capaian akan tercapai, yaitu

- 1. Cakupan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- 2. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- 3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten;
- 4. Tingkat waktu tanggap (response time rate);
- 5. Rasio mobil pemadam kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada wilayah manajemen kebakaran (WMK).

IKD dengan status capaian telah tercapai, yaitu:

- 1. Angka Kriminalitas;
- 2. Cakupan Penanganan demonstrasi;
- 3. Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam

Waktu 1(satu) Tahun;

 Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap.

7) Bidang Tenaga kerja

Kinerja pembangunan pemerintahan bidang ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 11 indikator kinerja, yang diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Capaian 12 (dua belas) indikator tersebut adalah

- a. 7 (tujuh) indikator mempunyai status capaian telah tercapai yaitu:
 - Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 - Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat;
 - 3. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan;
 - 4. Tingkat Kesempatan Kerja;
 - 5. Tingkat pengangguran terbuka;
 - 6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; dan
 - 7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan.
- b. 2 (dua) indikator mempunyai status capaian akan tercapai yaitu:
 - Cakupan Pekerja atau Buruh yang Menjadi peserta Program Jamsostek/Program Sejenis.
 - Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama.
- c. 3 (tiga) indikator mempunyai status perlu upaya keras yaitu:
 - Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja;
 - 2. Persentase penempatan transmigran;
 - 3. Persentase pengujian peralatan di perusahaan.

8) Bidang Perhubungan

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan dalam 7 (tujuh) indikator RPJMD 2013-2018, dengan capaian: 5 (lima) IKD telah tercapai, 1 (satu) IKD akan tercapai, dan 1 (satu) IKD perlu upaya keras.

IKD yang telah tercapai, adalah:

- 1. Persentase kendaraan yang diuji;
- 2. Persentase tersedianya fasilitas kelengkapan jalan;
- 3. Cakupan perusahaan angkutan umum yang mempunyai ijin usaha dan trayek;
- 4. Persentase keselamatan angkutan umum;
- 5. Tersedianya fasilitas terminal tipe B.

IKD akan tercapai yaitu tersedianya sub terminal tipe C. Sedangkan IKD perlu upaya keras adalah persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan.

9) Komunikasi dan Informatika

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 7 (tujuh) IKD RPJMD 2013-2018. Capaian IKD tersebut adalah: 2 (dua) IKD perlu upaya keras, 1 (satu) akan tercapai dan 4 (empat) telah tercapai.

IKD yang perlu upaya keras adalah:

- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan;
- 2. Rasio akses internet di ruang publik.

IKD yang akan tercapai adalah: cakupan terbangunnya integrasi jaringan informasi dan komunikasi. Sedangkan IKD yang telah tercapai adalah:

- Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)
 Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog;
- Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)
 Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta
 Digital:
- 3. Tersedianya informasi jasa konstruksi setiap tahun;
- 4. Cakupan jaringan sistem informasi e-government.

10) Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui 11 (sebelas) IKD RPJMD 2013-2018. Dari total IKD, 1 (satu) perlu upaya keras, 8 (sembilan) akan tercapai dan 2 (dua) telah tercapai.

IKD yang perlu upaya keras adalah: Terwujudnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Temanggung wilayah utara;

IKD yang akan tercapai adalah:

- 1. Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik;
- 2. Cakupan fasilitasi pengurangan sampah di perkotaan (TPS 3R):
- 3. Proporsi sampah terangkut terhadap produksi sampah se-Kabupaten Temanggung;
- 4. Proporsi sampah terangkut terhadap produksi sampah ibukota:
- Proporsi sampah terangkut/tertangani terhadap produksi sampah perkotaan (ibukota kecamatan se Kabupaten Temanggung);
- 6. Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis penceghan pencemaran air:
- 7. Persentase usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara;
- 8. Persentase luas lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk produksi biomassa.

IKD yang telah tercapai adalah:

- Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti;
- 2. Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL.

11) Bidang Pertanahan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 2(dua) IKD RPJMD 2013-2018 dengan capaian: 1(satu) IKD perlu upaya keras dan 1(satu) IKD akan tercapai.

IKD yang perlu upaya keras adalah: Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten. Sedangkan IKD yang akan tercapai adalah: Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat.

12) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan yang terdiri dari 5 indikator dengan status capaian sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) indikator dengan status capaian telah tercapai yaitu .
 - 1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - 2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - 3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- b. 2 (dua) indikator dengan status capaian akan tercapai vaitu:
 - 1. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - 2. Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian.

13) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan pemberdayaan dan perlindungan anak diimplementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 15 indikator. Status capaian indikator RPJMD sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut.

- a. 11 (sebelas) indikator dengan status capaian telah tercapai,
 yaitu:
 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu;
 - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit;
 - Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu;
 - 4. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang

- Mendapat Layanan Bantuan Hukum;
- Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan;
- 6. Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 7. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
- 8. Rasio Kekerasan dalam rumah tangga;

b. 7 (tujuh) indikator dengan status akan tercapai, yaitu:

- Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu;
- 2. Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender:
- 3. Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
- 4. Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- 5. Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Kesehatan Dasar;
- 6. Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
- 7. Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus.

14) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja Urusan Pemerintahan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditunjukkan dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, Status capaian indikator RPJMD sampai dengan tahun 2016 adalah:

- a. 6 (enam) indikator dengan status capaian telah tercapai,
 yaitu:
 - Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun;
 - Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan;
 - 3. Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk;
 - 4. Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru;
 - 5. Keluarga Sejahtera III;

- 6. Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.
- b. 7 (tujuh) indikator dengan status capaian akan tercapai,vaitu:
 - 1. Keluarga Sejahtera III plus;
 - Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun;
 - Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak
 Terpenuhi (Unmet need);
 - 4. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB;
 - 5. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif:
 - 6. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB; dan
 - 7. Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria.
- c. Indikator dengan status capaian perlu upaya keras, adalah Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan.

15) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui 6 (enam) IKD RPJMD 2013-2018. Dari total seluruh IKD, 2 (dua) IKD akan tercapai dan 4 (empat) IKD telah tercapai.

IKD yang akan tercapai adalah:

- 1. Persentase jumlah koperasi aktif; dan
- 2. Persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi.

Sedangkan IKD yang telah tercapai adalah:

- 1. Besaran jumlah anggota koperasi;
- Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3. Besaran jumlah UKM yang dibina; dan
- 4. Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM.

16) Bidang Penanaman Modal

Kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditunjukan dengan 11 (sebelas) IKD RPJMD 2013-2018. Capaian kinerja bidang ini adalah: 1 (satu) perlu upaya keras, 1(satu) akan tercapai dan 9 (sembilan) telah tercapai.

IKD yang perlu upaya keras adalah: cakupan jenis perizinan yang memiliki standar pelayanan publik atau standar operasional prosedur. IKD yang akan tercapai adalah: Nilai investasi. Sedangkan IKD yang telah tercapai adalah:

- 1. Laju investasi;
- 2. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang;
- 3. Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu;
- 4. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 5. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi dalam waktu 6(enam) hari kerja setelah persyaratan lengkap;
- 6. Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- 7. Besaran implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi secara Elektronik;
- 8. Besaran promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- 9. Besaran jumlah investor.

17) Bidang Kebudayaan

Kinerja pembangunan Urusan pemerintah bidang Kebudayaan ditunjukkan dengan 16 (enam belas) indikator kinerja. Urusan ini dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata. Capaian kinerja urusan kebudayaan, dari 16 (enam belas) Indikator kinerja adalah :

- a. 10 (sepuluh) indikator mempunyai status capaian telah tercapai yaitu:
 - 1. Cakupan Pemberian Bantuan Tempat Ibadah;
 - 2. Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren;
 - 3. Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ;
 - 4. Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah;
 - Cakupan Pemeliharaan Benda-benda Bersejarah dan Arkeologi;
 - 6. Cakupan Kajian Seni;
 - 7. Cakupan Tempat Kesenian;
 - 8. Cakupan Organisasi Kesenian;
 - 9. Cakupan Fasilitas Cagar Budaya; dan
 - 10.Cakupan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya dan Kebudayaan.

- b. 6 (enam) indikator mempunyai status capaian akan tercapai vaitu:
 - 1. Cakupan Promosi Cagar Budaya;
 - 2. Cakupan Pemeliharaan Nilai Tradisi Budaya;
 - 3. Cakupan Gelar Seni;
 - 4. Cakupan Misi Kesenian;
 - 5. Cakupan Fasilitas Seni; dan
 - 6. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian.

18) Pemuda dan Olahraga

Kinerja pembangunan Urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga ditunjukkan dengan 5 (lima) indikator kinerja. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Status capaian indikator urusan pemuda dan olah raga ini adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) indikator dengan status capaian telah tercapai, yaitu Besaran Prestasi Olahraga.
- b. 2 (dua) indikator dengan status capaian akan tercapai,
 vaitu:
 - 1. Besaran kegiatan kepemudaan; dan
 - 2. Kegiatan olah raga.
- c. 2 (dua) indikator dengan status capaian perlu upaya keras,yaitu:
 - Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga; dan
 - 2. Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan.

19) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditunjukan dengan 5 (lima) indikator kinerja. Status capaian indikator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut:

- a. 4 (empat) indikator dengan status capaian telah tercapai,
 yaitu:
 - 1. Persentase Peserta Kegiatan Politik Masyarakat;
 - 2. Persentase Kasus Pekat yang Tertangani;
 - 3. Penurunan Kasus SARA;
 - 4. Persentase Penanganan Tindak Penyalahgunaan Narkotika;
- b. 1 (satu) indikator dengan status capaian akan tercapai,

20) Ketahanan Pangan

Kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan diimplementasikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja. Dari keseluruhan IKD tersebut, 3 (tiga) indikator dengan status capaian akan tercapai dan 7 (tujuh)) IKD telah tercapai. IKD yang akan tercapai adalah:

- 1. Peningkatan cadangan pangan masyarakat;
- 2. Persentase meningkatnya skor pola pangan harapan; dan
- 3. Besaran Desa Mandiri Pangan.

IKD yang telah tercapai yaitu:

- 1. Cakupan ketersediaan energi per kapita;
- 2. Cakupan ketersediaan protein per kapita;
- 3. Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah;
- 4. Cakupan penanganan kerawanan pangan;
- 5. Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
- 6. Besaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- 7. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan.

21) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 8 (delapan) IKD RPJMD 2013-2018. Dari total seluruh IKD, 5 (lima) IKD Perlu Upaya Keras, 1 (satu) IKD akan tercapai dan 2 (dua) IKD telah tercapai.

IKD yang perlu upaya keras, yaitu:

- 1. Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa;
- 2. Persentase partisipasi rumah tangga sasaran dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 3. Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan);
- 4. Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna; dan
- 5. Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran.

IKD yang akan tercapai, yaitu Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan.

IKD yang telah tercapai, yaitu:

- Persentase menurunnya rumah tangga sasaran (angka kemiskinan);
- 2. Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif.

22) Bidang Statistik

Kinerja pembangunan Bidang Statistik ditunjukkan dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Besaran ketersediaan data statistik status capaian akan tercapai.

23) Bidang Kearsipan

Urusan Kearsipan diimplementasikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan 1 (satu) indikator dengan status capaian akan tercapai yaitu Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku.

24) Bidang Perpustakaan

Urusan Perpustakaan diimplementasikan oleh Dinas Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi yang terdiri dari 2 (dua) indikator dengan status capaian akan tercapai sebagai berikut:

- a. Rasio Pengunjung Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk;
- b. Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung.

25) Bidang Pertanian

Kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian diimplementasikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui 24 (dua puluh empat) IKD RPJMD 2013-2018. Dari keseluruhan IKD Pertanian, 2 (dua) IKD perlu upaya keras, 11 (sebelas) IKD akan tercapai dan 11 (sebelas) IKD telah tercapai.

Terdapat 2 (dua) indikator dengan status capaian perlu upaya keras yaitu:

1. Peningkatan produktifitas Kopi Robusta;

2. Besaran pertumbuhan dan peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani.

IKD yang akan tercapai adalah:

- 1. Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang;
- 2. Peningkatan produktifitas Padi;
- 3. Peningkatan produktifitas Jagung;
- 4. Peningkatan produktifitas Cabai;
- 5. Peningkatan produktifitas Kobis;
- 6. Peningkatan produktifitas Tembakau;
- 7. Peningkatan produktifitas Kopi Arabika;
- 8. Besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun;
- 9. Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikasi;
- 10. Cakupan pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes); dan
- 11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM Petani.

Sedangkan IKD yang telah tercapai adalah:

- 1. Besaran penerapan pertanian dan perkebunan mengarah organik untuk komoditas utama;
- 2. Persentase perkembangan kawasan agropolitan;
- 3. Besaran peningkatan jumlah alat mesin pertanian dan perkebunan;
- 4. Persentase peningkatan penggunaan bibit dan benih unggul;
- 5. Besaran peningkatan pemasaran hasil pertanian;
- 6. Persentase penanganan serangan hama penyakit;
- 7. Peningkatan produktifitas ubi kayu;
- 8. Persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung;
- 9. Besaran jumlah jalan usaha tani;
- 10. Jumlah peningkatan kapasitas SDM penyuluh; dan
- 11.Rasio jumlah kelompok tani maju dengan jumlah total kelompok tani.

26) Bidang Pertanian Sub Bidang Peternakan

Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Peternakan ini diimplementasikan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dengan jumlah IKD sebanyak 12 (dua belas), dengan capaian 4 (empat) IKD akan tercapai dan 8 (delapan) IKD telah tercapai. IKD yang telah tercapai adalah:

- 1. Angka Kematian Ternak Unggas;
- 2. Angka Kematian Ternak kecil;
- 3. Angka Kematian Ternak besar;
- 4. Peningkatan produksi telur ayam ras petelur;
- 5. Peningkatan populasi sapi;
- 6. Peningkatan populasi domba;
- 7. Peningkatan populasi kambing; dan

8. Peningkatan populasi ayam buras.

IKD yang akan tercapai yaitu:

- 1. Angka Kelahiran anak sapi (pedet) melalui Inseminasi Buatan:
- 2. Peningkatan Produktivitas daging Sapi;
- 3. Peningkatan Produktivitas daging Kambing;
- 4. Peningkatan Produktivitas daging Domba.

27) Bidang Pariwisata

Kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui 6 (enam) IKD. Dari keseluruhan IKD, 1 (satu) IKD upaya keras, 2 (dua) akan tercapai, dan 3 (tiga) telah tercapai. IKD perlu upaya keras adalah besaran lama tinggal wisatawan.

IKD yang akan tercapai:

- 1. Besaran meningkatnya pengelolaan wisata;
- 2. Besaran pengembangan kemitraan pariwisata.

IKD yang telah tercapai yaitu:

- 1. Besaran berkembangnya kawasan wisata;
- 2. Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan;
- Besaran meningkatnya pengembangan produk/event/atraksi wisata.

28) Bidang Perikanan

Kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan diimplementasikan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan melalui 11 (sebelas) indikator kinerja dengan capaian IKD 6 (enam) akan tercapai, 1 (satu) perlu upaya keras dan 4 (empat) IKD telah tercapai.

IKD perlu upaya keras adalah peningkatan produksi perikana tangkap di perairan umum. IKD yang akan tercapai adalah:

- 1. Penggunaan induk ikan unggul;
- 2. Peningkatan produksi benih ikan;
- 3. Peningkatan produksi ikan konsumsi (kolam);
- 4. Peningkatan produksi mina padi;
- 5. Produktivitas benih ikan;
- 6. Produktivitas mina padi.

IKD yang telah tercapai adalah:

- 1. Produktivitas ikan konsumsi;
- 2. Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan;
- 3. Tingkat konsumsi ikan; dan

4. Peningkatan luas lahan budidaya ikan.

29) Bidang Perdagangan

Kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui 9 (sembilan) IKD RPJMD 2013-2018. Dari keseluruhan IKD, terdapat 4 (empat) IKD perlu upaya keras, 1 (satu) IKD akan tercapai dan 4 (empat) IKD telah tercapai.

IKD yang perlu upaya keras adalah:

- 1. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal;
- 2. Cakupan meningkatnya jaminan keamanan produk yang beredar;
- 3. Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang; dan
- 4. Persentase penyelesaian sengketa konsumen.

IKD yang akan tercapai yaitu : besaran meningkatnya Sarana dan

Prasarana Perdagangan. IKD yang telah tercapai yaitu:

- 1. Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
- 2. Cakupan nilai ekspor produk daerah
- 3. Cakupan promosi produk unggulan daerah;
- 4. Cakupan meningkatnya ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya.

30) Bidang Perindustrian

Kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan IKD telah tercapai yaitu Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah dan Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh.

31) Bidang Transmigrasi

Hanya ada 1 (satu) indikator Kinerja pembangunan Urusan Transmigrasi yaitu Persentase penempatan transmigran dengan capaian tahun 2016 perlu upaya keras.

32) Fungsi Penunjang Perencanaan

Kinerja penyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Terdapat 12 (dua belas) IKD RPJMD 2013-2018 pada fungsi penunjang urusan pemerintahan umum dengan capaian: 3 (tiga) IKD akan tercapai dan 9 (sembilan) IKD telah tercapai.

IKD yang akan tercapai adalah:

- 1. Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD;
- 2. Persentase Kegiatan SKPD di Luar Renstra SKPD;
- 3. Indeks Ketimpangan Wiliamson/ Indeks ketimpangan regional.
 Sedangkan IKD yang telah tercapai adalah:
- 1. Besaran Penelitian dan Pengembangan;
- 2. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu;
- 3. Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4. Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5. Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik;
- 6. Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD;
- 7. Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD;
- 8. Persentase program SKPD di Luar RPJMD;
- 9. PDRB Per Kapita.

33) Fungsi penunjang Kepegawaian

Kinerja fungsi penunjang keuangan diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 9 (sembilan) indikator RPJMD 2013-2018, dengan capaian: 2 (dua) IKD akan tercapai dan 7 (tujuh) IKD telah tercapai.

IKD dengan status capaian akan tercapai, yaitu:

- 1. Persentase PNS Lulusan S1;
- 2. Persentase PNS Lulusan S2/S3.

IKD dengan status capaian telah tercapai, yaitu:

- 1. Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional;
- 2. Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS;
- 3. Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu;
- 4. Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu;
- 5. Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa:
- 6. Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan;
- 7. Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong.

34) Fungsi penunjang Keuangan

Kinerja fungsi penunjang keuangan diimplementasikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam 5 (lima) indikator RPJMD 2013-2018, dengan capaian: 4 (empat) IKD telah tercapai, dan 1 (satu) IKD akan tercapai.

IKD dengan status capaian akan tercapai, yaitu: Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di SKPD.

IKD dengan status capaian telah tercapai, yaitu:

- Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun
- 2. Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah
- 3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

35) Fungsi penunjang lainnya

Kinerja fungsi penunjang lainnya diimplementasikan oleh Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dalam 31 (tiga puluh satu) indikator RPJMD 2013-2018, dengan capaian: 5 (lima) IKD perlu upaya keras, 6 (enam) IKD akan tercapai dan 20 (dua puluh) IKD telah tercapai.

IKD dengan status capaian perlu upaya keras, yaitu :

- 1. Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kecamatan;
- 2. Cakupan Pelaksanaan SPM;
- 3. Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik;
- 4. Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP;
- 5. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi

melalui media baru.

IKD dengan status capaian akan tercapai, yaitu:

- Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti
 Terhadap Jumlah Total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu)
 Tahun:
- 2. Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa;
- 3. Persentase Jumlah SKPD yang Menyampaikan DURP dengan tepat waktu;
- 4. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 5. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat;
- 6. Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda;

IKD dengan status capaian telah tercapai, yaitu:

- 1. Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan;
- 2. Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah;
- 3. Besaran kerjasama daerah;
- 4. Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Mengalami Kasus;
- 5. Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong;
- 6. Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong;
- 7. Cakupan Pembinaan Administrasi Desa;
- 8. Persentase terkendalinya pemasaran komoditas unggulan daerah:
- 9. Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu;
- 10. Cakupan Pemberian Bantuan Tempat Ibadah;
- 11. Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren;
- 12. Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ;
- 13. Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah;
- 14. Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Persentase Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN);
- 16. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Tradisional;
- 17. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Interpersonal;
- 18. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang;
- 19. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa;
- 20.Persentase Jumlah Keputusan DPRD yang Ditindak Lanjuti Terhadap Keputusan DPRD yang Ditetapkan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

a. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan memperhatikan evaluasi RKPD tahun 2016 maka permasalahan pembangunan di Kabupaten Temanggung yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

MISI 1:

- 1) Terbatasnya infrastruktur dan sarana prasarana pertanian/perikanan;
- 2) Belum optimalnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pertanian serta diversifikasi produk dalam mendukung perkembangan agribisnis, agrowisata, dan agroindustri;
- 3) Belum optimalnya pengembangan kawasan pertanian/perikanan.
- 4) Belum optimalnya pengelolaan cadangan dan penganekaragaman pangan daerah;
- 5) Masih rendahnya produktifitas komoditas perkebunan (kopi robusta);
- 6) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani, peternak, dan penyuluhan pertanian;
- 7) Masih rendahnya produksi perikanan tangkap di perairan umum;
- 8) Belum optimalnya peran koperasi dan UKM;
- 9) Belum optimalnya pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal;
- 10) Masih rendahnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar;
- 11)Masih rendahnya cakupan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang
- 12) Masih rendahnya penyelesaian sengketa konsumen;
- 13)Sarana dan prasarana perdagangan masih belum merata di semua wilayah;
- 14) Rendahnya nilai tambah produksi dan daya saing produk industri;
- 15) Belum optimalnya perkembangan sentra atau klaster industri potensial;
- 16) Masih rendahnya lama tinggal wisatawan;
- 17)Belum optimalnya pengembangan potensi wisata;
- 18) Kualitas Sumber Daya Manusia para pelaku pariwisata masih rendah;
- 19) Strategi Promosi dalam pemasaran pariwisata belum optimal;

MISI 2:

 Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Rumah Tangga Sasaran yang belum tertangani;

- 2) Masih rendahnya cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis;
- 3) Belum optimalnya penangananan kerusakan fisik akibat bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sementara tanggap darurat pasca bencana;
- 4) Belum optimalnya penanganan korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;
- 5) Masih rendahnya persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama;
- 6) Belum optimalnya pengujian peralatan di perusahaan;
- 7) Belum optimalnya peningkatan klasifikasi tipe desa;
- 8) Kurangnya Partisipasi Rumah Tangga Miskin dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- 9) Kurangnya cakupan lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif (BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, Lumbung Pangan);
- 10)Masih rendahnya cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna
- Belum meratanya cakupan bantuan prasarana olah raga bagi klub olah raga;
- 12) Prestasi kegiatan kepemudaan belum optimal;
- 13)Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam upaya peningkatan kapasitas anggotanya, khususnya dalam memberikan kemandirian dan kecakapan untuk hidup;
- 14) Masih terjadi kasus SARA;
- 15) Belum optimalnya penanganan tindak penyalahgunaan narkotika;

MISI 3:

- Belum tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkar Kota Parakan;
- Masih adanya jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan trotoar dengan kondisi yang rusak;
- Belum optimalnya ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya;
- 4) Belum optimalnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

- 5) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan (AMPL);
- 6) Adanya kawasan permukiman yang berada di daerah rawan bencana;
- 7) Masih adanya permukiman kumuh;
- 8) Sarana dan prasarana lingkungan sehat di kawasan permukiman masih belum memenuhi standart.
- 9) Masih adanya Keluarga yang belum memiliki akses atas rumah sehat, makanan sehat, dan lingkungan sehat;
- 10)Masih ada tanah pemerintah desa yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten yang belum diganti;
- 11) Adanya konflik pertanahan di masyarakat;
- 12)Sarana dan prasarana jalan, berupa rambu-rambu, penunjuk jalan, marka jalan, pengaman jalan, dan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) masih kurang
- 13) Belum optimalnya peningkatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan terminal, sub terminal, dan halte;
- 14)Belum optimalnya peran serta perempuan dan anak serta kesetaraan gender dalam pembangunan.
- 15)Belum optimalnya pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan bendabenda budaya dan cagar budaya;
- 16) Pelayanan angkutan umum belum merata di semua wilayah;
- 17) **B**elum optimalnya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan;
- 18) Masih rendahnya aksesibilitas internet di ruang publik;
- 19)Belum optimalnya perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 20) Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara
- 21) Besaran Penanganan Lahan kritis
- 22) terbangunnya sumber energi alternatif terbarukan;

MISI 4

- 1) Kurangnya jumlah dan belum meratanya distribusi guruPNS;
- 2) Rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru;
- 3) Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar;
- 4) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah;

MISI 5

- 1) Belum optimalnya pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD;
- Masih rendahnya angka penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate);
- 3) Masih adanya kematian bayi, balita dan ibu;
- 4) Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin, wilayah terpencil, dan perbatasan, serta Lansia;
- 5) Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar;
- 6) Masih rendahnya Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan;

MISI 6:

- 1) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik dalam perencanaan dan pengendalian evaluasi pembangunan daerah;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi pembangunan dan kajian yang sudah disusun sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah tahun berikutnya;
- 4) Masih rendahnya Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pembangunan desa;
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government);
- 7) Banyaknya pegawai PNS yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) baik diklat penjenjangan maupun diklat tekhnis;
- 8) Belum semua Perangkat Daerah, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang menyusun standar pelayanan publik;
- 9) Belum semua Perangkat Daerah, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP;

- 10) Belum semua jenis perizinan yang memiliki standar pelayanan publik atau standar operasional prosedur;
- 11) Rendahnya minat baca masyarakat;
- 12) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanaman modal;
- 13) Kurangnya intensitas patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 14) Kurangnya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi;
- 15) Belum semua keluarga memiliki Kartu Keluarga (KK);

b. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok dan dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta keberlanjutan pembangunan daerah, maka menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 adalah:

1) Pertanian modern yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi

Sebagai daerah agraris Kabupaten Temanggung melihat bahwa sektor pertanian berperan dalam peningkatan daya saing ekonomi. Keterkaitan antara produk hulu (pertanian) dan produk hilir (industri) menjadi sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang baik dalam budidaya maupun pengolahan hasil untuk dapat dioptimalkan. Peran lembaga ekonomi produktif menjadi hal harus ditingkatkan guna meningkatkan daya saing.

Klasterisasi dan pengembangan kelompok usaha menjadi salah satu pendorong dalam mewujudkan daya saing daerah yang sehat. Dalam rangka peningkatan daya saing pengembangan kawasan dapat dilaksanakan. Pengembangan kawasan ini dapat meminimalisir kelemahan yang ada disektor padat karya ini. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta Promosi dalam rangka memperluas pasar dan meningkatkan penetrasi produk unggulan daerah dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi dengan dijamin adanya keberlanjutan produk.

Peningkatan penggunaan bibit/benih unggul di sektor pertanian,

perkebunan, perikanan dan peternakan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas suatu produk. Disamping itu diversifikasi jenis tanaman dan diversifikasi produk industry juga diperlukan guna mempertahankan keberlangsungan usaha. Peningkatan produk tidak akan lepas dari kapasitas SDM pengelola dan lembaga pendukung seperti koperasi dan lain sebagainya terus ditingkatkan dengan pelatihan dan stimulan modal.

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai daerah agraris, Pariwisata berbasis alam dapat menjadi salah satu sektor yang diunggulkan. Dengan kelebihan tersebut dan didukung dengan produk unggulan daerah pariwisata dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat menjadi salah satu daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Pengurangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang ada di Kabupaten Temanggung. Kemiskinan ini suatu maslah yang bersifat multidimensi yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Salah satu cara pengurangan angka kemiskinan ini adalah dengan meningkatkan pembangunan yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar tersebut adalah pangan (raskin, rastra), pendidikan (bantuan siswa miskin), kesehatan (BPJS, JKT), air minum (PSAB, PAMSIMAS), Sanitasi (IPAL, SLBM) dan perumahan (RTLH).

Ekonomi kerakyatan dapat menjadi salah satu cara mengurangi kemiskinan. Perkuatan ekonomi kerakyatan angka dapat dilaksanakan dengan cara perkuatan kelembagaan dan memperluas jaringan kemitraan serta stimulant berusaha. Perkuatan ekonomi kerakyatan ini dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan lembaga atau perusahaan baik secara langsung maupun dengan pengembangan dan peningkatan kemitraan perusahaan dengan pemerintah/masyarakat diimplementasikan yang dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).

3) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur yang merata dan dalam kondisi yang baik akan

dapat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan mobilisasi sehingga daya saing ekonomi akan meningkat. Kewenangan penanganan jalan masih menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam meningkatkan kualitas infastruktur jalan. Kedepan perlu disempurnakan regulasi yang mengatur kewenangan penanganan infastruktur jalan ini dapat diperjelas. Dengan semakin jelasnya kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pembangunan jalan beserta bangunan/saran pendukungnya.

Infrastruktur lain yang tak penting adalah sarana dan prasarana irigasi. Irigasi memegang peranan vital dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan produktivitas pangan. Pengembangan jaringan baru, dan peningkatan kapasitas jaringan diharapkan akan mendukung program ketahanan pangan melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Guna mempertahankan ketersediaan air maka upaya konservasi lingkungan khususnya lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi suatu yang harus dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan posisi geografis kabupaten Temanggung yang berada di daerah hulu. Untuk itu fungsi kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk dapat dipertahankan sesuai dengan rencana peruntukkannya.

Kebutuhan dasar manusia yang dapat dipenuhi dari pembangunan infrastruktur adalah papan (perumahan), air minum dan sanitasi. Dengan demikian pembangunan dan penyediaan sarana prasarana kawasan perumahan dan pemukiman menjadi penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut terkait dengan masih adanya kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Temanggung.

4) Peningkatan Kesehatan

Salah satu indikator kesehatan yang sekaligus menjadi kebutuhan dasar adalah air bersih dan sanitasi. Penetrasi program kedua hal tersebut masih perlu ditingkatkan karena hal tersebut sangat mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dengan terlaksananya PHBS maka beberapa indikator kesehatan akan tercapai. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kesehatan maka pengembangan sarana dan prasarana kesehatan

beserta pendukungnya masih sangat diperlukan. Distribusi tenaga kesehatan, paramedisyang ada menjadi menjadi satu pekerjaan rumah bagi Kabupaten Temanggung. Hal tersebut tidak lepas masih kurangnya tenaga kesehatan yang ada dan bersedia bertugas di Kabupaten Temanggung. Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan peran jaminan kesehatan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Sistem dan mekanisme pelayanan kesehatan terkait dengan jaminan kesehatan masih harus disosialisasikan secara masif yang diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan.

5) Peningkatan kualitas Pendidikan

Pemerintah mempunyai tugas mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang didukung dengan sumberya pendidikan yang handal. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan sumber daya manusia yang menjadi pelaku pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilaksanakan dengan wajib belajar 12 tahun. Hal lain yang dapat dilaksanakan dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan distribusi tenaga pendidik dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Disamping itu peningkatan kualitas dan kompetensi dari tenaga pendidik harus dilaksanakan.

6) Tata Kelola Pemerintahan

Dengan diundangkannya Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan. Pembagian peran yang lebih jelas antara Pemerintah daerah dan desa akan mempercepat laju pembangunan. Pembagian peran baik dalam hal pelaksanaan pembangunan maupun pembiayaan dapat menjadi salah satu opsi hambatan dalam pembangunan khususnya dalam hal kewenangan penanganan keterbatasan anggaran. Tentu saja membutuhkan suatu regulasi lanjutan yang dapat mendorong terlaksananya pembagian peran tersebut. Dengan pembagian peran tersebut kapasitas Pemerintahan Desa juga dapat di tingkatkan.

Organisasi perangkat daerah yang baru dan didukung dengan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga akan menjadi factor utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Disisi lain peningkatan kapasitas PNS juga tetap dibutuhkan dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan baik dalam untuk penjenjangan maupun teknis guna menunjang kinerja.

Guna menunjang terwujudnya tata kelola yang baik *e-government* menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan. Transparansi keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan *e-government*. Implementasi *e-government*dapat dilaksanakan dengan berbagai media baik cetak maupun elektronik agar transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tetap terjaga.Persyaratan, prosedur dan mekanisme pelayanan terhadap masyarakat di berbagai urusan harus jelas dalam bentuk regulasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.

Salah satu perwujudan demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa. Suksesnya pemilukada dan pilkades tersebut menjadi salah satu tolok ukur kedewasaan dalam berdemokrasi sekaligus pelaksanaan pemerintahan yang bersih. Disamping itu peran serta dari masyarakat merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat berlanjut dalam penentuan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB. III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

Untuk memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kabupaten Temanggung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018, maka perlu diurakan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka. Pada bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2018.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi dan Nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Arah kebijakan perekonomian di tahun 2018 juga disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Daerah tahun 2013-2018. Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung di tahun 2018 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah terdiri dari faktor yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah. Kebijakan dari pemerintah pusat yang terkait dengan sektor moneter dan sektor rill serta pengaruh kondisi perekonomian global akan berdampak pada kondisi perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 sedikit melambat dengan angka perkiraan 5,06. Pertumbuhan ekonomi tersebut sedikit melambat dari tahun 2015 diangka 5,17 dan sama dengan kondisi tahun 2014, yaitu 5,06. Namun secara umum belum bisa kembali ke kondisi perekonomian seperti tahun 2011 yang mencapai 6,09.

Perekonomian Indonesia masih menghadapi permasalahan struktural berupa pola konsumsi masyarakat kelas menengah yang cenderung masih banyak menggunakan barang impor; daya saing yang relatif rendah; serta permasalahan infrastruktur dan konektivitas yang sedang dalam proses perbaikan. Krisis perekonomian global yang masih belum sepenuhnya pulih (terutama di negara negara mitra dagang utama Indonesia) masih berpengaruh terhadap penurunan nilai ekspor akibat lemahnya permintaan negara tujuan utama ekspor.

Perbaikan regulasi dan peningkatan infrastruktur diharapkan dapat menjadi faktor penarik investasi di Kabupaten Temanggung. Perbaikan kinerja perekonomian (yang meningkatkan daya beli) yang disertai dengan inflasi yang stabil diharapkan akan mendorong kenaikan konsumsi masyarakat Kabupaten Temanggung di tahun 2017. Namun dengan kondisi musim yang diperkirakan tidak begitu menunjang sektor pertanian dan dengan penyelenggaran Pemilukada di Tahun 2017, dimungkinkan pemilik modal akan lebih menahan diri untuk berinvestasi maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung di tahun 2017 diperkirakan akan berada pada kisaran 5,00% - 5,03%.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Temanggung

		33 3
No	Tahun	LPE
1	2011	6.09
2	2012	4,27
3	2013	5,20
4	2014	5,06
5	2015	5,17
6*)	2016	5,06
7**)	2017	5,00 - 5,03

Sumber : Bappeda Kab. Temanggung, 2016

Indikator perekonomian daerah yang lain adalah Laju **Inflasi**. Inflasi Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 tercatat sebesar 2,42 atau mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar 2,72. Penurunan ini disebabkan antara lain oleh kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipicu oleh penurunan harga minyak dunia. Selain itu penurunan inflasi juga disebabkan oleh terjaganya pasokan komoditas strategis dan terjaganya distribusi komoditas strategis.

^{*) (}data sementara, data diolah) **) angka proyeksi (data diolah)

Tabel 3.2.
Inflasi Kabupaten Temanggung

No	Tahun	Inflasi
1	2011	2,42
2	2012	4,73
3	2013	7,01
4	2014	7,81
5	2015	2,74
6	2016	2,42
7**)	2017	3,20

Sumber: Bappeda Kab. Temanggung, 2016

Inflasi tahun 2017, diperkirakan naik menjadi 3,20 jika dibandingkan tahun 2016. Hal tersebut karena pengaruh rencana kenaikan tarif dasar listrik, perkiraan efek pelaksanana pemilukada, perkiraan naiknya nilai tukar rupiah sebagai pengaruh perekonomian global.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung di tahun 2016 diperkirakan sebesar 2,22 atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar 1,50. Kenaikan tersebut menggambarkan bahwa peluang kerja yang ada belum dapat memenuhi angkatan kerja yang ada.

Tabel 3.3.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung

No	Tahun	ТРТ
1	2011	3,54
2	2012	3,39
3	2013	4,67
4	2014	3,19
5	2015	1,50
6*)	2016	2,22
7**)	2017	3,25

Sumber: Bappeda Kab. Temanggung, 2016

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2017, diperkirakan naik menjadi 3,25. Hal tersebut karena pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 yang berpengaruh terhadap pemenuhan kesempatan kerja.

^{**)} angka proyeksi (data diolah)

^{*) (}data sementara, data diolah) **) angka proyeksi (data diolah)

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Kondisi perekonomi daerah tahun 2018 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah maupun faktor eksternal yang berdasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2018 adalah:

- Potensi kenaikan inflasi yang berasal dari faktor administered price seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika terjadi perubahan pada dua hal tersebut akan berpotensi meningkatkan nilai inflasi.
- Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur Kab. Temanggung merupakan suatu keharusan untuk mendukung perekonomian lokal.
- Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
- Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2015-2017) yang masih sangat rendah, hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Temanggung di tahun 2018 antara lain:

 Posisi Kabupaten Temanggung yang strategis, yang dilalui jalur provinsi sangat berpotensi terhadap kondisi perekonomian di daerah.

- Rencana pembangunan jalan tol yang melewati Kab. Temanggung akan menambah akses investor masuk ke wilayah Kabupaten Temanggung.
- Peluang pengembangan pasar pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), terutama untuk komoditas unggulan yang terus dipromosikan ke luar negeri, diantaranya adalah Kopi.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Temanggung serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 maka prospek perekonomian daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,04–5,07. Angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan angka perkiraan Tahun 2017.
 Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Calon Legislatif yang bersifat nasional akan lebih sedikit berpengaruh jika dibandingkan pemilukada yang bersifat lokal.
- Inflasi diperkirakan akan berada di kisaran 4,7. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan angka perkiraan Tahun 2017. Hal ini terutama diakibatkan oleh kenaikan Tarif Dasar Listrik dimana kebijakan pemerintah yang secara bertahap terus mengurangi subsidi.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan menjadi 2,15 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan angka perkiraan Tahun 2017. Upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi dan pengembangan kewirausahaan (entrepreunership) diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kab.Temanggung.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Implikasi dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada

masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Khusus untuk sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah berupa Dana Transfer maupun dana bagi hasil sangat tergantung dengan kemampuan keuangan negara/provinsi. Dengan demikian diperlukan perencanaan yang cermat mengingat akan dimanfaakan untuk pembiayaan pembangunan.

Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanan tugas, pokok dan fungsinya. Disamping hal tersebut, juga memperhatikan pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencaann. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan pengalokasian belanja daerah Kabupaten Temanggung adalah:

- Mendukung pencapaian visi dan misi daerah.
- Mendukung tercapainya Indikator Kinerja Daerah yang masih perlu upaya keras.
- Memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja gaji pegawai dan belanja wajib lainnya.
- Memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- Memenuhi kebutuhan daerah berkenaan dengan belanja kegiatan yang bersifat strategis, penting, dan mendesak.

- Memenuhi kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, serta dalam rangka percepatan pembangunan desa.
- Memenuhi kebutuhan masyarakat sehubungan dengan kehidupan berdemokrasi, dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun, Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.

Sampai dengan tahun 2017, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.

Pendapatan daerah di APBD Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan yang terjadi di masingmasing komponen pendapatan daerah. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan, karena adanya peningkatan pendapatan daerah yang diprediksikan sebesar Rp. 1.935.080.697.600,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.200.200.000.000,- Dana Perimbangan sebesar Rp.1.159.196.907.600,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.575.683.790.000,-

Namun demikian, kerangka pendapatan sebagaimana tersebut pada tabel di atas, sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional dan daerah, besaran dana transfer dari pemerintah serta transfer

keuangan.			

Tabel 3.16. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	REALISASI APBD 2016	APBD 2017	PAGU INDIKATIF 2018
4	PENDAPATAN DAERAH	1.709.015.65 5.249	1.842.230.67 3.410	1.972.146.907. 600
4.1	Pendapatan Asli Daerah	259.065.00 8.786	230.047.28 9.410	200.200. 000.000
4.2	Dana perimbangan	1.082.848.63 1.971	1.092.044.13 1.000	1.214.196.907. 600
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	367.102.01 4.492	520.139.25 3.000	557.750. 000.000

BPPKAD Kabupaten Temanggung Sumber:

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2018

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Temanggung di tahun 2018 maka kebijakan keuangan daerah yang diambil adalah sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi.

Secara khusus, terjadi beberapa kendala yang dialami dalam meningkatkan pendapatan khususnya di komponen pendapatan asli daerah, yaitu:

- Belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi, sehingga dalam penetapan target pendapatan masih bersifat *line item budgeting*;
- Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- Belum optimalnya manajemen pendapatan asli daerah;
- Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah;
- Belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Sedangkan untuk pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sangat tergantung dari besaran yang akan dibagikan ke daerah.

Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi pendapatan daerah dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- Meningkatkan manajemen pendapatan asli daerah;
- Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsipprinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan umum dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 adalah :

- Mendukung pencapaian visi dan misi daerah.
- Mendukung tercapainya Indikator Kinerja Daerah yang masih perlu upaya keras.
- Memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja gaji pegawai.
- Memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- Memenuhi kebutuhan daerah berkenaan dengan belanja kegiatan yang bersifat strategis, penting, dan mendesak.
- Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok dan isu strategis yang dihadapi daerah.
- Berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, serta dalam rangka percepatan pembangunan desa

Tingginya belanja tidak langsung bukan menggambarkan rendahnya belanja yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, mengingat belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil secara riil diperuntukkan bagi masyarakat maupun desa dalam kerangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Proporsi belanja tidak langsung terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berkaitan dengan belanja pegawai. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi belanja langsung selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.17 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	PERUBAHAN 2016	APBD 2017	PAGU INDIKATIF 2018
5	BELANJA DAERAH	1.881.134.953. 956	1.888.027.23 1.040	2.325.952.041.859
5,1	Belanja Tidak Langsung	1.084.122.493. 373	1.087.160.65 7.445	987.968.006.492
5.1.1	Belanja Pegawai	755.765.592.32 4	685.112.233.9 41	530.266.439. 997
5.1.2	Belanja Bunga	6.291.666.0 00	6.552.628. 284	
5.1.4	Belanja Hibah	28.009.400.0 00	49.061.586. 000	68.144.661.495
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.095.500.0 00	10.891.353. 625	19.942.905.000
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Pemerintahan Desa	4.612.500.0 00	4.582.500. 000	15.000.000
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	267.008.697.04 9	330.460.355.5 95	358.599.000.000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.339.138.0 00	500.000. 000	
5.1.9	BLUD			11.000.000.000
5.2	Belanja Langsung	797.012.460. 583	800.866.57 3.595	1.337.984.035.367
5.2.1	Belanja Pegawai	48.299.051.8 45	65.342.065. 024	
5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	317.908.454.86 5	306.255.802.7 85	
5.2.1	Belanja Modal	430.804.953.87 3	429.268.705.7 86	

Sumber : Kabupaten BPPKAD

Temanggung

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD.Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Kebijakan pembiayaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

Besarnya SILPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran 2018 adalah hasil perhitungan SILPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian angka SILPA adalah bersifat prediksi yang bisa diakibatkan karena adanya efisiensi belanja maupun kelebihan pendapatan daerah.

b) Penerimaan pinjaman daerah

Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SILPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman ini dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.

c) Penerimaan pembiayaan yang lain

Dapat berupa penerimaan kembali atas invetasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah,

pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a) Penyertaan modal pemerintah daerah

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan atau barang daerah akan disesuaikan sesuai dengan roadmap penyertaan modal daerah.

b) Pembentukan dana cadangan

Tidak lagi dibentuk dana cadangan digunakan untuk Pemilihan Bupati Temanggung.

c) Pembayaran pokok hutang

Pada tahun 2018 pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah untuk pembangunan Pasar Legi Parakan dan PT Bank Jateng untuk pembangunan RSUD 7 lantai.

d) Pengeluaran pembiayaan yang lain

Pengeluaran berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Tabel 3.18 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2018

6	PEMBIAYAAN DAERAH	172.119.29 8.707	45.796.557 .630	53.000.000.000
6,1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	227.029.43 0.342	105.296.557. 630	88.000.000.000
6.1.1	SiLPA	188.309.853. 466	97.296.557.6 30	65.000.000.000
6.1.4	Penerimaan Pinjaman & Obligasi Daerah	30.870.123 .200		
6.1.7	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	7.849.453 .676	8.000.000.0 00	8.000.000.000
	Pencairan Dana Cadangan			15.000.000.000
6,2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	54.910.1 31.635	59.500.000 .000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	7.500.000 .000	7.500.000.0	35.000.000.00 0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pem Daerah	9.950.000 .000	10.000.000.0 00	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	34.000.000 .000	34.000.000.0 00	10.000.000.000
6.2.4	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	8.000.000 .000	8.000.000.0 00	17.000.000.000

Kabupaten

Sumber : BPPKAD

Temanggung

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 harus memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dalam mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 terdapat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:

1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 adalah "Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih", yang mengandung makna:

- a. Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor tetap dengan memperhatikan peningkatan pertanian kualitas lingkungan hidup.
- b. **Bermasyarakat Agamis** merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan

ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

- c. **Berbudaya** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.
- d. **Sejahtera** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan agamis. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- e. **Pemerintahan yang bersih** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

2. Misi

Dalam mewujudkan Visi di atas, pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan pembangunan di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

a. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan

Dalam menjabarkan Visi Daerah, Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah

Kabupaten Temanggung karena Sektor Pertanian diharapkan dapat menjadi sektor tumpuan kehidupan masyarakat. Sektor Pertanian yang dimaksud adalah meliputi sub sektor pertanian, sub sektor perikanan, dan sub sektor kehutanan. Untuk sub sektor kehutanan, karena telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka sebagian dari misi ini tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Pengembangan pertanian yang modern didukung oleh pengembangan di sektor perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, berupa pengembangan agribisnis, agroindustri, dan agrowisata.

Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri merupakan bentuk integrasi pengembangan pertanian (pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan) dengan pengembangan industri pertanian dari hulu sampai dan hilir yang didukung dengan pengembangan sektor-sektor jasa yang terkait dengan pengembangan pertanian. Sedangkan pengembangan Agrowisata merupakan upaya pengembangan pariwisata yang berbasis pertanian.

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah diarahkan pula pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mampu bersaing secara kompetitif. Pengembangan potensi lokal tersebut adalah juga dalam rangka menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, dikarenakan komoditas yang memiliki keungulan komparatif tersebut memiliki multiplier effect yang cukup tinggi terhadap sektor yang lain.

Kebijakan pembangunan tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, dan juga didukung oleh pengembangan di sektor koperasi dan UMKM.

b. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan
 Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera

Visi Daerah juga mengamanatkan harapan terwujudnya masyarakat yang agamis, berbudaya, dan sejahtera baik di perdesaan maupun perkotaan. Kesejahteraan masyarakat yang diharapkan tersebut juga meliputi kesejahteraan sosial, ketertiban dan ketentraman

masyarakat, tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha baik di daerah maupun di lain daerah, terciptanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatnya peran pemuda, dan berkembangnya olahraga di Kabupaten Temanggung.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diharapkan juga tetap melibatkan peran serta masyarakat itu sendiri sehingga pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu hal yang disentuh melalui misi ini.

Upaya untuk menjaga budaya dan kebudayaan juga merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Budaya dan Kebudayaan yang terjaga diharapkan mampu tercipta karakter khusus di masyarakat Kabupaten Temanggung yaitu masyarakat yang berbudaya.

Seluruh harapan yang ada tersebut akan sangat terdukung jika tercipta pula kehidupan masyarakat yang agamis, diantaranya dengan adanya peningkatan keimanan umat beragama, tersedianya sarana dan prasara keagamaan, dan toleransi antar umat beragama

c. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan

Upaya untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak dan berwawasan lingkungan, baik diperdesaan dan perkotaan, didukung oleh pengembangan insfrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan sarana perhubungan, pengembangan sanitasi lingkungan, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah, dan pengembangan perumahan dan kawasan perumahan itu sendiri.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan mempunyai makna bahwa segala pembangunan yang dilaksanakan saat ini dan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia saat ini diharapkan tidak mengurangi kesempatan bagi generasi mendatang untuk melakukan pembangunan yang juga memanfaatkan sumberdaya di masa datang.

d. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal Pendidikan merupakan satu urusan yang tidak mungkin ditinggalkan, dan selalu memperoleh perhatian lebih dari pemerintah. Pendidikan yang baik dan dapat diakses oleh semua masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik yang bermuara pada peningkatan kapasitas intelektual masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih luas maupun meningkatkan peran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pendidikan yang dikembangkan juga tidak terlepas dari kearifan lokal di Kabupaten Temanggung, sehingga akan diberikan sebuah materi pendidikan berupa pendidikan budi pekerti, pendidikan budaya Jawa, dan pendidikan lain yang mengacu pada kearifan lokal yang ada.

e. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga merupakan satu hal yang diperhatikan oleh pemerintah. Kegiatan pembangunan niscaya tidak akan terlaksana dengan maksimal andaikata tidak didukung oleh kualitas kehidupan masyarakat yang baik.

Pemerataan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana kesehatan menjadi hal utama yang diperhatikan di misi ini, dengan harapan bahwa pemerataan akses tersebut juga didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia kesehatan.

Satu hal lain yang ingin diwujudkan adalah bahwa kesehatan akan mampu menjadi budaya di masyarakat, baik kesehatan pribadi, maupun kesehatan lingkungan. Sehingga muncul kesadaran masyarakat untuk membudayakan hidup sehat di lingkungan masingmasing.

f. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik, atau dalam kata lain Good Government and Clean Governance maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa.

Hal tersebut antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas SDM Aparatur, sehinga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, dan meningkatkan kualitas pengawasan internal yang dilakukan. Upaya tersebut di atas sekaligus menjadi rangkaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan pembangunan harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama dan sinergis. Terlebih untuk pelaksanaan di tahun terakhir RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu: "BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG". Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

3. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut dalam Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Penjabaran ke dalam Tujuan, Sasaran dan Arah kebijakan dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas dalam pelaksanaan Visi dan Misi Daerah, sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1. Keterkaitan Antara Visi , Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Misi 1: Mewujudkan Peningkatan Pertanian	Meningkatkan penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian dan peternakan	Meningkatnya penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor pertanian/perkebunan
Moderen yang Berwawasan Lingkungan;		2. Meningkatnya penerapan teknologi, inovasi peternakan	dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan
Enghangen,			3. Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi dalam pemasaran produk Pertanian dan memperbesar akses pemasaran
			4. Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas produk pertanian dan pencegahan hama dan penyakit
	2. Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan	5. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian	5. Meningkatkan produktivitas tembakau
	Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	6. Meningkatnya kualitas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	6. Meningkatkan upaya intensifikasi dan diversifikasi produksi hasil peternakan
	4. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	 7. Meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi tanaman pertanian dan perkebunan 8. Meningkatnya produktivitas ternak 	
	Torrobonian, dan 1 stornanan	9. Meningkatnya Penyelenggaraan Penyuluhan	9. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas kelembagaan petani dan SDM penyuluhan
	7. Meningkatkan Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	10. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	10. Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana dan Insfrastruktur pendukung pertanian (jalan usaha tani dan pengelolaan embung)
		11. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Agropolitan	11. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan pengelolaan kawasan agropolitan yang sudah terbentuk

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	9. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Perikanan	12. Meningkatnya Penerapan Teknologi Perikanan	12. Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Perikanan khususnya penggunaan benih unggul ikan13. Meningkatkan produktivitas perikanan di perairan umum
	11. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	14. Meningkatnya Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Perikanan	14. Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk olahan Perikanan yang didukung dengan pengembangan akses pemasaran produk perikanan
		15. Meningkatnya ketahanan pangan	15. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan
	13. Meningkatkan Pengembangan Agroindustri Berbasis Sumber Daya Lokal		16. Mengembangkan Kawasan Agrowisata17. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana serta event pariwisata dengan pengembangan destinasi pariwisata
	15. Meningkatkan Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Unggulan Daerah		18. Meningkatkan pembinaan pengelolaan destinasi wisata dan kemitraan pariwisata
	16. Meningkatkan Peran Sektor Pendukung	19. Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	19. Meningkatkan pengembangan Industri kecil dan UMKM yang berbasis pertanian dan komoditas unggulan daerah lainnya
	Pengembangan Agribisnis, Agroindustri, dan Agrowisata	20. Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	20. Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan pasar daerah sebagai salah satu Sarana dan Prasarana Perdagangan
		21. Meningkatnya Daya Saing Produk	21. Meningkatkan nilai ekspor produk daerah dan promosi produk unggulan daerah serta pembinaan usaha informal
		22. Meningkatnya Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen)	22. Meningkatkan perlindungan atas konsumen dan sengketa konsumen terhadap produk yang beredar
		23. Meningkatnya Peran Sektor Jasa, Kelembagaan Koperasi dan UMKM	23. Meningkatkan Kualitas dan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM
		24. Menguatnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM	
Misi 2 :	Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
Mewujudkan Peningkatan Kehidupan		2. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berupa peningkatan lembaga sosial, CSR Sosial, dan organisasi

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang		3. Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran	sosial lainnya dalam menangani PMKS
Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera	4. Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	4. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	4. Meningkatkan upaya penanganan terhadap bencana alam
	5. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja	5. Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	5. Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja melalui pelatihan yang berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan berbasis kewirausahaan
		6. Meningkatknya Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran	6. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran melalui upaya peningkatan penempatan pencari kerja
		7. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga	7. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja
	6. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan	8. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan	8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat
	7. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi	9. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi	9. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi dan peningkatan kualitas transmigran
	8. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	10. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak	10. Meningkatkan upaya penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak
		11. Meningkatnya Kualitas Kabupaten Layak Anak	11. Meningkatkan perlindungan anak dan pengembangan pemenuhan hak-hak anak
	10.Meningkatkan kesetaraan gender	12. Meningkatknya kesetaraan gender	12. Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender melalui implementasi anggaran yang responsif gender
	11.Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan	13. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	13. Meningkatkan Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan
	Olahraga	14. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	14. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga
		15. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Atlit Olahraga	pembinaan olahraga Prestasi dan Atlit Olahraga
	14.Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan	16. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan	16. Meningkatkan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	15.Mengembangkan dan Melestarikan Kebudayaan Daerah	17. Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	17. Meningkatan Pengembangan, Pelestarian dan pemeliharaan nilai tradisi budaya dan benda bersejarah serta benda arkeologi
	16.Meningkatkan Sarana Budaya dan Kebudayaan	18. Meningkatnya Promosi Seni dan Cagar Budaya	18. Meningkatkan Promosi Seni dan Cagar Budaya melalui penyelenggaraan gelar seni, kajian seni, promosi seni, organisasi seni, dan tempat-tempat kesenian
		19. Meningkatnya Sarana Budaya dan Kebudayaan	19. Meningkatkan Sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kekayaan Budaya dan Kebudayaan
	17.Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik, Wawasan Kebangsaan, Keamanan, dan	dan Wawasan Kebangsaan	20. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan masyarakat melalui pendidikan politik masyarakat dan penanganan penyakit masyarakat
	Ketertiban		21. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat
	19.Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	22. Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana Kebakaran	22. Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana kebakaran melalui upaya meningkatkan luasan pelayanan, waktu tanggap kebakaran dan penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran
Misi 3: Mewujudkan	Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebagai penunjang perekonomian	1. Meningkatnya sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Memadai	1. Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai melalui pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan
Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan	2. Meningkatnya sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Memadai		2. Meningkatkan ketersediaan ruas jalan baru sebagai alternatif pemecahan masalah dalam mengurai kemacetan
dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan	3. Meningkatkan Insfrastruktur Sumber Daya Air untuk peningkatan produkivitas perekonomian	3. Meningkatnya sarana dan prasarana Insfrastruktur Sumber Daya Air	melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan drainase
	4. Meningkatkan pelayanan pemerintahan	melalui ketersediaan bangunan instansi pemerintah	4. Meningkatkan kelayakan bangunan-bangunan pemerintahan berupa pelaksanaan pemugaran bangunan instansi pemerintah
		5. Meningkatkan kualitas bangunan instansi pemerintah	5. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman untuk mewujudkan rumah yang layak dan terjangkau	6. Meningkatnya Rumah Sehat dan Layak Huni	6. Meningkatkan Rumah yang sehat dan Layak Huni melalui penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, penyediaan layanan air minum, sanitasi pemukiman yang layak dan penyediaan sarana dan prasarana umum permukiman
	7. Mewujudkan Penataan Ruang yang Memperhatikan Keberlanjutan Sumber Daya Wilayah	7. Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukkannya	7. Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukkannya melalui penyusunan dokumen tata ruang, pengendalian perizinan, penyediaan ruang khusus (RTH dan Pedestrian)
	8. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembengunan	8. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	8. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan yang didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
	9. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Hidup	9. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah
	10.Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral Secara Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral	10. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral terutama pemanfaatan sumber energi alternatif terbarukan
	11. Meningkatkan Ketersediaan Pelayanan Transportasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	11. Meningkatnya Transportasi Masyarakat yang Memadai	11. Meningkatnya transportasi masyarakat yang memadai melalui uji kendaraan, meningkatnya keselamatan angkutan dan pengembangan rute baru angkutan umum
	12.Meningkatkan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	12. Meningkatkan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	12. Meningkatkan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Tanah
	13. Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan	13. Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	13. Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan dan penyelesaian konflikkonflik pertanahan
Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang	1. Meningkatkan Budi Pekerti, Tata Krama Nilai Budaya dan Keteladanan	1. Meningkatnya Budi Pekerti, Tata Krama dan Tata Nilai Budaya Jawa serta Keteladanan	1. Meningkatkan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan melalui penyusunan kurikulum muatan lokal budi pekerti, penyediaan buku muatan lokal budi pekerti, keteladanan guru, dan penanganan kenakalan siswa didik

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meninggalkan Kearifan Lokal	2. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat atas Pelayanan Pendidikan	2. Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Anak Usia Dini	2. Meningkatkan aksebilitas, kualitas pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini melalui pengembangan pelayanan pendidikan terhadap anak usia 0-6 tahun (anak usia dini)
		3. Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Dasar	3. Meningkatkan aksebilitas, kualitas pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar, pemberian beasiswa, dan bantuan siswa miskin
		4. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Menengah	prasarana pendidikan pendidikan nonformal melalui
		5. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Non Formal	pengembangan pelayanan pendidikan kesetaraan di masyarakat
	6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan	6. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	6. Meningkatkan pemenuhan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, dan SMP,MTs,
		7. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	7. Meningkatkan kualifikasi akademik pendidik minimal S-1
		8. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah	khususnya di tingkat TK/RA dan SMP/MTs, serta pemenuhan kualifikasi bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah
		9. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal	
		10. Terpenuhinya Kebutuhan Pendidik	
	11.Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga	11. Meningkatnya Kualifikasi Akademik Pendidik	11. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap Jumlah Tenaga Kependidikan yang meliputi tenaga administrasi, penilik
	Kependidikan	12. Meningkatnya Profesionalisme Pendidik	sekolah, pengawas sekolah, dan pamong belajar
		13. Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kependidikan	
	14.Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan	14. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	14. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dengan kebutuhan
		15. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	
		16. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah	
		17. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Misi 5 : Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Jaringan, Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Upaya	n Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu	Bermutu mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai dengan Kabupaten
	 Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Termasuk Potensi KLB (Kejadian Luar Biasa) dan Bencana 	n Pengendalian Penyakit t B	Pengendalian Penyakit, serta kewaspadaan adanya potensi KLB
	3. Meningkatkan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat	a 3. Meningkatnya Gizi Masyarakat 3	3. Meningkatkan Gizi Masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat terutama usia balita dan penduduk miskin
	4. Menjamin Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehataan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar	n Perbekalan Kesehatan	4. Meningkatkan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dasar termasuk dengan pengawasan obat dan makanan
	5. Menjamin Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	a di semua Tingkatan Pelayanan	5. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan meningkatnya pengelolaan dan manajemen kesehatan
	Pelayanan Kesehatan	6. Meningkatnya Lingkungan Sehat	6. Meningkatkan Lingkungan Sehat melalui pengembangan akses yang berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan, akses terhadap air bersih, dan penggunaan jamban keluarga
		7. Meningkatnya Derajat Kesejahteraan 7 Keluarga	7. Meningkatkan pembinaan Kesejahteraan Keluarga
		8. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat 8 Atas Pelayanan Keluarga Berencana	3. Meningkatkan jangkauan pelayanan keluarga berencana
Misi 6 : Mewujudkan Peningkatan	 Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian,	, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah yang Terpadu dan Partisipatif
Pelaksanaan Pemerintahan yang	2. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan	Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM	2. Meningkatkan frekuensi diklat pegawai, pendidikan formal pegawai, pemenuhan hak dan penghargaan pegawai, dan pengisian jabatan struktural dan fungsional

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada	Nepotisme		
Pelayanan Publik	3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama pada sisi pemenuhan ketersediaan peraturan perundang-undangan, penanganan temuan pemeriksaan, ketepatan pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
	4. Meningkatkan Tertib Pengelolaan Kearsipan	4. Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Meningkatkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
	5. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	5. Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	5. Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada aspek Pendapatan Asli Daerah
	6. Meningkatkan Tertib Pengelolaan Kearsipan	6. Meningkatnya Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah	pengembangan pengelolaan asset yang dimiliki daerah
		7. Meningkatnya Tertib Pengelolaan Kearsipan	7. Meningkatkan Tertib Pengelolaan Kearsipan secara baku
	8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya
	9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi	9. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	penanganan pengaduan masyarakat
	Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	10. Meningkatnya Investasi	10. Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi dan dukungan iklim investasi yang memadai
	10.Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan	11. Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan	11. Meningkatkan kunjungan perpustakaan dan peminjaman buku koleksi perpustakaan
	11.Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah	12. Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah	12. Meningkatkan Kualitas Data Statistik Daerah dan data bahan perencanaan pembangunan
	12. Meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi	13. Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi dan Komunikasi	13. Meningkatkan Akses atas Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat, khususnya di ruang publik melalui berbagai media yang ada

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			14. Meningkatkan Pengelolaan e-Government pada pemerintah
			daerah dan pemerintah desa

B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung

Pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPJMD Tahun 2013-2018 dan merupakan keberlanjutan dari fokus pembangunan tahun sebelumnya. Rancangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 berfungsi juga untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan pembangunan Nasional tahun 2018 diarahkan untuk VISI:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Dengan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

- Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia;
- 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4. Mewujudkan Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
- 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun agenda prioritas Nasional NAWA CITA pada Tahun 2018 yang akan dilaksanakan yaitu :

- Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- 2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- 3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
- 4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

- 5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera;
- 6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- 7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik;
- 8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- 9. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Selain mendukung kebijakan pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 juga selaras dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dimana Arah Prioritas pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang berdimensi kewilayahan;
- 2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah;
- 3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;
- 4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah;
- 5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana;
- 6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusifitas wilayah.

Sedangkan isu-isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan:
- 2. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
- 3. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- 4. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastrukur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
- 5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan;

- 6. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
- 8. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga;
- 9. Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/ permukiman yang bersih dan sehat;
- 10. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 11. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup;
- 12. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah;
- 13. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan transportasi;
- 14. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan yang didukung dengan pelaksanaan e-Goverment; dan
- 15. Belum optimalnya pelayanan publik.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang. Isu-isu strategis selanjutnya menjadi dasar dalam pengambilan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2013-2018.

Arah kebijakan RKPD tahun 2018 merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Perangkat Daerah dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah yang diarahkan pada Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri dari:

- 1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 - f. sosial
- 2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. perdagangan;
- f. perindustrian dan
- g. transmigrasi.

Untuk Urusan Pemerintahan Pilihan kehutanan karena telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan Pemerintahan Pilihan ini tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran RPJMD untuk tahun 2018 yang merupakan tahun perencanaan terakhir dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.2. di bawah ini.

Tabel. 4.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018					
Misi	Misi 1 : Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan									
1	Peningkatan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian dan peternakan	1	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor pertanian/ perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan					
		2	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan					
		3	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi dalam pemasaran produk Pertanian dan memperbesar akses pemasaran	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan					
		4	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian dalam rangka meningkatkan	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan					
2	Peningkatan Kualitas, Kuantitas,	5	kualitas produk pertanian dan pencegahan hama dan penyakit Meningkatkan produktivitas tembakau		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak					
2	Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	6	Meningkatkan upaya intensifikasi dan diversifikasi produksi hasil peternakan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan/ peternakan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan/ peternakan					
3	Peningkatan Kualitas kelembagaan petani dan SDM Penyuluhan	7	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas kelembagaan petani dan SDM penyuluhan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dan Perikanan	Program Pemberdayaan Petani Program Pengembangan Data/Data Base Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani dan pola hubungan pemerintah					
4	Peningkatan Penyediaan Sarana	8	Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana	Program Peningkatan Produksi Pertanian/	Program Peningkatan Produksi					

	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
	dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan		dan Insfrastruktur pendukung pertanian (jalan usaha tani dan pengelolaan embung)	Perkebunan/ Peternakan	Pertanian/ Perkebunan/ peternakan
5	Peningkatan Pengembangan Kawasan Agropolitan	9	Meningkatkan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan pengelolaan kawasan agropolitan yang sudah terbentuk	Program Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Agribisnis
6	Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Perikanan	10	Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Perikanan khususnya penggunaan benih unggul ikan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		11	Meningkatkan produktivitas perikanan di perairan umum		
		12	Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk olahan	Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
			Perikanan yang didukung dengan pengembangan akses pemasaran produk	Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar	Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar
			perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
7	Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan,distribusi dan konsumsi pangan	13	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
8	Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata	14 15	Mengembangkan Kawasan Agrowisata Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana serta event pariwisata dengan pengembangan destinasi pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata
		15	Meningkatkan pembinaan pengelolaan destinasi wisata dan kemitraan pariwisata		
9	Peningkatan Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	16	Meningkatkan pengembangan Industri kecil dan UMKM yang berbasis pertanian dan komoditas unggulan daerah lainnya	Program Industri Kecil dan Menengah	Program Industri Kecil dan Menengah
10	Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	17	Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan pasar daerah sebagai salah satu Sarana dan Prasarana Perdagangan	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Program Pengelolaan Pasar Daerah Program Peningkatan Efiensi Perdagangan dalam Negeri program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya

	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
11	Peningkatan Daya Saing Produk	18	Meningkatkan nilai ekspor produk daerah dan promosi produk unggulan daerah serta	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	Program Pembinaan Pedagang Program Peningkatan dan pengembangan ekspor
			pembinaan usaha informal	Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan	Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan
12	Peningkatan Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen)	19	Meningkatkan perlindungan atas konsumen dan sengketa konsumen terhadap produk yang beredar	Perlindungan Konsumen	Program Perlidungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
13	Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM	20	Meningkatkan Kualitas dan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
					Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan	21	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Misi :	2: Mewujudkan Peningkatan Kehidı	ıpan I	Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agan	nis, Berbudaya, dan Sejahtera	
1	Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kasajahtaraan Sasjal (PMKS)	1	Meningkatkan penanganan PMKS dan penanganan RTLH	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
2	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berupa peningkatan lembaga sosial, CSR Sosial, dan organisasi sosial lainnya dalam menangani PMKS	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dan trauma.
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
				(PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
3	Peningkatan Pencegahan,	3	Meningkatkan upaya penanganan terhadap	Program pencegahan dan kesiapsiagaan	Program pencegahan dan kesiapsiagaan
	Penanggulanga, dan Penanganan		bencana alam	Program tanggap darurat dan logistik	Program tanggap darurat dan logistik
	Bencana			Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
4	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	4	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja melalui pelatihan yang berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan berbasis kewirausahaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
5	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran	5	Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran melalui upaya peningkatan penempatan pencari kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
6	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga	6	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
7	Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan	7	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa
	masyarakat		angka kemiskinan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
8	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi	8	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi dan peningkatan kualitas transmigran	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
9	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	9	Meningkatkan upaya penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
	Perempuan, dan Perlindungan Anak	10	Meningkatkan perlindungan anak dan pengembangan pemenuhan hak-hak anak	Perempuan	Perempuan
10	Peningkatan kesetaraan gender	11	Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender melalui implementasi anggaran yang	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

STRATEGI			ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
			responsif gender		
11	Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	12	Meningkatkan Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	13	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
13	Peningkatan Prestasi Pemuda dan Atlit Olahraga	14	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga Prestasi dan	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
			Atlit Olahraga		Program peningkatan peran serta kepemudaan
14	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan	15	Meningkatkan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan	Program Pengembangan Nilai Keagamaan	Program Pengembangan Nilai Keagamaan
15	Peningkatan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	16	Meningkatan Pengembangan, Pelestarian dan pemeliharaan nilai tradisi budaya dan benda bersejarah serta benda arkeologi	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
16	Peningkatan Promosi Seni dan Cagar Budaya	17	Meningkatkan Promosi Seni dan Cagar Budaya melalui penyelenggaraan gelar seni, kajian seni, promosi seni, organisasi seni, dan tempat-tempat kesenian	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Pemasaran Wisata Program Pengembangan Kemitraan
17	Peningkatan Sarana Budaya dan Kebudayaan	18	Meningkatkan Sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kekayaan Budaya dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
18	Peningkatan Kualitas Kehidupan	19	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik dan	Program pendidikan politik masyarakat	Program pendidikan politik masyarakat
	Politik dan Wawasan Kebangsaan		Wawasan Kebangsaan masyarakat melalui pendidikan politik masyarakat dan	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
			penanganan penyakit masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan
19	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	20	Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan melalui penegakan peraturan daerah,	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
			penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
20	Peningkatan Pencegahan,	21	Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan,	Program peningkatan kesiagaan dan	Program peningkatan kesiagaan dan

	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
Misi	Penanggulangan, dan Penanganan Bencana 3: Mewujudkan Peningkatan Infras	etrukt	dan Penanganan Bencana kebakaran melalui upaya meningkatkan luasan pelayanan, waktu tanggap kebakaran dan penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran ur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang L	pencegahan bahaya kebakaran	pencegahan bahaya kebakaran
1	Peningkatan aksesibilitas Insfrastruktur bagi pengembangan ekonomi	1	Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai melalui pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Prasarana Perkotaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
		2	Meningkatkan ketersediaan ruas jalan baru sebagai alternatif pemecahan masalah dalam mengurai kemacetan	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
2	peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air	3	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya Air melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan drainase	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Program Pembangunan
3	Peningkatan kualitas bangunan instansi pemerintah	4	Meningkatkan kelayakan bangunan-bangunan pemerintahan berupa pelaksanaan pemugaran bangunan instansi pemerintah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Turap/Talud/Bronjong Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembinaan Konstruksi
4	Peningkatan Rumah Sehat dan Layak Huni	5	Meningkatkan Rumah yang sehat dan Layak Huni melalui penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, penyediaan layanan air minum, sanitasi pemukiman yang layak dan penyediaan sarana dan prasarana umum permukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan
5	Peningkatan Perencanaan,	6	Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang

	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
	Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukkannya		Pengendalian Ruang sesuai Peruntukkannya melalui penyusunan dokumen tata ruang,	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			pengendalian perizinan, penyediaan ruang khusus (RTH dan Pedestrian)	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH
				Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan trotoar	Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan trotoar
6	peningkatan Pengelolaan Persampahan	7	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan yang didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7	Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	8	Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
8	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral	9	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral terutama pemanfaatan sumber energi alternatif terbarukan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
9	Peningkatan Transportasi Masyarakat yang Memadai	10	Meningkatnya transportasi masyarakat yang memadai melalui uji kendaraan, meningkatnya	Program peningkatan pelayanan angkutan	Program peningkatan pelayanan angkutan
			keselamatan angkutan dan pengembangan rute baru angkutan umum	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan PelayananTermina
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan dan Pengamanan
					Lalu Lintas Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas
10	Peningkatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	11	Meningkatkan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Tanah	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
11	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	12	Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
				Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018					
Misi 4	Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal									
1	Peningkatan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan	1	Meningkatkan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan melalui penyusunan kurikulum muatan lokal budi pekerti, penyediaan buku muatan lokal budi pekerti, keteladanan guru, dan penanganan kenakalan siswa didik	Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, dan Pendidikan nonformal (pendidikan menengah pindah kewenangan prov) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan					
2	Peningkatan aksebilitas pendidikan anak usia dini	2	Meningkatkan aksebilitas, kualitas pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini melalui pengembangan pelayanan pendidikan terhadap anak usia 0-6 tahun (anak usia dini)	Program pendidikan anak usia dini	pendidikan Program pendidikan anak usia dini					
3	Peningkatan aksebilitas pendidikan dasar	3	Meningkatkan aksebilitas, kualitas pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar, pemberian beasiswa, dan bantuan siswa miskin	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun					
4	Peningkatan aksebilitas pendidikan	4	Meningkatkan aksebilitas, kualitas pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan nonformal melalui pengembangan pelayanan pendidikan kesetaraan di masyarakat	Program pendidikan nonformal	Program pendidikan nonformal					
5	Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini	5	Meningkatkan pemenuhan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, dan SMP,MTs,	Program manajemen pelayanan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan					
6	Peningkatan kualitas pendidikan dasar	6	Meningkatkan kualifikasi akademik pendidik minimal S-1 khususnya di tingkat TK/RA dan SMP/MTs, serta pemenuhan kualifikasi bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah	Program manajemen pelayanan pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program manajemen pelayanan pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					
7	Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan	7	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap Jumlah Tenaga Kependidikan yang meliputi tenaga administrasi, penilik sekolah, pengawas sekolah, dan pamong belajar	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan					

	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
8	Peningkatan sarana dan	8	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	Program Pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan anak usia dini
	prasarana pendidikan		Pendidikan sesuai dengan kebutuhan	Program wajib belajar pendidikan dasar	Program wajib belajar pendidikan dasar
				sembilan tahun	sembilan tahun
				Program pendidikan nonformal	Program pendidikan nonformal
Misi	5: Mewujudkan Peningkatan Buday	ra Seh	at dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat		
1	Peningkatan Akses Masyarakat ke	1	Meningkatkan Akses Masyarakat ke Fasilitas	Program peningkatan keselamatan ibu	Program peningkatan keselamatan ibu
	Fasilitas Kesehatan Yang		Kesehatan Yang Bermutu mulai tingkat	melahirkan dan anak	melahirkan dan anak
	Bermutu		Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai dengan	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
			Kabupaten	Miskin	Miskin
				Program kemitraan peningkatan pelayanan	Program kemitraan peningkatan
				kesehatan	pelayanan kesehatan
					Program Peningkatan Pelayanan
					Kesehatan Anak dan Balita.
					Program Peningkatan Pelayanan
					Kesehatan Lansia.
2	Peningkatan Upaya Pencegahan	2	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penemuan,	Program Pencegahan dan Penanggulangan	Program Pencegahan dan
	dan Pengendalian Penyakit		Penanganan dan Pengendalian Penyakit, serta	Penyakit Menular	Penanggulangan Penyakit Menular
			kewaspadaan adanya potensi KLB		
3	Peningkatan Gizi Masyarakat	3	Meningkatkan Gizi Masyarakat melalui	Perbaikan Gizi Masyarakat	Perbaikan Gizi Masyarakat
			perbaikan gizi masyarakat terutama usia balita		
			dan penduduk miskin		
4	Peningkatan Ketersediaan Obat	4	Meningkatkan Ketersediaan Obat dan	Penyediaan Obat dan Perbekalan	Penyediaan Obat dan Perbekalan
	dan Perbekalan Kesehatan		Perbekalan Kesehatan Dasar termasuk dengan	Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan	Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan
			pengawasan obat dan makanan	Kesehatan)	Kesehatan)
				Program Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan
5	Peningkatan Sumber Daya	5	Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan di	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
	Kesehatan di semua Tingkatan		semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan yang	(Program Standarisasi Pelayanan	(Program Standarisasi Pelayanan
	Pelayanan Kesehatan		diikuti dengan meningkatnya pengelolaan dan	Kesehatan)	Kesehatan)
			manajemen kesehatan	Program pengadaan, peningkatan sarana	Program pengadaan, peningkatan sarana
				dan prasarana rumah sakit/rumah sakit	dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
				jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit	jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
				mata	mata

	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
					Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya.
				Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD	Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD
6	Peningkatan Lingkungan Sehat	6	Meningkatkan Lingkungan Sehat melalui	Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengembangan Lingkungan Sehat
			pengembangan akses yang berkelanjutan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			terhadap sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan, akses terhadap air bersih, dan penggunaan jamban keluarga	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
7	Peningkatan Derajat Kesejahteraan Keluarga	7	Meningkatkan pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
8	Peningkatan Aksesibilitas	8	Meningkatkan jangkauan pelayanan keluarga	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana
	Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana		berencana	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
				Program Peningkatan Penanggulangan	Program Peningkatan Penanggulangan
				Narkoba, PMS termasuk HIV/IADS	Narkoba, PMS termasuk HIV/IADS
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
				Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
				Program Pelayanan Kontrasepsi	Program Pelayanan Kontrasepsi
Misi (6: Mewujudkan Peningkatan Pelaks	sanaan	n Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak	KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Pub	lik
1	Peningkatan Kualitas	1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan,	Program Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan
	Perencanaan, Pengendalian,		Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian	Daerah	Daerah
1	Evaluasi, dan Pengkajian		Pembangunan Daerah yang Terpadu dan		
	Pembangunan Daerah	 	Partisipatif		
2	Peningkatan Kemampuan,	2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Program Peningkatan Kapasitas Sumber
	Profesionalisme, dan		Pemerintahan Daerah terutama pada sisi	Daya Aparatur	Daya Aparatur
	Kesejahteraan SDM Aparatur		pemenuhan ketersediaan peraturan	Program Pendidikan Kedinasan	Program Pendidikan Kedinasan
			perundang-undangan, penanganan temuan pemeriksaan, ketepatan pelaksanaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
			pembangunan, dan pelaporan pelaksanaan	Program Administrasi Kepegawaian	Program Administrasi Kepegawaian

	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
			pemerintahan dan pembangunan	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
3	Peningkatan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3	Meningkatkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
4	Peningkatan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan	4	Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pengelolaan Keuangan Daerah		khususnya pada aspek Pendapatan Asli Daerah	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
5	Peningkatan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah	5	Meningkatkan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah dan pengembangan pengelolaan asset yang dimiliki daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Peningkatan Tertib Pengelolaan Kearsipan	6	Meningkatkan Tertib Pengelolaan Kearsipan secara baku	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	7	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan
8	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	8	Meningkatkan ketersediaan SOP, ketepatan waktu, dan penanganan pengaduan masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
9	Peningkatan Investasi	9	Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi dan dukungan iklim investasi yang memadai	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
10	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	10	Meningkatkan kunjungan perpustakaan dan peminjaman buku koleksi perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

	STRATEGI		STRATEGI ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2018
11	Peningkatan Kualitas Data	11	Meningkatkan Kualitas Data Statistik Daerah	Program Pengembangan	Program Pengembangan Data/ Informasi/	
	Pembangunan dan Data Statistik		dan data bahan perencanaan pembangunan	Data/Informasi/Statistik Daerah	Statistik Daerah	
	Daerah				Program Pengkajian dan penelitian	
					bidang informasi dan komunikasi	
					Program Pengkajian dan penelitian	
					bidang informasi dan komunikasi	
12	Peningkatan Akses atas	12	Meningkatkan Akses atas Komunikasi dan	program pengembangan informasi dan	program pengembangan informasi dan	
	Komunikasi dan Informasi		Informasi kepada masyarakat, khususnya di	komunikasi	komunikasi	
			ruang publik melalui berbagai media yang ada			
13	Peningkatan Pengelolaan e-	13	Meningkatkan Pengelolaan e-Government pada	program pengembangan komunikasi,	program pengembangan komunikasi,	
	Government		pemerintah daerah dan pemerintah desa	informasi dan media massa	informasi dan media massa	

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Dari Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah di atas, tidak lepas dari isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2018, yaitu antara lain:

 Pertanian modern yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi

Kabupaten Temanggung sebagai daerah agraris turut berperan dalam peningkatan daya saing ekonomi, untuk itu diperlukan keterkaitan antara produk hulu (pertanian) dan produk hilir (industri), ketersediaan sarana dan prasarana penunjang baik dalam budidaya maupun pengolahan hasil serta peran lembaga ekonomi produktif guna meningkatkan daya saing.

2. Pengurangan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Temanggung dan bersifat multidimensi yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Pengurangan angka kemiskinan ini dapat melalui meningkatkan pembangunan yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti: pangan (raskin, rastra), pendidikan (bantuan siswa miskin), kesehatan (BPJS, JKT), air minum (PSAB, PAMSIMAS), Sanitasi (IPAL, SLBM) dan perumahan (RTLH).

Salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan yaitu meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan perkuatan kelembagaan dan memperluas jaringan kemitraan serta stimulan berusaha.

3. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur yang merata dan dalam kondisi baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti: kemudahan konektivitas antar wilayah, sarana dan prasarana irigasi dll.

Dalam mempertahankan ketersediaan air, maka upaya konservasi lingkungan khususnya lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi suatu yang harus dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan posisi geografis Kabupaten Temanggung yang berada di daerah hulu. Untuk itu fungsi kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk dapat dipertahankan sesuai dengan rencana peruntukannya.

4. Peningkatan Kesehatan

Salah satu indikator kesehatan yang sekaligus menjadi kebutuhan dasar adalah air minum dan sanitasi. Untuk itu, masih perlu ditingkatkan dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan maka pengembangan sarana dan prasarana kesehatan masih diperlukan. Demikian juga distribusi tenaga kesehatan, paramedis yang merata. Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan peran jaminan kesehatan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan.

5. Peningkatan kualitas Pendidikan

Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas perlu didukung dengan sumberdaya pendidikan yang handal, misal: melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, pendistribusian tenaga pendidik dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Di sisi lain masih diperlukan peningkatan kualitas dan kompetensi dari tenaga pendidik.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Pembagian peran yang jelas antara Pemerintah Daerah dan Desa akan mempercepat laju pembangunan sesuai kewenangan penanganan dan keterbatasan anggaran.

Organisasi perangkat daerah yang baru dan didukung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga menjadi faktor utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Di sisi lain, peningkatan kapasitas PNS juga tetap dibutuhkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan guna menunjang kinerja.

Tata kelola yang baik *e-government* menjadi harapan dan transparansi keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaannya. Implementasi *e-government* dapat dilaksanakan dengan berbagai media baik cetak maupun elektronik agar transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tetap terjaga.

Perwujudan demokrasi adalah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 dan pemilihan kepala desa. Suksesnya pemilukada dan pilkades tersebut menjadi salah satu tolok ukur kedewasaan dalam berdemokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih.

Dari Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 akan dilaksanakan untuk mendukung percepatan target Kinerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, prioritas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel 4.3. berikut ini.

Tabel 4.3 Matrik Prioritas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
MISI	1: Mewujudkan Peningkatan Pert	anian Moderen yang Berwawasan Lingkungan			
1	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan/	Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang	Kelompok	1300	Dinas Pertanian dan
	Perkebunan	Besaran Penerapan Pertanian dan Perkebunan Mengarah Organik untuk Komoditas Utama	На	1300	Ketahanan Pangan
		Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan	Unit	1.272	
		Angka Kelahiran anak sapi (pedet) melalui Inseminasi Buatan	%	70	Dinakan
2	Program Peningkatan Pemasaran	Persentase Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul	%	70	
	hasil produksi	Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Kelompok	12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	pertanian/perkebunan	Persentase Penanganan Serangan Hama Penyakit	%	85	iktananan rangan
3	Program pencegahan dan	Angka Kematian Ternak unggas	%	2	
	penanggulangan penyakit ternak	Angka Kematian Ternak kecil	%	0,10	Dinakan
		Angka Kematian Ternak besar	%	0,10	
4	Program Peningkatan Produksi	Peningkatan produktifitas Padi	Ton/Ha	6,99	
	Pertanian/	Peningkatan produktifitas Jagung	Ton/Ha	6,88	
	Perkebunan/peternakan	Peningkatan produktifitas Ubi kayu	Ton/Ha	27,61	
		Peningkatan produktifitas Cabai	Ton/Ha	6,70	Dinas Pertanian dan
		Peningkatan produktifitas Kobis	Ton/Ha	27,05	Ketahanan Pangan
		Peningkatan produktifitas Tembakau	Ton/Ha	0,79	
		Peningkatan produktifitas Kopi Robusta	Ton/Ha	1,10	
		Peningkatan produktifitas Kopi Arabika	Ton/Ha	0,90	
5	Program Peningkatan Produksi	Peningkatan Produktivitas daging Sapi	Kg/Ekor	176,65	Dinakan
	Hasil peternakan	Peningkatan Produktivitas daging Kambing	Kg/Ekor	13,66	
		Peningkatan Produktivitas daging Domba	Kg/Ekor	13,66	
		Peningkatan produksi telur ayam ras petelur	Butir	79.255.574	
		Peningkatan populasi sapi	Ekor	29.750	
		Peningkatan populasi domba	Ekor	334.646	

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
		Peningkatan populasi kambing	Ekor	64.388	
		Peningkatan populasi ayam buras	Ekor	1.675.736	
6	Program Pemberdayaan Penyuluh	Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikasi	kali/tahun	10	
	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Penyuluh	orang/thn	3	
		Rasio jumlah kelompok tani maju	%	8,05	
		Jumlah peningkatan kapasitas SDM Petani	orang/thn	12.400	Dinas Pertanian dan
		Cakupan Pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	%	87,89	Ketahanan Pangan
		Besaran pertumbuhan dan peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	unit/thn	70	
7	Program Peningkatan Produksi	Persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung	%	100	Disco Destacion des
	Pertanian/Perkebunan/peternaka	Besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun	unit	469	Dinas Pertanian dan
	n	Besaran jumlah jalan usaha tani	unit	410	Ketahanan Pangan
8	Program Pengembangan Agribisnis	Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan	%	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9	Program Pengembangan Budidaya	Penggunaan induk ikan unggul	%	60	Di1
	Perikanan	Peningkatan produksi benih ikan	Ekor	113.482.800	Dinakan
10	Program Optimalisasi pengelolaan	Peningkatan produksi ikan konsumsi (kolam)	Ton	6749.01	
	dan Pemasaran Produksi	Peningkatan produksi mina padi	Ton	4174,6	
	Perikanan	Produktivitas benih ikan	ekor/m²	130	Dinakan
		Produktivitas ikan konsumsi	kg/m²	5,29	
		Produktivitas mina padi	kg/Ha/th	1188,51	
11	Program Pengembangan Kawasan	Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	Kg	277	
	budidaya air tawar	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	16,87	Dinalran
		Peningkatan luas lahan budidaya ikan	На	125,07	Dinakan
		Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum	Ton	801.92	
12	Program peningkatan ketahanan	Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita	kkal/kap/hr	2980	Dinas Pertanian dan
	pangan	Cakupan Ketersediaan protein per Kapita	gr/kap/hr	75,99	Ketahanan Pangan
		Peningkatan cadangan pangan masyarakat	Unit	75	
		Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah	%	10	
		Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	%	85	
		Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	%	91	
		Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	90	
		Besaran Desa Mandiri Pangan	Desa	10	

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
		Besaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	lokasi	5	
13	Perlindungan Konsumen	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan	%	100	Disperindagkop dan UKM
14	Program Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	55,6	Disperindagkop dan
		Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	%	99,75	UKM
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya	Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	unit	1	Disperindagkop dan UKM
16	Program Peningkatan Sarana dan	Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	unit	1	
	Prasarana Lainnya	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	%	100	
		Cakupan Nilai Ekspor produk daerah	(\$)	175.000.000	
		Cakupan promosi produk unggulan daerah	kali	3	
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	org	600	Disperindagkop dan
		Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	laporan	96	UKM
		Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar	produk	2	
		Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang	unit	19.050	
		Persentase penyelesaian sengketa konsumen	%	85	
17	Peningkatan kualitas	Prosentase jumlah koperasi aktif	%	90.7	Dianaminda dran dan
	kelembagaan koperasi	Besaran jumlah anggota koperasi	org	179.500	Disperindagkop dan UKM
		Persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi	%	53,72	UKIVI
18	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan	Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	-	Disperindagkop dan
	kompetitif UKM	Besaran jumlah UKM yang dibina	Kelompok	451	UKM
		Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM	Kelompok	232	
		Besaran Penurunan/Penanganan Lahan kritis	На	111581	
		Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	%	100	Dinas LH
		Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan	Kelompok	12	Dinas Pertanian dan
		Besaran Meningkatnya konservasi lahan	unit	366.2109375	Ketahanan Pangan
	Misi 2 : Mewujudkan Peningkatar	n Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbud	ava. dan Seiahter	a	

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	18	
		Persentase anak terlantar yang tertangani	%	1,28	
		Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	%	3,18	
		Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	5,06	Dinas Sosial
		Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis	%	3	
		Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial	%	100	
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	%	24,34	Dinas Sosial
3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0	100	
		Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS	%	100	
		Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS	%	100	Dinas Sosial
		Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan	%	25,95	
		Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran	%	100	
4	Program Pencegahan Dan Kesiap siagaan	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1(satu) Tahun	%	100	BPBD
5	Program Tanggap Darurat Dan Logistik	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabi litasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana	%	100	
		Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	BPBD
		Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100	
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	80	Dinaker
	3 3	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	95	

Persentiase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis 96 80	No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Persentase Pengangaran Sejenis Persentase Pengangan Sejenis Persentase Penganjan Perladatan diperusahaan Persentase Penganjan Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, Lumbung Pangan) Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) Persentase Pertupakayan Masyarakat dalam Teknologi Pepad Guna Persentase Pertupakayan Penganjan Pengan				%	80	
Tingkat Pengangguran Terbuka %6 4.25 Dinaker	7	Program Peningkatan Kualitas	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja	%	75	
Tingkat Pengangguran Terbuka % 4.25		dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	95,75	Dinalron
Besaran Pemeriksaan Perusahaan Sesaran Pemeriksaan Sejenis Sesaran Pemeriksaan Sejenis Sesaran Pemeriksaan Sejenis Sesaran Pemeriksaan Sejenis Sesaran Sejenis S			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,25	Dillakei
Kerja dan Pengembangan Lembaga Cakupan Pekerja atau Buruh yang Menjadi peserta Program Jamostek/Program Sejenis Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama 96 100 Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan 96 82 Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan 96 80 Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan 96 80 Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa 96 30 Cakupan peringkatan klasifikasi tipe desa 96 30 Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif 96 100 Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan) Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) 96 111 Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna 96 33 Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah 96 20 Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa Cakupan Perpinti Desa/Kelurahan 96 100 Tangadu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan 96 100 Terpadu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata 1 100 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 96 90 didalam Unit Pelayanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban 68 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	82	
Lembaga Jamsostek/Program Sejenis Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama 96 100 Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan 96 82 Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan 96 82 Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan 96 80 Persentase Pengujian Peralatin Besama 96 80 Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa 96 30 Cakupan Pernbangunan Desa yang Partisipatif 96 100 Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, 96 80 Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) 96 111 Cakupan Pernberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna 96 33 Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah 96 20 Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa Cakupan Permbuanan Desa Cakupan Permpuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Pata 96 100 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata 96 100 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 96 90 didalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 96 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Mekerasan 96 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 96 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 97 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 98 Kekerasan di	8	Program Perlindungan Tenaga	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	19,4	
Persentase Rasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama % 100 Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan % 82 Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan % 80 Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan % 80 Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan % 80 Persentase penempatan transmigran % 80 Masyarakat Perdesaan dan Cakupan Pernenaaan Pembangunan Desa yang Partisipatif % 100 Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan) Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) % 11 Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna % 33 Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cakupan Pernenanan Pembangunan Desa Cakupan Permpusunan Profil Desa/Kelurahan % 100 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Penmingkatan Kualitas Anak dan Penmingkatan Kualitas Anak dan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan % 100 Terpadu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Reshabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata % 100 Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan % 90 didalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban % 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu				%	100	Dinalan
Persentase penempatan transmigran % 80 Persogram Keberdayaan Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa % 30 Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif % 100 Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan) Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) % 11 Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna % 33 Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan % 100 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan % 100 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Anak Mesana KTP/A dan PTT/PKT di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan % 90 didalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban % 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu % 80 Persentase Memurunnya Rumah Terpadu % 80 Persentase Memurunnya Panga Asaran (Angka Kemiskinan) % 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu % 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu % 80 Cakupan Perencanaan Pembangunan Pensayanan Terpadu % 80 Persentase Memurunnya Mumah Teraduh Bagi Perempuan dan Anak Korban % 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu % 80 Persentase Memurunnya Mamah Teraduh Mesayanan Terpadu % 90 Persentase Memurunnya Mendapatkan			Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	100	Dinaker
Program Keberdayaan Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Partisipatif % 100 Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan) 80 80 Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) % 11 Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna % 33 Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) % 100 20 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Permpuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan % 100 DPPKBPPPA Penanganan Pempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata % 100 Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan % 90 didalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban % 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu % 80 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu % 80 %			Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan	%	82	
Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan) Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) % 11 Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna % 33 Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan % 100 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan % 100 Terpadu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata % 100 Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan % 90 didalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban % 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu			Persentase penempatan transmigran	%	80	
Perkotaan Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan) Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Perempuan Cakupan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Pelayanan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Terpadu	9	Program Keberdayaan	Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa	%	30	
Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan) Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Cakupan Perpusunan Profil Desa/Kelurahan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		1	Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif	%	100	
Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Salaman Sakit Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		Perkotaan		%	80	
Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Peningkatan Kualitas Anak dan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dialam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu			Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan)	%	11	Dispermades
Perencanaan Pembangunan Desa Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu			Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna	%	33	
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu			1 00	%	20	
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu			Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	%	100	
Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata % 100 Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan % 90 didalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban % 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	10	Peningkatan Kualitas Anak dan	Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan	%	100	DPPKBPPPA
Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan % 90 didalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban % 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu			Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata	%	100	
Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban % 80 Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu			Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	90	
Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan % 25			Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban	%	80	
			Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan	%	25	

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
		Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan			
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	%	98	
		Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	86	
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	50	
		Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	Rasio	1:2600	
		Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender	%	70	
		Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan	%	90	
		Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	%	80	
		Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Kesehatan Dasar	%	80	
		Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	%	85	
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus	%	70	
11	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Besaran kegiatan kepemudaan	Kegiatan	13	Dinas Pendiidkan Pemuda dan OR
12	Program Peningkatan Sarana dan	Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga	%	20,46	
	Prasarana Olahraga	Kegiatan olah raga	Kali	85	Dinas Pendiidkan
		Besaran Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	90	Pemuda dan OR
		Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Prestasi	7	
13	Program Pengembangan Nilai	Cakupan Pemberian Bantuan Tempat Ibadah	%	100	
	Keagamaan	Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren	%	100	Dinbudparpora
		Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ	%	100	Dilibuupai pora
		Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah	%	100	
14	Program Pengelolaan Kekayaan	Cakupan Pemeliharaan Nilai Tradisi Budaya	%	0,28	Dinas Kebudayaan dan
	Budaya	Cakupan Pemeliharaan Benda-benda Bersejarah dan Arkeologi	0	6,38	Pariwisata
15	Program Pengelolaan Keragaman	Cakupan Kajian Seni	%	33,3	Dinas Kebudayaan dan
	Budaya	Cakupan Fasilitas Seni	%	85,7	Pariwisata
		Cakupan Gelar Seni	%	100	
		Cakupan Misi Kesenian	%	95	
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	87,5	
		Cakupan Tempat Kesenian	%	50	

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
		Cakupan Organisasi Kesenian	%	100	
16	Program Pengelolaan Kekayaan	Cakupan Fasilitas Cagar Budaya	%	2,12	
	Budaya	Cakupan Promosi Cagar Budaya	%	0,63	Dinas Kebudayaan dan
		Cakupan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya dan Kebudayaan	%	100	Pariwisata
17	Program pendidikan politik	Persentase Peserta Kegiatan Politik Masyarakat	%	100	
	masyarakat	Persentase Kasus Pekat yang Tertangani	%	100	
	•	Persentase Partisipasi Pemilih	%	-	Kantor KESBANG
		Penurunan Kasus SARA	%	100	
		Persentase Penanganan Tindak Penyalahgunaan Narkotika	%	100	
18	Program pendidikan politik	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	
	masyarakat	Angka Kriminalitas	angka	0,46	Satpol PP dan Damkar
	•	Cakupan Penanganan demonstrasi	%	100	•
19	Program pemeliharaan	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	kali	3	
	kantrantibmas dan pencegahan tindak krimina	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)	Rasio	1,62	Satpol PP dan Damkar
Misi	3 : Mewujudkan Peningkatan Infra	struktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwaw	vasan		
1	Program Pemba ngunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat	%	82	DPU PKP
2	Program penge mbangan dan	Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif	%	6,19	
	pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	40,7	DPU PKP
3	Program Peningkatan Sarana& Prasarana Aparatur	Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai	Unit	1	DPU PKP
4	Program Lingkungan Sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	96,2	
	Perumahan	berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	Hektar (Ha)	19,91	
		Cakupan Layanan Air Minum yang layak	%	91,3	
		Cakupan sanitasi pemukiman yang layak	%	78,9	DPU PKP
		Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota	%	8,2	
		Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum	%	76	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	80	DPU PKP
5	Program peningkatan kesiagaan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabubaten	90	00	DIUIM

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
	kebakaran	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	95	
		Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	95	
6	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya	PERDA	3	
		Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW beserta rencana rinci	%	100	DPU PKP
		Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang	%	100	
		Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya	%	100	
7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang	%	100	DPU PKP
8	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota	%	31,25	
	-	Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian	%	17,6	DPU PKP
		Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPST 3R)	%	14,5	
9	Program Penge ndalian Pencemar an dan Perusakan Lingkungan Hidup	Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah se-Kab. Temanggung	%	14,5	Dinas LH
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah Ibukota Kabupaten (Kecamatan Temanggung)	%	87	
		Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung)	%	65	Dinas LH
		Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara	unit	1	
11	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	%	100	Dinas LH
12	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara	%	100	Dinas LH
		Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa Kerusakannya	%	100	
		Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAE
		Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL	%	100	
		terbangunnya sumber energi alternatif terbarukan	unit	8	DPU PKP
13	Program peningkatan pelayanan	Persentase Kendaraan yang Diuji	%	95	
	angkutan	Persentase keselamatan angkutan umum	%	95	Disa a Davida da sa sa
		Tersedianya Fasilitas Terminal (tipe b)	Unit	1	Dinas Perhubungan
		Tersedianya sub terminal (tipe c)	Unit	12	
14	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan	%	69	Dinas Perhubungan
15	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan	%	90	
		Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan	%	69	Dinas Perhubungan
		Cakupan perusahan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek	%	100	
Misi	4:Mewujudkan Peningkatan Pen	didikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal			
Misi 1	Program Pendidikan anak usia	didikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan	%	100	
		Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau	%	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR
	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah ,	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan	%	50	
	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah ,	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Persentase pendidik yang disiplin	%	50	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Persentase pendidik yang disiplin Persentase angka kenakalan siswa	% %	50 100 0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah ,	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Persentase pendidik yang disiplin Persentase angka kenakalan siswa Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	% % % %	50 100 0 69,13	Pemuda dan OR
1	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Persentase pendidik yang disiplin Persentase angka kenakalan siswa Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	% % % % %	50 100 0 69,13 32.56	Pemuda dan OR Dinas Pendidikan,
1	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Persentase pendidik yang disiplin Persentase angka kenakalan siswa Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun) Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun)	% % % % %	50 100 0 69,13 32.56 48.76	Pemuda dan OR
1	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Persentase pendidik yang disiplin Persentase angka kenakalan siswa Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun) Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun)	% % % % % % % % % % % %	50 100 0 69,13 32.56	Pemuda dan OR Dinas Pendidikan,
1	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal Program pendidikan anak usia dini	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Persentase pendidik yang disiplin Persentase angka kenakalan siswa Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun) Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun) Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun) Rasio siswa per kelas TK	% % % % %	50 100 0 69,13 32.56 48.76 49.17	Pemuda dan OR Dinas Pendidikan,
2	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Persentase pendidik yang disiplin Persentase angka kenakalan siswa Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun) Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun)	% % % % % % % % % % Rasio	50 100 0 69,13 32.56 48.76 49.17 21	Pemuda dan OR Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR
2	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal Program pendidikan anak usia dini Program wajib belajar pendidikan	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Persentase pendidik yang disiplin Persentase angka kenakalan siswa Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun) Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun) Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun) Rasio siswa per kelas TK Persentase APK SD Sederajat Persentase APM SD Sederajat	% % % % % % % % % % % Rasio %	50 100 0 69,13 32.56 48.76 49.17 21 103.7	Pemuda dan OR Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR Dinas Pendidikan,
2	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal Program pendidikan anak usia dini Program wajib belajar pendidikan	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Persentase pendidik yang disiplin Persentase angka kenakalan siswa Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun) Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun) Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun) Rasio siswa per kelas TK Persentase APK SD Sederajat Persentase APM SD Sederajat Persentase APK SMP Sederajat	% % % % % % % % % % % % % % % % % % Rasio % %	50 100 0 69,13 32.56 48.76 49.17 21 103.7 95.57	Pemuda dan OR Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR Dinas Pendidikan,
2	Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal Program pendidikan anak usia dini Program wajib belajar pendidikan	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Persentase pendidik yang disiplin Persentase angka kenakalan siswa Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun) Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun) Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun) Rasio siswa per kelas TK Persentase APK SD Sederajat Persentase APM SD Sederajat	% % % % % % % % % % % Rasio % % %	50 100 0 69,13 32.56 48.76 49.17 21 103.7 95.57 96.15	Pemuda dan OR Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR Dinas Pendidikan,

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
		Rasio Siswa per Kelas SD/MI	Angka	21.16	
		Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs	Angka	32	
		Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar	%	74,42	
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	%	99.52	
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	%	99.4	
4	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	%	99,17	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.19	BPS, Dinas Pendidikan
5	Program pendidikan nonformal	Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah	%	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR
6	Program manajemen pelayanan	Persentase TK/RA Terakreditasi A	%	5.83	
	pendidikan	Persentase TK/RA Terakreditasi B	%	42,71	
		Persentase TK/RA Terakreditasi C	%	42,29	
		Persentase SD/MI Terakreditasi A	%	4.67	
		Persentase SD/MI Terakreditasi B	%	61.01	
		Persentase SD/MI Terakreditasi C	%	33.22	
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi A	%	31,4	Disco Describilitaria
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi B	%	40	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR
		Persentase SMP/MTs Terakreditasi C	%	27.62	Femuda dan OK
		Persentase Angka Lulusan SD/MI	%	100	
		Persentase Angka Lulusan SMP/MTs	%	100	
		Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00	%	73.39	
		Persentase Siswa SMP/MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00	%	21.28	
7	Program Wajib Belajar Pendidikan	Persentase Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA	%	94.87	
	Dasar Sembilan Tahun	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0.13	Dinas Pendidikan,
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0.338	Pemuda dan OR
8	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	%	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR
		Cakupan Kunjungan pengawas Sekolah ke satuan pendidikan	%	75.3	remuda dan OR

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
9	Program Pendidikan Nonformal	Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan	%	92.56	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR
10	Program Peningkatan Mutu	Rasio Siswa per Pendidik TK/RA	Rasio	1:14	Din as Dan di dilsan
	Pendidik Dan Tenaga	Rasio Siswa per Pendidik SD/MI	Rasio	1:14	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR
	Kependidikan	Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs	Rasio	1:15	Peniuda dan OK
11	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga	Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	45,22	
	Kependidikan	Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	71.66	
		Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik	%	83.59	
		Cakupan ketersediaan guru SD/MI.	%	95	
		Cakupan ketersediaan guru SMP/MTS per Satuan mata pelajaran.	%	84,5	
		Cakupan ketersediaan Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	89	
		Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs.	%	82,5	
		Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.	%	74,5	
		Cakupan kualifikasi akademik Kepala SD/MI.	%	89	Disc Desc. 41:411
		Cakupan Kualifikasi Akademik Kepala SMP/MTs	%	98	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR
		Cakupan Kualifikasi Akademik pengawas sekolah/Madrasah.	%	95.92	Pemuda dan OR
		Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik	%	3.73	
		Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik	%	31.4	
		Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik	%	50.69	
		Besaran Pegawai Administrasi Sekolah	Orang	181	
		Besaran Penilik Pendidikan Nonformal	Orang	20	
		Rasio Pengawas Sekolah	Rasio	1;17	
		Besaran Pamong Belajar	Orang	5	
			Jimig		

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
12	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik	%	88.79	
		Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran	%	87.47	
		Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya	%	29.22	
		Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang	%	88.747	
		Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang	%	87.47	
		Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik	%	93.48	
		Persentase Ruang Kelas SMP yang Kondisinya Baik	%	93.23	Dinas Pendidikan,
		Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	%	70.49	Pemuda dan OR
		Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	%	80.94	
		Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan SD/MI dan6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	%	100,00	
		Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)	%	88.45	
		Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs	%	81.42	
		Cakupan Ketersediaan Ruang Guru	%	100	
		laya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat			
1	Program peningkatan	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	95	Dinas Kesehatan
	keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yg Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	95	
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	90	
		Cakupan Pelayanan Nifas	%	95	
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	perkilomil	100	
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	99	
		Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1)	%	99	
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	90	
			%	65	
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani	70	00	
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani Angka Kelangsungan Hidup Bayi	permil	0,992	
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	permil	0,992	
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	permil permil	0,992 6.8	

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
2	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	Dinas Kesehatan
	Penduduk Miskin	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	100	RSUD
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten	%	100	RSUD
3	Program Pencegahan dan	Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)	%	>87	
	Penanggulangan Penyakit	Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate)	%	70	
	Menular	Prevalensi HIV pada Penduduk Usia Dewasa	%	< 0,05	
		Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan	%	70	
		Komprehensif tentang HIV/AIDS	90	70	
		Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%	70	
		Cakupan Penemuan Penderita Diare	%	90	
		CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk)	0	< 1	
		Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk	0	<1	Dinas Kesehatan
		Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 10.000 Penduduk	%	<20	Dilias Resellatali
		CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue)	%	<1	
		Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani	%	100	
		Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	%	100	
		Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak	%	95	
		Acut Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	kasus	≥2 (4 kasus)	
		Cakupan Desa atau Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	
		Cakupan Penderita diare yg ditangani	%	100	
4	Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	15.5	
	_	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	<0,5	
		Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	%	90	Dinas Kesehatan

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
6	Pengembangan Sumber Daya	Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan SDM sesuai Standar	%	70	
	Kesehatan (Program Standarisasi	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	90	
	Pelayanan Kesehatan)	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas	Rasio	1/31.000	Dinas Kesehatan
	,	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	100	
		Cakupan Pelayanan RSUD:			
		BOR	%	70	
		LOS	hari	6	
		TOI	hari	2	RSUD
		GDR	‰	36	RSUD
		NDR	‰	18	
		Kinerja Pelayanan BLUD	Strata	Sehat	
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD	-	Lulus	
7	Pengembangan Lingkungan Sehat	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan	%	75	
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan	%	75	
		Cakupan Penduduk yang Memanfaatkan Jamban	%	80	Diago Kanalastan
		Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan	%	75	Dinas Kesehatan
		Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan	%	60	
		Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Tingkat Dasar	%	100	
8	Program Promosi Kesehatan dan	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	
	Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri	%	50	DPPKBPP dan PA
	_	Cakupan Rumah Tangga Sehat	%	80	<u> </u>
9	Program Pembinaan Kesejahtera	Meningkatnya kualias kesejahteraan keluarga:			DPPKBPP dan PA
	an Keluarga	a. Keluarga Pra Sejahtera	%	20,22	

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
		b. Keluarga Sejahtera I	%	7,23	
		c. Keluarga Sejahtera II	%	23,19	
		d. Keluarga Sejahtera III	%	45,22	
		e. Keluarga Sejahtera III plus	%	4,14	
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	%	100	
10	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun	%	2,6	
10	1 Togram Neidarga Bereneana	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	84	
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	%	5,05	
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	%	81,25	
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	%	86	
		Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan	Rasio	1 :2	DPPKBPP dan PA
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan	Rasio	1:1	
		Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	%	3,55	
		Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk	%	0,6	
		Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	0	14.055	
		Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	3	
MISI	6: Mewujudkan Peningkat	an Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan	Berorientasi pad	da Pelayanan Pul	lik
1	Program Perencanaan	Besaran Penelitian dan Pengembangan	dokumen	1	BP4D
	Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	
		Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio	0,2	
		Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	%	0,0185	

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
		Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik	Dokumen	2	
		Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD	%	100	
		Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	%	100	
		Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD	%	100	
		Persentase program SKPD di Luar RPJMD	%	0	
		Persentase Kegiatan SKPD di Luar Renstra SKPD	%	0	
2	Program Penataan Penguasaan,	Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat	%	100	
	Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten	%	20	DPU PKP
3	Program Peningkatan Kapasitas	Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional	%	1.9	
	Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	%	3	
	_	Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	34	
		Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS	%	95	
		Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong	%	90	BKD
		persentase PNS Lulusan S1	%	58	
		Persentase PNS Lulusan S2/ S3	%	5.1	
		Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	%	55	
		Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu	%	100	
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Mengalami Kasus	%	100	Bagian Pemerintahan
		Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong	%	100	Desa Setda
		Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong	%	97	
5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda	%	100	
	Daerah	Persentase Jumlah Keputusan DPRD yang Ditindak Lanjuti Terhadap Keputusan DPRD yang Ditetapkan	%	100	Sekretariat DPRD
6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	90	Inspektorat
7	Program Penataan Peraturan	Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang	%	100	Bagian Organisasi dan

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
	Perundang-undangan	Menyusun Standar Pelayanan Publik			
		Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP	%	100	Tata Laksana Setda
8	Program Intensifikasi Penanganan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Kriteria	В	
	Pengaduan Masyarakat	Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kriteria	В	Bagian Organisasi dan
		Persentase Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN)	%	95	Tata Laksana Setda
		Persentase Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tepat waktu	0	100	Bagian Umum
		Persentase Jumlah SKPD yang Menyampaikan DURP dengan tepat waktu	%	100	Bagian Pembangunan
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi	Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa	%	100	Dagia - Dagia
	Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	Bagian Pembangunan
		Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti Terhadap Jumlah Total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun	%	100	Bagian Hukum
		Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	%	25	DPPKAD
		Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah	%	100	Bagian Pemerintahan
		Besaran kerjasama daerah	Dokumen	1	Umum Setda
		Cakupan Pelaksanaan SPM	%	96.8	
10	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah	%	100	Bagian Pemerintahan Umum Setda
		Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kelurahan	%	100	Bagian Pemerintahan
		Cakupan Pembinaan Administrasi Desa	%	100	Desa Setda dan Kecamatan
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah	%	0.87	DPPKAD

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
12	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria	WTP	DPPKAD
13	Program Peningkatan dan	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	%	9	DPPKAD
	Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertib administrasi aset daerah di PD	%	80	
14	Program penataan administrasi	Cakupan penerbitan kartu keluarga	%	100	
	kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	37,63	Dinas Kependudukan
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	63,46	dan Pencatatan Sipil
		Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian	%	100	
15	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Cakupan Jenis Perizinan yang Memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur	%	100	
		Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%	95	DPM dan PTSP
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Waktu 6 (Enam) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	Hari	6	
16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Laju Investasi	%	14,43	DPM dan PTSP
17	Program Peningkatan Promosi	Nilai Investasi	Rupiah	170 M	
	dan Kerjasama Investasi	Besaran jumlah Investor	investor	1734	
		Besaran Promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha	Kali/th	7	
		Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal	unit	32	DPM dan PTSP
		Besaran implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi secara Elektronik	%	100	
18	Program Pengembangan Budaya	Rasio Pengunjung Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	82	Dinas Vasceiros de
	Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung	%	87	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19	Program Penge mbangan Data/ Informasi	Besaran ketersediaan data statistik	dokumen	9	Diskominfo

No	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	PENANGGUNG JAWAB
20	Program pengembangan informasi	Rasio Akses Internet di Ruang Publik	rasio	100	
	dan komunikasi	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Tradisional	kali	6	
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Interpersonal	kali	10	
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang	kali	10	Diskominfo
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa	kali	10	
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media baru	hari	10	
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	55	
		Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi setiap Tahun	%	100	
		Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog	%	100	DPUPKP
		Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Digital	%	100	
21	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	%	100	Diskominfo
22	Program pengkajian dan peneliti an bidang informasi dan komunikasi	Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi	%	100	Diskominfo

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018

Berdasarkan hasil analisis terhadap terbagai permasalahan Kabupaten Temanggung dan hasil evaluasi capaian pembangunan, serta penentuan prioritas pembangunan daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang secara langsung menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah serta program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk menetapkan rencana program dan kegiatan daerah maka dilakukan sebuah proses panjang mulai dari pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat desa/kelurahan yang kemudian hasilnya dibawa dalam bentuk usulan prioritas desa/kelurahan ke Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan.

Di samping aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Kabupaten, dalam perencanaan pembangunan tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Temanggung juga melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan rekomendasi DPRD yang dituangkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD, dan merupakan salah satu bahan penyusunan RKPD Tahun 2018.

Program dan Kegiatan tersebut mencakup berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, termasuk hasil aspirasi kegiatan masyarakat yang diusulkan dan diterima di tingkat Kecamatan, dimana diwujudkan melalui berita acara hasil Musrenbang RKPD di kecamatan, selanjutnya perlu dimasukkan ke Rencana Kerja Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Program dan kegiatan yang menjadi kewenangan per urusan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- 2. Program dan kegiatan yang menjadi fungsi penunjang;
- 3. Program dan Kegiatan pendukung operasional yang ada disetiap Perangkat Daerah;

- 4. Program dan kegiatan yang mengacu pada Prioritas Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2013-2018;
- 5. Program dan kegiatan yang mendukung kebijakan nasional;
- 6. Program dan kegiatan yang mendukung kebijakan Provinsi Jawa Tengah.
- 7. Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan, dan Musrenbang Kecamatan.

V.1. Program dan kegiatan yang menjadi kewenangan per Urusan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Sesuai UU 23 Tahun 2014 Program Prioritas terbagi ke dalam 6 urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, 18 urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan 8 urusan Pilihan.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pelayanan Dasar Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan prioritas kegiatan sejumlah 19 kegiatan;
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun, dengan prioritas kegiatan sejumlah 67 kegiatan;
- c. Program Pendidikan Non Formal, dengan prioritas kegiatan sejumlah 17 kegiatan;
- d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 10 kegiatan;
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 22 kegiatan;

2. Bidang Kesehatan

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD, serta Kesra adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan prioritas kegiatan sejumlah 56 kegiatan;
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan prioritas kegiatan dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, dengan prioritas kegiatan sejumla 2 kegiatan;
- i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- j. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan prioritas sejumlah 1 kegiatan;
- p. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak,
 dengan prioritas sejumlah 3 kegiatan;
- q. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, dengan prioritas sejumlah 3 kegiatan;

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- g. Program Pemberdayaan Konstruksi, dengan prioritas kegiatan sejumlah1 kegiatan;
- h. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- i. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- b. Program Pengembangan Prasarana Perkotaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- c. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;

- d. Program Pengembangan Perumahan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- e. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- g. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan prioritas kegiatan sejumlah 8 kegiatan;

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan prioritas kegiatan sejumlah 8 kegiatan;
- b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- e. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;

6. Bidang Sosial

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil,
 dan PMKS lainnya, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3
 kegiatan;
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan prioritas kegiatan sejumlah 10 kegiatan;
- c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

- d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan prioritas kegiatan sejumlah 9 kegiatan;
- e. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- f. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Tenaga kerja

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan prioritas kegiatan sejumlah 9 kegiatan;
- b. Program peningkatan kesempatan kerja dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;
- d. Program pengembangan wilayah transmigrasi dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak & perempuan dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender &
 Anak dengan prioritas kegiatan sejumlah 9 kegiatan;

3. Bidang Pangan

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan,
 dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;

4. Bidang Pertanahan

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
 Pemanfaatan Tanah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1
 kegiatan;
- b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

5. Bidang Lingkungan Hidup

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,
 dengan prioritas kegiatan sejumlah 9 kegiatan;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
 Hidup, dengan prioritas kegiatan sejumlah 21 kegiatan;
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Program penataan administrasi kependudukan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 8 kegiatan;
- b. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah,
 dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan ketahanan masyarakat desa, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 9 kegiatan;
- c. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- d. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- e. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa, dengan prioritas kegiatan sejumlah 21 kegiatan;
- f. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Program keluarga berencana, dengan prioritas kegiatan sejumlah16 kegiatan;
- b. Program pembinaan kesejahteraan keluarga, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;

9. Bidang Perhubungan

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,
 dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
 LLAJ, dengan prioritas kegiatan sejumlah 8 kegiatan;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 6 kegiatan;
- d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;

10. Bidang Komunikasi dan Informatika

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan DasarBidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan informasi dan komunikasi, dengan prioritas kegiatan sejumlah 14 kegiatan;dan
- b. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;
- c. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan prioritas kegiatan sejumlah 9 kegiatan;
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

12. Bidang Penanaman Modal

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan pelayanan perizinan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 8 kegiatan;
- b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;

13. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;

14. Bidang Statistik

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Statistik adalah sebagai berikut:

a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;

15. Bidang Persandian

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Persandian adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

16. Bidang Kebudayaan

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan prioritas kegiatan sejumlah 13 kegiatan;

17. Bidang Perpustakaan

Rencana Program yang akan dilaksanakanUrusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan adalah sebagai berikut:

a. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;

18. Bidang Kearsipan

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Proram Perbaikan Sistim Administrasi Kearsipan Daerah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Kearsipan,
 dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- b. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;

- c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

2. Bidang Pariwisata

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- c. Program Pengembangan Kemitraan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;

3. Bidang Pertanian

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan penerapan teknologi
 pertanian/peternakan /perkebunan dengan prioritas kegiatan
 sejumlah 6 kegiatan;
- b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan prioritas kegiatan sejumlah 16 kegiatan;
- c. Program Pemberayaan Petanidengan prioritas kegiatan sejumlah 16 kegiatan;

4. Bidang Kehutanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan sejak tahun 2017 menjadi kewenangan Provinsi sehingga tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

5. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral sejak tahun 2017 menjadi kewenangan Provinsi, kecuali sub urusan Energi Baru Terbarukan dengan kegiatan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah. Akan tetapi sub

urusan Energi Baru Terbarukan ini belum dilakukan di Kabupaten Temanggung.

6. Bidang Perdagangan

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perlidungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan,
 dengan prioritas kegiatan sejumlah 10 kegiatan;
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- c. Program Peningkatan Efiensi Perdagangan dalam Negeri, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- e. program Pengelolaan Pasar daerah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- f. Program Pembinaan Pedagang dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan.

7. Bidang Perindustrian

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 10 kegiatan;

8. Bidang Transmigrasi

Rencana Program yang akan dilaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi adalah sebagai berikut:

 a. Program pengembangan wilayah transmigrasi, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

V.2. Program dan Kegiatan yang menjadi Fungsi Penunjang.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Temanggung membentuk perangkat daerah pengampu urusan dan perangkat daerah sebagai fungsi penunjang. Fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

- 1. Perencanaan.
- 2. Keuangan.
- 3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- 4. Penelitian dan pengembangan.
- 5. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Fungsi Penunjang Perencanaan

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai fungsi penunjang perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 86 kegiatan;

2. Fungsi Penunjang Keuangan

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai fungsi penunjang keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Program penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan; ?
- b. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas kegiatan sejumlah 21 kegiatan;
- c. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;

3. Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan prioritas kegiatan sejumlah 9 kegiatan;
- b. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, dengan prioritas kegiatan sejumlah 12 kegiatan;
- c. Program pendidikan kedinasan, dengan prioritas kegiatan sejumlahl kegiatan;

d. Program administrasi kepegawaian, dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;

4. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai fungsi penunjang penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penelitian dan Pengembangan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;

5. Fungsi Penunjang Lainnya

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai fungsi penunjang lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;
- b. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem, dan prosedur pengawasan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- d. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa, dengan prioritas kegiatan sejumlah 9 kegiatan;
- e. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- f. Program penataan peraturan perundang-undangan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 8 kegiatan;
- g. Program Penyaluran bantuan/Hibah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 8 kegiatan;
- h. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- i. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 6 kegiatan;

- j. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- k. Program pendidikan politik masyarakat, dengan prioritas kegiatan sejumlah 6 kegiatan;
- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- m. Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;
- n. Program pencegahan dan kesiap-siagaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;
- o. Program tanggap darurat dan logistik, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- p. Program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;

V.3. Program dan Kegiatan Pendukung Operasional

Program dan Kegiatan pendukung operasional Perangkat Daerah merupakan program dan kegiatan yang ada di setiap perangkat daerah, direncanakan program yang bersifat mendukung operasional perangkat daerah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

V.4. Program dan kegiatan yang mengacu pada Prioritas Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2013-2018.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung No 69 Tahun 2016 tentang Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 terdapat sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) IKD. Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKD RPJMD 2013-2018 pada tahun 2016, sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) IKD telah tercapai, 173 (seratus tujuh puluh tiga) IKD akan tercapai dan 50 (lima puluh) IKD perlu upaya keras.

Rencana Program dan Kegiatan prioritas tahun 2018, merupakan tahun terakhir masa jabatan Bupati, sehingga perlu ditekankan pada capaian Indikator Kinerja Daerah yang perlu upaya keras. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mulai diimplementasikan tahun 2017, maka terjadi bebrapa perubahan kewenangan. Ada beberapa kewenangan Kabupaten yang ditarik menjadi kewenangan Provinsi/Pusat, dan beberapa kewenangan Pusat/Provinsi yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Perubahan kewenangan ini diikuti perubahan dalam IKD. Dari 50 IKD perlu upaya keras 5 IKD ditarik ke Provinsi/Pusat, sehingga terdapat 45 IKD perlu upaya keras yang masih menjadi kewenganga Kabupaten. Ke 45 IKD dapat dilihat tabel di bawah ini.

TABEL: IKD YANG PERLU UPAYA KERAS TAHUN 2018

N O	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN RENJA 2018	Sumber Dana					
1	2	2	3	4	5					
	MISI 1: Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan PERTANIAN									
1	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan/peternaka n	1 Peningkatan produktifitas Tembakau	Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau (Pengembangan Sentra Tembakau Varietas Kemloko)	3.600.000.000	DBHCHT					
			Penyediaan dan Pemurnian Benih Tembakau Varietas Kemloko	300.000.000	DBHCHT					
			Penyediaan dan Pemurnian Benih Tembakau Unggul Lokal (Kemloko dan non Kemloko) (Penyediaan dan Pemurnian Benih Tembakau)	250.000.000	DBHCHT					
			Penggunaan benih bermutu yang bersertifikat Sesuai Permintaan Pasar (Pemuliaan Benih Tembakau)	300.000.000	DBHCHT					
			Pengendalian OPT Tembakau	750.000.000	DBHCHT					
2	Program Pemberdayaan Petani	2 Rasio jumlah kelompok tani maju	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	550.000.000	DAU					
	ı	1	KELAUTAN PERIKANAN	1						
3	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikananangkap	3 Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan	50000000	DAK					

4	Program pengembangan perikanan tangkap	4	Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum	Pelestarian Ikan di Perairan Umum	200.000.000	DAU
		•		PERDAGANGAN	•	
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya	5	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	Pembangunan Pasar Tradisional Ngadirejo eks Pasar hewan	5.000.000.000	DAU
				Pembangunan kios Buah Kaligaleh	250.000.000	DAU
6	Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan	6	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	Penyusunan Raperda PKL	25.000.000	DAU
				Pembinaan dan Pemberdayaan PKL	150.000.000	DAU
				Pembinaan Pelaku usaha dagang kecil	50.000.000	DAU
7	Perlindungan Konsumen	7	Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang	Fasilitasi Tera Ulang UTTP dan pos ukur ulang	75.000.000	DAU
			, , ,	Pengadaan Alat-Alat Kemerplogian	400.000.000	DAU
				Pengadaan MobilPengawasan kemetrologian	300.000.000	DAU
				Pengawasan Kemetrologian	25.000.000	DAU

				Penyusunan Perbup distribusi BBM di luar SPBU	50.000.000	DAU
8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi/Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi (Renja DPMPTSP)	8	Besaran Promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha	Penyelenggaraan matcmacking dan pameran investasi	750.000.000	DAU
				Diseminasi promosi Investasi	150.000.000	DAU
		1		KOPERASI		
9	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	9	Besaran jumlah UKM yang dibina	Pembinaan Pemgembangan produk unggulan berasis ovop	25.000.000	DAU
				Pemberdayaan UKM di Lingkungan IHT	100.000.000	DBHCHT
				PARIWISATA		
10	Program Pengembangan Destinasi Wisata	1 0	Besaran lama tinggal wisatawan	Pengembangan Rest Area Kledung	400.000.000	DAU
		11	Persentase Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Pembinaan dan sosialisasi Informasi Kepariwisataan	20.000.000	DAU
				Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	400.000.000	DAU
				Pawai Pembangunan Kabupaten Temanggung	450.000.000	DAU
	1	1	ı	KEHUTANAN	1	
11	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 2	Besaran Penanganan Lahan			kewenangan di tarik Prov

			17.30		I				
			Kritis						
	Misi 2 Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera								
	SOSIAL								
12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1 3	Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis	Pelatihan kemampuan dan ketrampilan bagi keluarga Fakir Miskin (FM)	220.000.000	DAU			
13	Program tanggap darurat dan logistik	1 4	Persentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sementara tanggap darurat pasca bencana	Penanganan bencana alam	700.000.000	DAU			
				Peningkatan penanganan bencana alam	350.000.000	DAU			
				Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap darurat	2.000.000.000	DAU			
14	program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1 5	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap	Monitoring dan evaluasi pasca bencana	19.000.000	DAU			

			Darurat			
				Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1.200.000.000	DAU
				Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana	20.000.000	DAU
				Pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana		DAU
				Pelatihan dukungan psikososial pasca bencana	30.000.000	DAU
				Sosialisasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pasca bencana	20.000.000	DAU
				Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun 2015 (Hibah Pemerintah)		DAU
			PEMBER	DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
15	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa	1 6	Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa	Pendataan awal,pembinaan dan evaluasi desa/kelurahan binaan	36.000.000	DAU
16	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	1 7	Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran	Bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH)	5.000.000.000	DAU
17	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	1 8	Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna	15.000.000	DAU
				Gelar TTG tingkat Nasional	200.000.000	DAU

18	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1 9	Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan)	Pembinaan, Monitoring dan bintek Lembaga Ekonomi Desa	100.000.000	DAU
				KEBUDAYAAN		
19	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	0	Cakupan Promosi Cagar Budaya	Fasilitasi Penetapan tim pengkaji Cagar Budaya	50.000.000	DAU
				TENAGA KERJA		
20	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2 1	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja (Upaya Keras)	300.000.000	DAU
				Operasionalisasi Warung / Kios 3 in1	100.000.000	DAU
				Bimbingan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Purna TKI	100.000.000	DAU
21	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2 2	Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Upaya Kera	25.000.000	DAU
				TRANSMIGRASI		
22	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	2 3	Persentase Penempatan Transmigran	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM (Upaya Keras)	125.000.000	DAU
			PEMBERDAYAAN	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

23	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	2 4	Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi	Fasilitasi Keg Pemberdayaan Perempuan & perlind anak	70.000.000	DAU
			Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu			
				PEMUDA DAN OLAHRAGA		
24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	2 5	Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga	Hibah kepada KONI	6.000.000.000	DAU
25	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2 6	Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	70.000.000	DAU
Misi	3 Mewujudkan Peningkatan Infrastru	ktur	Permukiman Perdesaa	n dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingk	ungan	
				PEKERJAAN UMUM		
26	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	2 7	Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkar Kota Parakan	-		
				PENATAAN RUANG		-

27	Program Perencanaan Tata Ruang	2 8	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya	Operasional BKRD dan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang	200.000.000	DAU
				Perda RDTR Kawasan Perkotaan	50.000.000	DAU
				Perda PDRT Kawasan Strategis Peruntukan Industri	100.000.000	DAU
				LINGKUNGAN HIDUP		
28	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9	Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara			
29	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3 0	Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha / Kegiatan	50.000.000	DAU
30	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3 1	Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa	Pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup dan Inventarisasi data SDA	110.000.000	DAU
				Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup	50.000.000	DAU

	Misi 4 Me	wuju	dkan Peningkatan Pe	⊥ ndidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Ke	earifan Lokal	
				PENDIDIKAN		
31	Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal	3 2	Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA	60.000.000	DAU
				Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan TK/RA	50.000.000	DAU
				Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa	30.000.000	DAU
	Mis	i 5 M	∣ ewujudkan Peningka	⊥ tan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Ma	l Asyara	
			_	KESEHATAN		
32	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3 3	Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate)	Pengendalian Penyakit Menular	140.000.0	DAU
		3 4	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	Pengendalian Penyakit Menular	00	DAU

33	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	3 5	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD	Pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu	9.805.728.000	DAU
			PENGENDALIAN	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
34	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- PADU	3 6	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan			
35	Program Pelayanan Kontrasepsi	3 7	Cakupan Penyediaan Alat dan Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	Keg Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	1.000.000.0 00	DAU
	Misi 6 Mewujudkan Peningkata	an Pe	laksanaan Pemerinta	han yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Be	 rorientasi pada Pelayar	nan Publik
			DEDENCAN	AAN / MENJADI FUNGSI PENUNJANG		
36	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Persentase Kegiatan SKPD di luar Renstra SKPD	Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan	300.000.000	DAU
			OTONOMI DA	ERAH/ MENJADI FUNGSI PENUNJANG		
37	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	4 0	Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik	Penyusunan Standar Pelayanan	150.000.000	DAU

		4	Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	300.000.000	DAU
38	Program Pelayanan Administrasi	4 2	Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	ada di semua OPD		DAU
39	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Percepatan pemasukan PBB intensifikasi pajak daerah	520.955.840	DAU
			KON	//UNIKASI DAN INFORMATIKA		
40	Program pengembangan informasi dan komunikasi	4	Rasio Akses Internet di Ruang Publik	Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	100.000.000	DAU
41	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus (Pemerintah)	4 5	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi setiap Tahun	Pembinaan Jasa Konstruksi	50.000.000	DAU
42	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	4 6	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e- Government	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE dan online SKPD (e-Government)	1.900.000.000	DAU
43	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	4 7	Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	1.500.000.000	DAU

	Komunikasi		

V.5. Program dan kegiatan yang mendukung kebijakan nasional.

Dalam rangka menunjang peran Kabupaten Temanggung sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengintegrasikan rencana pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan melihat pada arah kebijakan nasional serta telah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, mengusulkan beberapa program dan kegiatan prioritas yang diharapkan dapat tercantum dalam RKP Tahun 2018 dan masuk ke dalam RAPBN Tahun 2018. Usulan program prioritas ini diusulkan dalam forum Musrenbang Nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).

V.6. Program dan kegiatan yang mendukung kebijakan Provinsi Jawa Tengah.

Usulan Program dan Kegiatan yang mendukung kebijakan Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya :

- 1. Sosialisasi dari Provinsi yang mendukung pencapaian Visi, Misi Gubernur.
- 2. Program dan Kegiatan yang mendukung kebijakan Provinsi Jawa Tengah, diusulkan melalui Aplikasi SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) yang memuat usulan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota (usulan yang merupakan kewenangan Kabupaten), dan usulan Bantuan Keuangan Kepada Desa (usulan yang merupakan kewenangan Desa), serta usulan APBD I Sektoral (yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Kabupaten Temanggung).
- Koordinasi usulan Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota dari Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Temanggung yang akan diusulkan ke Provinsi Jawa Tengah, yang telah disetujui oleh Bupati Temanggung.

Usulan program dan kegiatan prioritas yang telah masuk, diharapkan dapat tercantum dalam DPA Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Temanggung dan Bantuan Keuangan Kepada Desa, serta usulan APBD Provinsi Sektoral ke dalam RAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Usulan program prioritas ini diusulkan dalam forum Musrenbang Provinsi.

V.7. Program dan kegiatan dari aspirasi masyarakat, melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Desa, dan Musrenbang Kecamatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dan untuk mengimbangi dana Desa dari APBN, maka khusus Kelurahan pada tahun 2018 diprioritaskan usulan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan, yang mengampu daftar prioritas usulan kegiatan sarana dan prasarana lokal kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan sumber dana APBD Kabupaten.

Hasil aspirasi masyarakat yang diusulkan lewat Musrenbang Kelurahan diprioritaskan sesuai Pagu Anggaran masuk ke dalam Rencana Kerja Kecamatan. Kelurahan di Kabupaten Temanggung ada 23 Kelurahan, yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu di Kecamatan Temanggung ada 19 Kelurahan, Kecamatan Parakan ada 2 Kelurahan, Kecamatan Ngadirejo ada 1 Kelurahan, dan Kecamatan Kranggan ada 1 Kelurahan. Ke empat Kecamatan tersebut di atas menampung usulan prioritas Kelurahan ke dalam Rencana Kerja masing-masing kecamatan. Usulan Prioritas Kelurahan yang mengacu pada Pagu Indikatif Kelurahan.

Sedangkan aspirasi masyarakat yang diusulkan lewat Musrenbang Desa yang dibagi menjadi 3 Bidang yaitu Bidang I (Bidang Inftastruktur), Bidang II (Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam), dan Bidang III (Bidang Sumber Daya Manusia). Masing-masing Bidang mengampu 3 usulan prioritas. Yang akan diajukan ke Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan juga dibagi menjadi 3 Bidang yaitu Bidang I (Bidang Inftastruktur), Bidang II (Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam), dan Bidang III (Bidang Sumber Daya Manusia). Masing-masing Bidang mengampu 3 usulan prioritas. Yang diajukan ke Renja Perangkat Daerah, melalui Forum Perangkat Daerah.

Tidak semua usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang di Kecamatan dapat disetujui dan masuk menjadi program dan kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah. Usulan yang tidak disetujui dan tidak masuk tersebut dikarenakan:

- 1. Perangkat Daerah tidak mempunyai program dan kegiatan dimaksud;
- 2. Usulan tidak mencerminkan prioritas kegiatan dan tidak mampu menyebutkan lokasi usulan kegiatan.
- 3. Persyaratan administrasi dan teknis untuk menjadi lokasi kegiatan belum terpenuhi.
- 4. Usulan yang diajukan tidak sesuai dengan kewenangan yang ada di Perangkat Daerah.

Dari Daftar Usulan Prioritas hasil Musrenbang Kecamatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Bidang I (Bidang Inftastruktur):
 - a. Tiga Usulan Bidang Infrastruktur M1, M2, M3 masuk ke Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (100 %) dengan sumber dana APBD II ada 16 Kecamatan, yaitu Kecamatan : Bulu, Temanggung, Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Kedu, Parakan, Jumo, Tretep, Candiroto, Kranggan, Selopampang, Bansari, Kledung, Wonoboyo, dan Gemawang.
 - b. Dua usulan Bidang Infrastruktur yang masuk ke Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (67%) dengan sumber dana APBD II ada 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan : Tembarak (M1 dan M3), Ngadirejo (M2, M3), Tlogomulyo (M2, M3), dan Bejen (M1, M2).
 - c. Usulan Bidang Infrastruktur yang tidak masuk ke dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dengan sumber dana APBD II ada 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan: Tembarak (M2) dengan usulan kegiatan Rehab Pasar Gondang sudah dimasukkan ke sumber dana APBN; Ngadirejo (M1) dengan usulan kegiatan Trotoar jembatan sungan Bendo bukan kewenangan Kabupaten, tetapi merupakan kewenangan Provinsi; Tlogomulyo (M1) kegiatan Pengaspalan Jalan Desa (akan dinaikkan statusnya menjadi jalan Kabupaten) Jalur Angkudes Balerejo-Sriwungu-Tanjungsari, belum bisa masuk karena statusnya masih jalan Desa; Bejen (M3) kegiatan

Cor Blok Jalan Kebondalem-Kemuning sudah tertangani di tahun 2017,.

2. Bidang II (Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam):

- a. Tiga Usulan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam M1, M2, M3 masuk ke Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (100 %) dengan sumber dana APBD II ada 18 Kecamatan, yaitu Kecamatan: Bulu, Tembarak, Temanggung, Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Kedu, Parakan, Ngadirejo, Jumo, Candiroto, Kranggan, Selopampang, Bansari, Kledung, Bejen, Wonoboyo, dan Gemawang.
- b. Dua usulan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang masuk ke Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (67%) dengan sumber dana APBD II ada 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan : Tretep (M2 dan M3); Tlogomulyo (M1 dan M2).
- c. Usulan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang tidak masuk ke dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dengan sumber dana APBD II ada 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan: Tretep (M2) dengan usulan kegiatan Pengembangan Desa Wisata lokasi desa Simpar, tidak ada dalam Peraturan Bupati; Tlogomulyo dengan usulan kegiatan Pembangunan Irigasi Desa Langgeng (Pematah Air Hujan) belum masuk karena belum jelas nama Daerah Irigasi nya.

3. Bidang III (Bidang Sumber Daya Manusia):

- a. Tiga Usulan Bidang Sumber Daya Manusia M1, M2, M3 masuk ke Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (100 %) dengan sumber dana APBD II ada 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan : Bulu, Temanggung, Kandangan, Kedu, Parakan, Ngadirejo, Jumo, Kranggan, Selopampang, Bansari, dan Gemawang.
- b. Dua usulan Bidang Sumber Daya Manusia yang masuk ke Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (67%) dengan sumber dana APBD II ada 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan : Tembarak (M1, M2), Pringsurat (M1, M2), Candiroto (M2, M3), Kledung (M2, M3), dan Wonoboyo (M1 dam M3).
- c. Satu usulan Bidang Sumber Daya Manusia yang masuk ke Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (33%) dengan sumber

- dana APBD II ada 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan : Tretep (M3), Tlogomulyo (M1), dan Bejen (M3).
- d. Usulan kegiatan Bidang Sumber Daya Manusia yang tidak masuk sama sekali (0 %) ada satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Kaloran (M1, M2, dan M3).
- e. Usulan kegiatan Bidang Sumber Daya Manusia yang tidak masuk ke dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dengan sumber dana APBD II ada 9 Kecamatan, yaitu Kecamatan:
 - Satu usulan kegiatan tidak masuk ada 5 Kecamatan : Tembarak (M3) dengan usulan kegiatan Operasional TPQ, Pringsurat (M3) dengan usulan kegiatan Pembangunan Sumur Resapan (tidak masuk Bidang SDM), Candiroto (M1) dengan usulan kegiatan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap (tanah masih dipakai SD), Kledung (M1) kegiatan Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Kledung, dan Wonoboyo (M2) kegiatan Pembangunan Sarpras Olah Raga (Lapangan Sepakbola), masuk Bankeu.
 - Dua usulan kegiatan tidak masuk ada 3 Kecamatan: Tretep (M1, M2) dengan usulan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda di Bidang Olah Raga, dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kesenian (dua kegiatan ini belum jelas usulannya); Tlogomulyo (M2, M3) kegiatan Pembangunan Jamban RTM (Tlilir) dan kegiatan Pemugaran RTLH (Candisari) karena ke dua kegiatan ini belum terbahas di Forum Perenakat Daerah; Bejen (M1, M2) kegiatan Peningkatan Kapasitas Pariwisata Curug Onje dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pariwisata Curug Guwung (dua usulan kegiatan ini status tanah milik Perhutani).
 - Tiga Usulan tidak masuk ada 1 Kecamatan : Kaloran (M1, M2, M3) dengan usulan kegiatan (M1) Pembangunan Wisata Curug Kuwung (Pembangunan jalan, senderan / talud dan pagar atau tralis), kegiatan (M2) Pembangunan Desa Wisata Religius Watu Payung (Jalan, senderan/talud pagar jalan dan gedung tampa tembok) dan kegiatan (M3) Peningkatan Kapasitas Kelompok Kesenian (ketiga usulan kegiatan ini status tanahnya milik Perhutani).

Secara keseluruhan usulan kegiatan prioritas yang diusulkan ke Bidang I, Bidang II, dan Bibang III hasil Musrenbang Kecamatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Kecamatan yang usulan kegiatannya masuk 100 % (9 kegiatan) dengan kata lain tiga usulan Bidang I, II, dan III baik M1, M2, M3 masuk ke Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dengan sumber dana APBD II ada 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan : Bulu, Temanggung, Kandangan, Kedu, Parakan, Jumo, Kranggan, Selopampang, Bansari, dan Gemawang.
- Kecamatan yang usulan kegiatannya masuk 89 % (8 kegiatan) ada 5
 Kecamatan, yaitu Kecamatan : Pringsurat, Ngadirejo, Candiroto,
 Kledung, dan Wonoboyo.
- 3. Kecamatan yang usulan kegiatannya masuk 78 % (7 kegiatan) ada 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Tembarak.
- 4. Kecamatan yang usulan kegiatannya masuk 67 % (6 kegiatan) ada 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kaloran, Tretep, dan Bejen.
- 5. Kecamatan yang usulan kegiatannya masuk 56 % (5 kegiatan) ada 1 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tlogomulyo.

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan dokumen Perencanaan Tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. RKPD Tahun 2018 memuat Visi Misi, Kebijakan Umum dan Prioritas Pembangunan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang bersifat Indikatif yang dilaksanakan pada Tahun 2018.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan pedoman untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, dalam penyusunannya memerlukan koordinasi antar Perangkat Daerah dan Partisipasi Masyarakat serta seluruh pelaku Pembangunan (Stakekolders) melalui forum Perangkat Daerah dan Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkopimda), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama Sinkronisasi dan Penyelarasan Rencana Program dan Kebijakan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun RAPBD, dan juga sebagai acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum, mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang diwujudkan dalam Rencana Kerja (renja) perangkat daerah.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan Kemampuan keuangan Daerah, selain pembiayaan yang di usulkan APBD Kabupaten, juga berisi usulan kegiatan yang direncanakan dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah juga pemerintahan Pusat (APBN).

Dokumen RKPD Kabupaten Temanggung menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018 serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun 2018. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018, tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka Investasi pemerintah dan pelayanan politik, tetapi juga memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Daerah, Rencana Kerja Pagu Indikatif, Pendanaan dan target-target di Tahun 2018.
- 2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan Kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD provinsi Jawa Tengah maupun APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2018 sebagai Penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 ini merupakan sebuah upaya terakhir dalam perencanaan IKD sesuai target RPJMD 2013-2018.
 - Dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 terhadap sebanyak 440 IKD berdasarkan hasil evaluasi capaian IKD dalam Review RPJMD 2013-2018 pada Tahun 2018 sebanyak 234 IKD telah tercapai, 161 IKD akan tercapai dan IKD perlu upaya keras didukung 42 dan konsistensi program prioritas.
- 4. Dalam rangka meningkatkan efesiensi, efektifitas, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung berkewajiban untuk melakukan pemantauan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Tahun 2018, ke dalam

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 serta Prioritas dan Pagu Indikatif OPD Tahun 2018.

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO



EXECUTIVE SUMMARY: RKPD TAHUN 2018



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG JI. Kadar No.12 Sidorejo Temanggung





RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. RKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD dengan VISI DAERAH "TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH.

Dokumen RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Maksud perumusan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah sebagai sebuah koridor perencanaan kegiatan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up. Sedangkan tujuan dari dokumen RKPD ini adalah sebagai panduan penyusunan rencana kerja bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.

Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan memperhatikan evaluasi RKPD tahun 2016 dan evaluasi RPJMD 2013 - 2018 maka teridentifikasi 40 buah permasalahan pembangunan di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

MISI 1:

- 1) Terbatasnya infrastruktur dan sarana prasarana pertanian/perikanan;
- 2) Belum optimalnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pertanian serta diversifikasi produk dalam mendukung perkembangan agribisnis, agrowisata, dan agroindustri;
- 3) Belum optimalnya pengembangan kawasan pertanian/perikanan.





- 4) Belum optimalnya pengelolaan cadangan dan penganekaragaman pangan daerah;
- 5) Masih rendahnya produktifitas komoditas perkebunan (kopi robusta);
- 6) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani, peternak, dan penyuluhan pertanian;
- 7) Masih rendahnya produksi perikanan tangkap di perairan umum;
- 8) Belum optimalnya peran koperasi dan UKM;
- 9) Belum optimalnya pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal;
- 10) Masih rendahnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar;
- 11)Masih rendahnya cakupan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang
- 12) Masih rendahnya penyelesaian sengketa konsumen;
- 13)Sarana dan prasarana perdagangan masih belum merata di semua wilayah;
- 14) Rendahnya nilai tambah produksi dan daya saing produk industri;
- 15)Belum optimalnya perkembangan sentra atau klaster industri potensial;
- 16) Masih rendahnya lama tinggal wisatawan;
- 17)Belum optimalnya pengembangan potensi wisata;
- 18) Kualitas Sumber Daya Manusia para pelaku pariwisata masih rendah;
- 19) Strategi Promosi dalam pemasaran pariwisata belum optimal;

MISI 2:

- Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Rumah Tangga Sasaran yang belum tertangani;
- 2) Masih rendahnya cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis;
- Belum optimalnya penangananan kerusakan fisik akibat bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sementara tanggap darurat pasca bencana;
- 4) Belum optimalnya penanganan korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;
- 5) Masih rendahnya persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama;





- 6) Belum optimalnya pengujian peralatan di perusahaan;
- 7) Belum optimalnya peningkatan klasifikasi tipe desa;
- 8) Kurangnya Partisipasi Rumah Tangga Miskin dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- 9) Kurangnya cakupan lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif (BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, Lumbung Pangan);
- 10) Masih rendahnya cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna
- 11)Belum meratanya cakupan bantuan prasarana olah raga bagi klub olah raga;
- 12) Prestasi kegiatan kepemudaan belum optimal;
- 13)Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam upaya peningkatan kapasitas anggotanya, khususnya dalam memberikan kemandirian dan kecakapan untuk hidup;
- 14) Masih terjadi kasus SARA;
- 15)Belum optimalnya penanganan tindak penyalahgunaan narkotika;

MISI 3:

- Belum tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkar Kota Parakan:
- 2) Masih adanya jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan trotoar dengan kondisi yang rusak;
- 3) Belum optimalnya ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya;
- 4) Belum optimalnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- 5) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan (AMPL);
- 6) Adanya kawasan permukiman yang berada di daerah rawan bencana;
- 7) Masih adanya permukiman kumuh;
- 8) Sarana dan prasarana lingkungan sehat di kawasan permukiman masih belum memenuhi standart.





- 9) Masih adanya Keluarga yang belum memiliki akses atas rumah sehat, makanan sehat, dan lingkungan sehat;
- 10) Masih ada tanah pemerintah desa yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten yang belum diganti;
- 11) Adanya konflik pertanahan di masyarakat;
- 12)Sarana dan prasarana jalan, berupa rambu-rambu, penunjuk jalan, marka jalan, pengaman jalan, dan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) masih kurang
- 13) Belum optimalnya peningkatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan terminal, sub terminal, dan halte;
- 14)Belum optimalnya peran serta perempuan dan anak serta kesetaraan gender dalam pembangunan.
- 15)Belum optimalnya pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan benda-benda budaya dan cagar budaya;
- 16) Pelayanan angkutan umum belum merata di semua wilayah;
- 17)Belum optimalnya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan;
- 18) Masih rendahnya aksesibilitas internet di ruang publik;
- 19)Belum optimalnya perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 20) Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara
- 21) Besaran Penanganan Lahan kritis
- 22) terbangunnya sumber energi alternatif terbarukan;

MISI 4

- 1) Kurangnya jumlah dan belum meratanya distribusi guruPNS;
- 2) Rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru;
- 3) Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar;
- 4) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah;

MISI 5

- 1) Belum optimalnya pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD;
- Masih rendahnya angka penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate);





- 3) Masih adanya kematian bayi, balita dan ibu;
- 4) Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin, wilayah terpencil, dan perbatasan, serta Lansia;
- 5) Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar;
- 6) Masih rendahnya Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan;

MISI 6:

- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik dalam perencanaan dan pengendalian evaluasi pembangunan daerah;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi pembangunan dan kajian yang sudah disusun sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah tahun berikutnya;
- 4) Masih rendahnya Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pembangunan desa;
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government);
- 7) Banyaknya pegawai PNS yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) baik diklat penjenjangan maupun diklat tekhnis;
- 8) Belum semua Perangkat Daerah, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang menyusun standar pelayanan publik;
- 9) Belum semua Perangkat Daerah, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP;
- 10)Belum semua jenis perizinan yang memiliki standar pelayanan publik atau standar operasional prosedur;
- 11) Rendahnya minat baca masyarakat;
- 12)Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanaman modal;
- 13)Kurangnya intensitas patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;





- 14) Kurangnya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi;
- 15) Belum semua keluarga memiliki Kartu Keluarga (KK);

Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok dan dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta keberlanjutan pembangunan daerah, maka isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 adalah:

 Pertanian modern yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi

Sebagai daerah agraris Kabupaten Temanggung melihat bahwa sektor pertanian berperan dalam peningkatan daya saing ekonomi. Keterkaitan antara produk hulu (pertanian) dan produk hilir (industri) menjadi sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang baik dalam budidaya maupun pengolahan hasil untuk dapat dioptimalkan. Peran lembaga ekonomi produktif menjadi hal harus ditingkatkan guna meningkatkan daya saing.

Klasterisasi dan pengembangan kelompok usaha menjadi salah satu pendorong dalam mewujudkan daya saing daerah yang sehat. Dalam rangka peningkatan daya saing pengembangan kawasan dapat dilaksanakan. Pengembangan kawasan ini dapat meminimalisir kelemahan yang ada disektor padat karya ini. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta Promosi dalam rangka memperluas pasar dan meningkatkan penetrasi produk unggulan daerah dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi dengan dijamin adanya keberlanjutan produk.

Peningkatan penggunaan bibit/benih unggul di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas suatu produk. Disamping itu diversifikasi jenis tanaman dan diversifikasi produk industry juga diperlukan guna





mempertahankan keberlangsungan usaha. Peningkatan produk tidak akan lepas dari kapasitas SDM pengelola dan lembaga pendukung seperti koperasi dan lain sebagainya terus ditingkatkan dengan pelatihan dan stimulan modal.

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai daerah agraris, Pariwisata berbasis alam dapat menjadi salah satu sektor yang diunggulkan. Dengan kelebihan tersebut dan didukung dengan produk unggulan daerah pariwisata dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat menjadi salah satu daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Pengurangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang ada di Kabupaten Temanggung. Kemiskinan ini suatu maslah yang bersifat multidimensi yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Salah satu cara pengurangan angka kemiskinan ini adalah dengan meningkatkan pembangunan yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar tersebut adalah pangan (raskin, rastra), pendidikan (bantuan siswa miskin), kesehatan (BPJS, JKT), air minum (PSAB, PAMSIMAS), Sanitasi (IPAL, SLBM) dan perumahan (RTLH).

Ekonomi kerakyatan dapat menjadi salah satu cara mengurangi ekonomi kemiskinan. Perkuatan angka kerakyatan ini dapat dilaksanakan dengan cara perkuatan kelembagaan dan memperluas jaringan kemitraan serta stimulant berusaha. Perkuatan ekonomi kerakyatan ini dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan lembaga atau perusahaan baik secara langsung maupun dengan pengembangan peningkatan dan kemitraan perusahaan dengan pemerintah/masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).

3) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur yang merata dan dalam kondisi yang baik akan dapat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan





meningkatkan mobilisasi sehingga daya saing ekonomi akan meningkat. Kewenangan penanganan jalan masih menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam meningkatkan kualitas infastruktur jalan. Kedepan perlu disempurnakan regulasi yang mengatur kewenangan penanganan infastruktur jalan ini dapat diperjelas. Dengan semakin jelasnya kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pembangunan jalan beserta bangunan/saran pendukungnya.

Infrastruktur lain yang tak penting adalah sarana dan Irigasi memegang peranan vital dalam rangka prasarana irigasi. meningkatkan mempertahankan dan produktivitas pangan. Pengembangan jaringan baru, dan peningkatan kapasitas jaringan diharapkan akan mendukung program ketahanan pangan melalui Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan (LP2B). mempertahankan ketersediaan air maka upaya konservasi lingkungan khususnya lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi suatu yang harus dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan posisi geografis kabupaten Temanggung yang berada di daerah hulu. Untuk itu fungsi kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk dapat dipertahankan sesuai dengan rencana peruntukkannya.

Kebutuhan dasar manusia yang dapat dipenuhi pembangunan infrastruktur adalah papan (perumahan), air minum dan sanitasi. Dengan demikian pembangunan dan penyediaan sarana prasarana kawasan perumahan dan pemukiman menjadi penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut terkait dengan masih adanya kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Temanggung.

4) Peningkatan Kesehatan

Salah satu indikator kesehatan yang sekaligus menjadi kebutuhan dasar adalah air bersih dan sanitasi. Penetrasi program kedua hal tersebut masih perlu ditingkatkan karena hal tersebut sangat mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dengan terlaksananya PHBS maka beberapa indikator kesehatan akan tercapai. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap





kesehatan maka pengembangan sarana dan prasarana kesehatan beserta pendukungnya masih sangat diperlukan. Distribusi tenaga kesehatan, paramedisyang ada menjadi menjadi satu pekerjaan rumah Hal tersebut tidak lepas masih bagi Kabupaten Temanggung. kurangnya tenaga kesehatan yang ada dan bersedia bertugas di Kabupaten Temanggung. Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan peran jaminan kesehatan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Sistem dan mekanisme pelayanan kesehatan terkait dengan jaminan kesehatan masih harus disosialisasikan secara masif yang diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan.

5) Peningkatan kualitas Pendidikan

Pemerintah mempunyai tugas mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang didukung dengan sumberya pendidikan yang handal. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan sumber daya manusia yang menjadi pelaku pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilaksanakan dengan wajib belajar 12 tahun. Hal lain yang dapat dilaksanakan dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan distribusi tenaga pendidik dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Disamping itu peningkatan kualitas dan kompetensi dari tenaga pendidik harus dilaksanakan.

6) Tata Kelola Pemerintahan

Dengan diundangkannya Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan. Pembagian peran yang lebih jelas antara Pemerintah daerah dan desa akan mempercepat laju pembangunan. Pembagian peran baik dalam hal pelaksanaan pembangunan maupun pembiayaan dapat menjadi salah satu opsi hambatan dalam pembangunan khususnya dalam hal kewenangan penanganan dan keterbatasan anggaran. Tentu saja hal ini membutuhkan suatu regulasi lanjutan yang dapat mendorong





terlaksananya pembagian peran tersebut. Dengan pembagian peran tersebut kapasitas Pemerintahan Desa juga dapat di tingkatkan.

Organisasi perangkat daerah yang baru dan didukung dengan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga akan menjadi factor utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Disisi lain peningkatan kapasitas PNS juga tetap dibutuhkan dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan baik dalam untuk penjenjangan maupun teknis guna menunjang kinerja.

Guna menunjang terwujudnya tata kelola yang baik *e-government* menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan. Transparansi keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan *e-government*. Implementasi *e-government* dapat dilaksanakan dengan berbagai media baik cetak maupun elektronik agar transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tetap terjaga. Persyaratan, prosedur dan mekanisme pelayanan terhadap masyarakat di berbagai urusan harus jelas dalam bentuk regulasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.

Salah satu perwujudan demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa. Suksesnya pemilukada dan pilkades tersebut menjadi salah satu tolok ukur kedewasaan dalam berdemokrasi sekaligus pelaksanaan pemerintahan yang bersih. Disamping itu peran serta dari masyarakat merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat berlanjut dalam penentuan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Program Daerah Tahun 2018

Melihat indikator masalah dan isu strategis yang ada, rencana program dan kegiatan prioritas di tahun 2018 di titik beratkan untuk menjadi sebuah upaya terakhir dalam pencapaian IKD sesuai target RPJMD 2013 – 2018 serta dapat menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah





terutama dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Program dan Kegiatan tersebut mencakup berbagai kegiatan yang yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai 1) Program dan kegiatan yang menjadi kewenangan per urusan Pemerintah Kabupaten Temanggung; 2) Program dan kegiatan yang menjadi fungsi penunjang; 3) Program dan Kegiatan pendukung operasional yang ada disetiap Perangkat Daerah; 4) Program dan kegiatan yang mengacu pada Prioritas Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2013-2018; 5) Program dan kegiatan yang mendukung kebijakan pusat; 6) Program dan kegiatan yang mendukung kebijakan Provinsi Jawa Tengah 7) Program dan kegiatan yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Program dan kegiatan prioritas yang dimaksud bisa dilihat sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan prioritas kegiatan sejumlah19 kegiatan;
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Pasar Sembilan tahun, dengan prioritas kegiatan sejumlah 47 kegiatan;
- c. Program Pendidikan Non Formal, dengan prioritas kegiatan sejumlah17 kegiatan;
- d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 10 kegiatan;
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 22 kegiatan.

2. Bidang Kesehatan

- a. Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan prioritas kegiatan sejumlah2 kegiatan;
- b. Program Upaya Kesehatan Kasyarakat, dengan prioritas kegiatan sejumlah33 kegiatan;
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan prioritas kegiatan dengan prioritas kegiatan sejumlah5 kegiatan;





- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan prioritas kegiatan sejumlah5 kegiatan;
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan prioritas kegiatan sejumlah2 kegiatan;
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan prioritas kegiatan sejumlah3 kegiatan;
- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dengan prioritas kegiatan sejumlah7 kegiatan;
- k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan prioritas kegiatan sejumlah2 kegiatan;
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- n. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan prioritas kegiatan 1sejumlah;
- o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan prioritas kegiatan3 sejumlah.

3. BidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan prioritas kegiatan sejumlah7 kegiatan;
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong,
 dengan prioritas kegiatan sejumlah3 kegiatan;
- c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan prioritas kegiatan sejumlah2 kegiatan;
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- g. Program Pemberdayaan Konstruksi, dengan prioritas kegiatan sejumlah1 kegiatan;
- h. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;





4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaa, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- b. Program Pengembangan Prasarana Perkotaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- c. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- d. Program Pengembangan Perumahan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- e. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- g. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan prioritas kegiatan sejumlah 8 kegiatan;

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, dengan prioritas kegiatan sejumlah 8 kegiatan;
- b. Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- c. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;

6. Bidang Sosial

- a. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil,
 dan PMKS lainnya, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3
 kegiatan;
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Social,
 dengan prioritas kegiatan sejumlah 10 kegiatan;
- c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Social, dengan prioritas kegiatan sejumlah;
- e. Program pencegahan dan kesiapsiagaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah;
- f. Program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, dengan prioritas kegiatan sejumlah;





- g. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial, dengan prioritas kegiatan sejumlah;
- h. Program pembinaan anak terlantar, dengan prioritas kegiatan sejumlah;

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Tenagakerja

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan prioritas kegiatan sejumlah 9 kegiatan;
- b. Program peningkatan kesempatan kerja dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;
- d. Program pengembangan wilayah transmigrasi dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

2. BidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak & perempuan dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender &
 Anak dengan prioritas kegiatan sejumlah 9 kegiatan;

3. Bidang Pangan

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan,
 dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;

4. Bidang Pertanahan

- a. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
 Pemanfaatan Tanah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1
 kegiatan;
- b. Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

5. Bidang Lingkungan Hidup

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,
 dengan prioritas kegiatan sejumlah 9 kegiatan;





- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan prioritas kegiatan sejumlah 21 kegiatan;
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program penataan administrasi kependudukan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 8 kegiatan;
- b. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program peningkatan ketahanan masyarakat desa, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.kelurahan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 9 kegiatan;
- c. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;
- d. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
 - e. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa, dengan prioritas kegiatan sejumlah 21 kegiatan;
 - f. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;

8. BidangPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Program keluarga berencana, dengan prioritas kegiatan sejumlah 16 kegiatan;
- b. Program pembinaan kesejahteraan keluarga, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;

9. Bidang Perhubungan

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan prioritas kegiatan sejumlah 8 kegiatan;





- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 6 kegiatan;
- d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- e. Prog. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;

10. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Program pengembangan informasi dan komunikasi, dengan prioritas kegiatan sejumlah 14 kegiatan;dan
- b. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;
- c. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan prioritas kegiatan sejumlah 9 kegiatan;
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

12. Bidang Penanaman Modal

- a. Program peningkatan pelayanan perizinan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 8 kegiatan;
- b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;

13. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;

14. Bidang Statistik

a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;





15. Bidang Persandian

a. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

16. Bidang Kebudayaan

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan prioritas kegiatan sejumlah 5 kegiatan;
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan prioritas kegiatan sejumlah 13 kegiatan;

17. Bidang Perpustakaan

a. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 7 kegiatan;

18. Bidang Kearsipan

- a. Proram Perbaikan Sistim Administrasi Kearsipan Daerah,
 dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Kearsipan,
 dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, dengan prioritas kegiatan sejumlah ... kegiatan;

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- b. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

2. Bidang Pariwisata

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- c. Program Pengembangan Kemitraan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;





3. Bidang Pertanian

- a. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan/perkebunan dengan prioritas kegiatan sejumlah 6 kegiatan;
- b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunandengan prioritas kegiatan sejumlah 16 kegiatan;
- c. Program Pemberayaan Petanidengan prioritas kegiatan sejumlah16 kegiatan;

4. Bidang Kehutanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan sejak tahun 2017 menjadi kewenangan Provinsi.

5. BidangEnergi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral sejak tahun 2017 menjadi kewenangan Provinsi, kecuali sub urusan Energi Baru Terbarukan dengan kegiatan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah. Akan tetapi sub urusan Energi Baru Terbarukan ini belum ada di Kabupaten Temanggung.

6. Bidang Perdagangan

- a. Program Perlidungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan,
 dengan prioritas kegiatan sejumlah 10 kegiatan;
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- c. Program Peningkatan Efiensi Perdagangan dalam Negeri, dengan prioritas kegiatan sejumlah 4 kegiatan;
- d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dengan prioritas kegiatan sejumlah 2 kegiatan;
- e. program Pengelolaan Pasar daerah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 3 kegiatan;
- f. Program Pembinaan Pedagang dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan.

7. Bidang Perindustrian

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan prioritas kegiatan sejumlah 10 kegiatan;





a. Program pengembangan wilayah transmigrasi, dengan prioritas kegiatan sejumlah 1 kegiatan;

Kesimpulan

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung 2013-2018 441 indikator, telah tercapai sejumlah 229 indikator (52%) adapun yang akan tercapai sejumlah 168 indikator (38%), dan yang perlu upaya keras sejumlah 44 indikator (10%). Kegiatan- kegiatan yang akan tercapai dan perlu upaya keras tersebut perlu di dukung dan di prioritaskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018.



